PROVINSI BALI

KABUPATEN BANGLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 4 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
2025

DAFTAR ISI

I.	LAMPIRAN I	RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025
II.	LAMPIRAN II	RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2025
III.	LAMPIRAN III	RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025
IV.	LAMPIRAN IV	REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2025
V.	LAMPIRAN V	REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025
VI.	LAMPIRAN VI	REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2025
VII.	LAMPIRAN VII	SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025
VIII.	LAMPIRAN VIII	SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025
IX.	LAMPIRAN IX	SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025
X.	LAMPIRAN X	DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2025
XI.	LAMPIRAN XI	DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 7 Juli 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
9. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Bali;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
21. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 16,76 /2024);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daeah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangli.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.218.328.853.411,00 (satu triliun dua ratus delapan belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp. 101.570.169.437,13 (seratus satu miliar lima ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.319.899.022.848,13 (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan koma tiga belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan daerah		
	a. Semula	Rp.	1.204.328.853.411,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	114.333.813.726,32
	Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	1.318.662.667.137,32
2.	Belanja daerah		
	a. Semula	Rp.	1.218.328.853.411,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	101.570.169.437,13
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	1.319.899.022.848,13
3.	Pembiayaan daerah		
	a. Penerimaan pembiayaan		
	1) Semula	Rp.	27.500.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(13.300.879.629,19)
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	14.199.120.370,81
	b. Pengeluaran pembiayaan		
	1) Semula	Rp.	13.500.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(537.235.340,00)
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	12.962.764.660,00
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	1.236.355.710,81
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a.	Pendapatan asli daerah		
	1) Semula	Rp.	307.453.242.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.424.797.860,68)
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	303.028.444.139,32
b.	Pendapatan transfer		
	1) Semula	Rp.	891.195.807.411,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	124.438.415.587,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.015.634.222.998,00
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
	1) Semula	Rp.	5.679.804.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.679.804.000,00)
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	93.596.300.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	93.596.300.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	189.646.304.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.284.918.288,66)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	184.361.385.711,34

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	6.682.100.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(366.000.000,00)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	6.316.100.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	17.528.538.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.226.120.427,98
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	18.754.658.427,98

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp.	842.730.907.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(27.099.613.000,00)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	815.631.294.000,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp.	48.464.900.411,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	151.538.028.587,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	200.002.928.998,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp.	5.679.804.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.679.804.000,00)
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	0,00

b. Dana darurat

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan		

perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasional		
1) Semula	Rp.	968.210.393.306,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.281.843.905,89
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	974.492.237.211,89
b. Belanja modal		
1) Semula	Rp.	80.276.399.043,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	110.201.319.663,58
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	190.477.718.706,58
c. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	2.227.335.462,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(62.997.132,34)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	2.164.338.329,66
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp.	167.614.725.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(14.849.997.000,00)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	152.764.728.600,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	611.170.824.963,83
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(12.866.355.996,21)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	598.304.468.967,62
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	333.260.908.976,17
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	16.230.293.218,10
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	349.491.202.194,27
c. Belanja bunga		
1) Semula	Rp.	4.331.637.634,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(891.982.616,00)
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	3.439.655.018,00
d. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	19.007.521.732,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.809.889.300,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 22.817.411.032,00

f. Belanja bantuan sosial
1) Semula Rp. 439.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 439.500.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 45.000.000,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 45.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin
1) Semula Rp. 25.196.682.243,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.793.313.596,58
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 27.989.995.839,58

c. Belanja modal bangunan dan gedung
1) Semula Rp. 29.553.127.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.440.112.428,00
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 33.993.239.428,00

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
1) Semula Rp. 15.740.413.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 108.661.077.989,00
Jumlah belanja modal jalan, Jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 124.401.490.989,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya
1) Semula Rp. 8.942.829.300,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (6.425.732.700,00)
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya perubahan Rp. 2.517.096.600,00

f. Belanja modal aset lainnya
1) Semula Rp. 843.347.500,00
Bertambah/(berkurang) Rp. 687.548.350,00
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp. 1.530.895.850,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :
a. Semula Rp. 2.227.335.462,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. (62.997.132,34)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 2.164.338.329,66

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil
1) Semula Rp. 12.845.170.400,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja bagi hasil

setelah perubahan	Rp.	12.845.170.400,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.	154.769.555.200,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(14.849.997.000,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	139.919.558.200,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.	27.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(13.300.879.629,19)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	14.199.120.370,81
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp.	13.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(537.235.340,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	12.962.764.660,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp.	27.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(13.300.879.629,19)
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	14.199.120.370,81
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		

setelah perubahan	Rp.	0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp.	12.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(537.235.340,00)
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	11.962.764.660,00

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 2 September 2025

BUPATI BANGLI,

I GEDE NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 2 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

I DEWA BAGUS RIANA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI (4,54 /2025)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGLI

NOMOR : B.900.1.3/8/DF/DPRD

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : a. bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan pembahasan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD Kabupaten Bangli;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli tentang Persetujuan Terhadap Penyempurnaan Hasil Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1

Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menyetujui penyempurnaan Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 1 September 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGLI,

I KETUT SUASTIKA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGLI
Jalan Brigjen Ngurah Rai No.32 Bangli

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR B. 900.1.3/8/DF/DPRD
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Tujuan Evaluasi		
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Bupati Bangli tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Bupati Bangli tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan:		
	a. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;		
	b. Kepentingan umum;		
	c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan		
	d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).		
II.	Gambaran Umum Evaluasi		
	Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati.	Berdasarkan Tabel 1 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli telah berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD sebagaimana maksud Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.	
	Pelaksanaan terhadap evaluasi Perubahan APBD yaitu: Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan dan jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut:	Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bangli harus mempertahankan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 mulai dari RKPD Perubahan, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 4.7.2.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2024.	
	1 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangli Tahun 2025	Sesuai, (paling lambat minggu III bulan Juli)	Peraturan Bupati Bangli Nomor 14 Tahun 2024, 6 Juni 2025

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	2 Penyampaian Rancangan (P-KUA) dan Rancangan P-PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)	700/1383/Reviu KUA-PPASP/lr-11/ltda 20 Juni 2025
	3 Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (P-KUA) dan Rancangan P-PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)	8-900.1.1.1/1271/BKPAD 20 Juni 2025
	4 Kesepakatan Rancangan P-KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bangli	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)	900.1.2/1434/BKPAD dan 900.1.2/414/DPRD 7 Juli 2025
	Kesepakatan Rancangan P-PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bangli	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)	900.1.2/1435/BKPAD dan 900.1.2/415/DPRD 7 Juli 2025
	5 Penyampaian Rancangan Perda tentang P-APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Bangli	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)	900.1.1.4/1488/BKPAD 10 Juli 2025
	6 Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Bangli dan Kepala Daerah tentang Ranperda Perubahan APBD 2025	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berakhir)	900.1.2/1652/BKPAD B.900.1.2/461/DF/DPRD 28 Juli 2025
	7 Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang P-APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P-APBD Kabupaten Bangli untuk dievaluasi	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda P-APBD)	900.1.1/1663/BKPAD/2025 30 Juli 2025
		Berdasarkan Tabel 1 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli telah berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD sebagaimana maksud Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.	
		Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bangli harus mempertahankan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 mulai dari RKPD Perubahan, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 4.7.2.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 4.7.2.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2024.
		Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk:	
		a. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pemerintah Kabupaten Bangli akan mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerahguna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
		b. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah; dan	Kabupaten Bangli akan mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah
		c meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten bangli akan berusaha meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025
III.	Sinkronisasi Kebijakan Pusat Dan Daerah		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	A. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk Mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang Besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam memenuhi mandatory spending, sebagai berikut:		
	1. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan		
	Penyediaan anggaran untuk fungsi Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran rekapitulasi belanja pemerintah daerah untuk mandatory spending fungsi pendidikan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp322.985.200.950,00 atau 25,80% dari total belanja daerah, berkurang sebesar Rp3.700.787.350 atau 1,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp326.685.988.300 atau 26,81% dari total belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Pemerintah Kabupaten Bangli telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir 5.1.2 dan 5.3.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan tersebut, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Bangli sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan	Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha selalu mempertahankan alokasi anggaran fungsi pendidikan tersebut sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Bangli sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
		Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bangli sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.	Pemerintah Kabupaten bangli akan sealu berusaha untuk menyesuaikan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik secara bertahap untuk memenuhi upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bangli sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.namun tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal Kabupaten Bangli
	2.□ Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik		
	Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp302.251.413.021,47 atau 27,50% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa bertambah sebesar Rp47.611.221.594,47 atau 18,70% dari yang dianggarkan Rp254.640.191.427,00 atau 24,23% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.050.929.390.949,24	Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengalokasikan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, butir 5.3.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke pada daerah dan/atau desa, sebagaimana maksud butir 3.2.2.k dan 3.2.2.l Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Kabupaten Bangli akan berusaha mmeningkatkan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik secara bertahap agar bisa mencapai 40% dari total belanja daerah sesuai amanat Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemerintah Kabupaten Bangli belum mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa yang dianggarkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.		
	3. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai		
	Penganggaran Belanja Pegawai semula Rp611.170.824.963,83 berkurang sebesar Rp12.851.355.996,21 atau 2,10% menjadi Rp598.319.468.967,62 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.		
	Penyediaan anggaran Belanja Pegawai yang diproyeksikan sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut: Selanjutnya jumlah alokasi Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp535.365.396.667,62 atau 42,76% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% dari total belanja daerah.	Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli harus menganggarkan Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir 3.4.1.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha menyesuaikan secara bertahap dalam pengalokasian belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% hingga sampai pada tahun anggaran 2027 sesuai amanat ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	4. Belanja Wajib yang Didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Yang Telah Ditentukan Penggunaannya		
	a. Penggunaan Opsen PKB		
	Penyediaan anggaran untuk Penggunaan Opsen PKB yang tercantum dalam Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah untuk penggunaan hasil penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) tidak mengalami perubahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp4.866.400.000,00 atau 24,71% dari total pendapatan Opsen PKB Rp19.695.000.000,00	Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan hasil penerimaan Opsen PKB paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir 3.3.1.1.2.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan hasil penerimaan Opsen PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2024 dan berusaha untuk selalu konsisten pada tahun anggaran berikutnya
	b. Penggunaan PBJT atas Tenaga Listrik		
	Penyediaan anggaran untuk penggunaan PBJT atas Tenaga Listrik tidak mengalami perubahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yaitu Rp1.538.782.000,00 atau 10,26% dari total pendapatan PBJT atas Tenaga Listrik Rp15.000.000.000,00, telah memenuhi alokasi yang diamanatkan dalam butir 3.3.1.1.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Penggunaan atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik:	
		1) hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% untuk penyediaan penerangan jalan umum; dan	untuk penggaran PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum telah ditindaklanjuti dengan menambahkan anggaran belanjanya
		2) penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPBU).	
		Sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Penggunaan atas Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok		
	Penyediaan anggaran untuk penggunaan Pajak Rokok semula sebesar Rp18.322.021.242,00 atau 100,00% dari total hasil penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp18.322.021.242,00 berkurang sebesar Rp5.154.930.205,00 atau 28,14% sehingga menjadi sebesar Rp60.395.487.000,00 atau 71,86% dari total hasil penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp18.322.021.242,00. Hasil penerimaan pajak rokok bagian kabupaten, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum yaitu:		Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok digunakan dalam rangka kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran dan tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage (UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan oleh pemerintah daerah
	1) penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan:		
	a) penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.		
	b) selain digunakan untuk kegiatan tersebut pada huruf a), pajak rokok digunakan untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75% dari 50% dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak Provinsi/Kabupaten/Kota atau ekuivalen sebesar 37,5%. Dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program JKN, Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang merupakan bagian Provinsi/Kabupaten/Kota, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran dan tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage (UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas III, penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dan tunggakannya serta kontribusi peserta PBI		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	2) penggunaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum digunakan untuk minimal berupa sosialisasi ketentuan dibidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal. Diprioritaskan apabila DBH-CHT tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud penggunaan/pemanfaatan pajak rokok dalam bidang penegakan hukum termasuk kerjasama antara pemerintah daerah dan DJBC memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman kerja sama pemanfaatan dana pajak rokok dalam pelaksanaan bidang penegakan hukum		
	d. Penggunaan Pajak Air Tanah		
	Penyediaan anggaran untuk penggunaan Pajak Air Tanah semula Rp660.000.000 atau 100,00% dari total pendapatan Pajak Air Tanah sebesar Rp660.000.000,00, berkurang Rp557.280.000 atau 84,44% menjadi Rp102.720.000,00 atau 15,56% dari total pendapatan Pajak Air Tanah sebesar Rp660.000.000,00, telah memenuhi alokasi yang diamanatkan dalam butir 3.3.1.1.2.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah Kabupaten/Kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan atau pepohonan, dan pengelolaan limbah sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
		Dalam hal terdapat kendala pada proses penarikan data penandaan belanja wajib hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya dalam SIPD RI, Pemerintah Kabupaten Bangli agar berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri.	
	B. Penyediaan Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. SPM Bidang Pendidikan		
	Alokasi anggaran untuk Belanja SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp24.168.894.136,00 atau 7,72% dari total Belanja Urusan pemerintahan Bidang Pendidikan Rp313.187.083.050,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada: a. angka partisipasi sekolah sebesar Rp13.049.973.386,00; b. literasi dan numerasi sebesar Rp10.632.536.500,00; c. keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas sebesar Rp46.335.600,00; dan d. kekhususan PAUD sebesar Rp440.048.650,00.	Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kabupaten Bangli sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta butir 5.2.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kabupaten Bangli sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundangan
	2. SPM Bidang Kesehatan		
	Alokasi anggaran untuk Belanja SPM Bidang Kesehatan sebesar Rp1.689.240.000,00 atau 0,60% dari total Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp282.111.548.714,47	Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kabupaten Bangli sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kabupaten Bangli sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundangan
	Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada: a. pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar Rp506.800.000,00; b. pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar Rp84.325.000,00; c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar Rp249.997.000,00; d. pelayanan kesehatan balita sebesar Rp42.825.000,00; e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar Rp252.325.000,00; f. pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar Rp46.150.000,00; g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar Rp136.893.000,00; h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar Rp42.475.000,00; i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sebesar Rp27.475.000,00; j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar Rp142.875.000,00; k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar Rp106.625.000,00; dan l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sebesar Rp50.475.000,00.		
	3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Alokasi anggaran untuk Belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.749.167.756,00 atau 7,35% dari total Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp91.787.482.706,00.	Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten Bangli sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundangan
	Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada:		
	a. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota sebesar Rp6.170.466.606,00; dan		
	b. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp578.701.150,00.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	Alokasi Anggaran untuk Belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp180.000.000,00 atau 6,98% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.579.840.000,00 yang diuraikan dalam pelayanan dasar yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp180.000.000,00.	Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Kabupaten Bangli sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 serta butir 5.2.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
	5. SPM Bidang Sosial		
	Alokasi anggaran untuk Belanja SPM Bidang Sosial sebesar Rp190.656.400,00 atau 3,22% dari total Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp5.929.630.050,00.	Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM bidang Sosial untuk Kabupaten Bangli sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha untuk memenuhi pencapaian SPM bidang Sosial untuk kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
	Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada:		
	a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial sebesar Rp137.552.800,00; dan		
	b. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp53.103.600,00.		
	6. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
	Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Trantibum Linmas sebesar Rp2.508.063.900,00 atau 9,48% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp26.466.483.850,00.	Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM bidang Trantibum Linmas untuk Kabupaten Bangli sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan memprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM bidang Trantibum Linmas untuk Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
	Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada:		
	a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten/Kota sebesar Rp1.303.713.900,00;		
	b. pelayanan informasi rawan bencana sebesar Rp41.670.200,00;		
	c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar Rp20.863.000,00;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar Rp857.759.800,00; dan		
	e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar Rp304.920.000,00.		
	Berkaitan dengan hal tersebut, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 agar diprioritaskan dalam rangka pemenuhan SPM.	Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli akan mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025
	C. Penyediaan anggaran Alokasi APBD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam menunjang prioritas nasional sebagai berikut:		
	1. Alokasi Anggaran untuk Penurunan Prevalensi Stunting		
	Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran penurunan prevalensi kekurangan (underweight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi stunting (kurus) pada anak balita semula sebesar Rp19.846.753.570,00 berkurang sebesar Rp1.863.282.986,85 menjadi Rp17.983.470.583,15 atau 1,44% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain tercantum pada :	Rincian belanja pada sub-sub kegiatan yang ditandai sebagai alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok yang berdampak langsung dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari subkegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerja kegiatan serta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 400.5.2/0335/Bangda tanggal 17 Januari 2024 tentang Hasil Pemetaan Sub Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan indikator Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/B/716/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan pada Bulan Juni Tahun 2024 dan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 400.5.2/0335/Bangda tanggal 17 Januari 2024 tentang Hasil Pemetaan Sub Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan indikator Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.	Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Daerah pada masing-masing sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Bangli Tetap berusaha untuk memprioritaskan alokasi belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
	a. subkegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan sebesar Rp1.948.659.868,39;		
	b. subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp3.740.628.798,90;		
	c. subkegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp750.000.000,00;		
	d. subkegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan sebesar Rp1.420.904.851,50;		
	e. subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebesar Rp410.862.170,00; dan		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp1.400.000.000,00.		
	2. Alokasi Anggaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem		
	Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan Ekstrem Rp37.669.847.750 bertambah Rp4.052.861.545,00 menjadi Rp41.722.709.295,00 atau 3,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang antara lain tercantum pada:	Uraian belanja pada sub kegiatan tersebut agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok yang berdampak langsung dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan serta, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem pada masing-masing sub kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Bangli berusaha untuk memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan serta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
	a. subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp1.031.925.000,00 diuraikan dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp1.031.925.000,00;		
	b. subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp1.733.376.788,70 diuraikan dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp1.733.376.788,70;		
	c. subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar sebesar Rp6.941.445.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler sebesar Rp708.312.070,50, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler sebesar Rp79.962.600,00, Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler sebesar Rp5.890.985.329,50, Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebesar Rp57.960.000,00, Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja sebesar Rp197.475.000,00, Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebesar Rp6.750.000,00, Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp44.348.000,00, Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp80.652.000,00;		
	d. subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp4.457.367.000,00 diuraikan dalam sub rincian objek Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler sebesar Rp3.926.048.850,00, Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebesar Rp72.576.000,00, Belanja Modal Peralatan dan mesin BOSP-BOS Reguler sebesar Rp358.354.350,00, Belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS Reguler sebesar Rp16.012.800,00, Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja sebesar Rp84.375.000,00;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD sebesar Rp1.195.328.700,00 diuraikan dalam sub rincian objek Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler sebesar Rp252.978.700,00, Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja sebesar Rp7.500.000,00, Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp934.850.000,00; dan		
	f. subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp22.242.847.612,50 diuraikan dalam sub rincian objek Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp262.336.062,50, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp277.036.062,50, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp5.265.946.358,00, Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp12.600,00, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp29.413.000,00, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp1.214.363.000,00, Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp35.637.000,00, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp6.515.987.118,50, Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp67.558.400,00, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp8.565.743.611,00, Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp8.814.400,00;		
	3. Alokasi Pengendalian Inflasi		
	Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pengendalian inflasi di daerah semula Rp30.096.714.650 bertambah Rp41.796.461.860,00 menjadi Rp71.893.176.510,00 atau 5,74% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 antara lain dianggarkan pada	Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi pemerintah Kabupaten Bangli agar tetap fokus terhadap pengendalian inflasi antara lain: a.peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis; b.pengendalian laju alih fungsi lahan; c.pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran; d.penguatan tata kelola logistik daerah; dan e.pengawasan harga dan operasi pasar. sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3.28 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	pemerintah Kabupaten Bangli tetap akan mendukung percepatan transformasi ekonomi agar tetap fokus terhadap pengendalian inflasi di Kabupaten Bangli

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	a. subkegiatan Rekonstruksi Jalan sebesar Rp57.212.552.200,00 diuraikan dalam subrincian objek Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp39.840.000,00, Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp84.000.000,00, Belanja Modal Jalan Kabupaten sebesar Rp57.034.712.200,00, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp54.000.000,00;		Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha menyediakan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mengalokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya tetap mendukung pengendalian inflasi dengan fokus pada strategi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
	b. subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar Rp5.277.741.660,00 diuraikan dalam subrincian objek Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar Rp39.095.200,00, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebesar Rp18.526.000,00, Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp772.057.600,00, Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp2.001.300.160,00, Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp61.200.000,00, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp1.858.670.000,00, Belanja Modal Alat Pembersih sebesar Rp13.200.000,00, Belanja Modal Peralatan Personal Computer sebesar Rp31.595.000,00, Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi sebesar Rp700.400,00, Belanja Modal Personal Computer sebesar Rp249.525.000,00, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp18.725.000,00, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp10.000.000,00, Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment sebesar Rp58.500.000,00, Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator sebesar Rp75.290.000,00, Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebesar Rp56.376.000,00, dan Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebesar Rp12.981.300,00;		
	c. subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya sebesar Rp754.248.400,00 diuraikan dalam subrincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp724.000,00, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp3.494.400,00, Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp547.000.000,00, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp200.000.000,00, dan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp3.030.000,00; dan		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. subkegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan sebesar Rp4.436.428.200,00 diuraikan dalam subrincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp19.500.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp61.823.900,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp120.000.000,00, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp26.520.000,00, Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp162.000.000,00, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp25.200.000,00, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp1.900.000.000,00, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp150.000.000,00, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp113.800.000,00, Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat sebesar Rp175.516.800,00, Belanja Modal Mebel sebesar Rp65.000.000,00, Belanja Modal Peralatan Personal Computer sebesar Rp18.865.000,00, Belanja Modal Personal Computer sebesar Rp90.000.000,00, Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya sebesar Rp20.000.000,00, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebesar Rp920.240.000,00, Belanja Tagihan Air sebesar Rp36.910.000,00, Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp498.052.500,00, dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp33.000.000,00.		
	Uraian belanja pada subkegiatan tersebut agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok yang berdampak langsung dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari subkegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	4. Alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat		
	Dalam rangka pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional, Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengalokasikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 5.3.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tanggal 25 Juli 2025 hal Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah		
	5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli agar mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dianggarkan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tanggal 7 Mei 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih		
	6. Alokasi Anggaran Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Pemerintah Kabupaten Bangli dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi	Pemerintah Kabupaten Bangli dalam pengadaan barang/jasa tetap akan mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan ketentuan tersebut,

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp370.877.883.619 atau 78,60% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebesar Rp471.846.421.600,85 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah memenuhi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.	dalam rangka menjamin terlaksanannya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan penggunaan aspal buton untuk pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan.	perundang-undangan. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan penggunaan aspal buton untuk pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan.
		Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli harus meningkatkan alokasi anggaran dan realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 sebagaimana, maksud butir 5.2.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli telah berusaha mengalokasikan anggaran dan realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah minimal 40% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah
	D. Penyediaan Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2025, Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah:		
	1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 terhadap Prioritas Pembangunan Nasional diproyeksikan sebagaimana Tabel 5 sebagai berikut:		
	Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas Tahun 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2025 ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:	Berdasarkan Tabel 5 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli telah menyelaraskan alokasi belanja dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung Prioritas Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Terimakasih atas atensinya, Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli untuk selalu menyelaraskan dukungan anggaran terhadap prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
	a. memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);		
	b. memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;		
	c. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;		
	d. memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;		
	e. melanjutkan hilirisasi dan menganbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;		
	f. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;		
	g. pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan; dan		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	h. memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		
	2. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2025 yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025		
	Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun Anggaran 2025 yang tertuang pada Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025, meliputi:		
	a. adat, agama, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal;		
	b. kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan ketenagakerjaan;		
	c. ekonomi kerthi bali: pertanian, kelautan dan perikanan; perindustrian dan perdagangan; umkm dan koperasi; ekonomi kreatif dan digital; serta pariwisata;		
	d. infrastruktur darat, laut dan udara serta transportasi;		
	e. lingkungan, kehutanan, dan energi;		
	f. bali pulau digital dan keamanan bali; dan		
	g. tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.		
	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran dalam rangka Sinkronisasi terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut:	Berdasarkan Tabel 4 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli telah menyelaraskan program Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 sesuai dengan catatan hasil fasilitasi terhadap rancangan peraturan bupati tentang perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025	Terimakasih atensinya, Pemerintah Kabupaten Bangli akan selalu berusaha untuk menyelaraskan program Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan RKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 kedalam sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bangli Tahun 2025.
		Alokasi anggaran untuk sinkronisasi prioritas pembangunan provinsi agar mengacu pada Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025. Prioritas Provinsi pada Perubahan RKPD Tahun 2025, sudah menyesuaikan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD 2025-2029 yaitu:	
		Prioritas Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal; a.prioritas kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan ketenagakerjaan; b.prioritas ekonomi kerthi bali yaitu pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian dan perdagangan, umkm dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata; c.prioritas infrastruktur darat, laut dan udara serta transportasi; d.prioritas lingkungan, kehutanan, dan energi; e.prioritas bali pulau digital dan keamanan bali; dan f.prioritas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha untuk menyelaraskan tabel Prioritas Daerah Tahun 2025 dengan tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dalam SIPD RI dan berusaha untuk konsisten pada tahapan selanjutnya dengan dokumen yang tercantum dalam SIPD RI.
	3. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 5 sebagai berikut:	Berdasarkan Tabel 5 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli agar mempertahankan alokasi anggaran untuk mendukung Prioritas Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 dimaksud sesuai dengan Lampiran Tabel 3.3 KUA-Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah.	
		Penyediaan Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 agar mendukung seluruh Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025.	
	E. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan		
	Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli semula Rp13.185.775.400,00 bertambah Rp960.835.800,00 menjadi Rp14.146.611.200,00 atau 1,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:	Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan paling sedikit sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 sebagaimana ditegaskan dalam butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli paling sedikit sebesar 0,75% dari total belanja daerah untuk anggaran total dinspektorat yang dikurangi dengan belanja gaji dan tunjangan ASN akan dipenuhi secara bertahap dan setelah evaluasi ini juga telah ditambahkan belanja pada kegiatan inspektorat sebesar 158,283,600 rupiah
	a. alokasi belanja gaji dan tunjangan pada Inspektorat Daerah Rp5.553.742.000,00 atau 0,44% dari total belanja daerah;		
	b. TPP pada Inspektorat Daerah sebesar Rp5.752.300.000,00 atau 0,46% dari total belanja daerah; dan; dan	Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:	
	c. alokasi belanja Inspektorat Daerah di luar belanja gaji dan tunjangan dan TPP sebesar Rp2.840.569.200,00 atau 0,23% dari total belanja daerah, yang antara lain tercantum pada sub kegiatan yang mendukung pengawasan yaitu:		
	1) sub kegiatan reviu laporan kinerja semula Rp167.720.000,00 bertambah Rp99.800.000,00 atau 59,50% menjadi Rp267.520.000,00; dan;	1) kegiatan pengawasan, yaitu:	
	2) sub kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebesar Rp33.000.000,00 tidak mengalami perubahan	a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksaan kinerja;	
	Kabupaten Bangli belum mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan pada Inspektorat dan diatas Rp10.000.000.000,00	b. reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;	
	Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja diluar gaji dan tunjangan pada Inspektorat Daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 sebagaimana ditegaskan dalam butir 5.3.33.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah	c. pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;	
		d. reviu laporan keuangan;	
		e. kegiatan pengawasan lainnya meliputi probity audit, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;	
		f. penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		2) peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP; dan	
		3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain	
		Sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024	
	2. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah		
	Penyediaan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan semula Rp1.750.734.500,00 berkurang Rp109.695.700,00 menjadi Rp1.641.038.800,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan pada sub kegiatan:	Berkaitan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengalokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% sebagaimana ditegaskan dalam butir 5.2.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Bangli selanjutnya tetap akan berusaha untuk mengalokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi paling sedikit 0,16% secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan fiskal kita
	a. sub kegiatan pengelolaan sistem informasi kepegawaian semula Rp18.283.000,00 bertambah Rp3.500.000,00 menjadi Rp21.783.000,00; dan		
	b. sub kegiatan pengelolaan promosi ASN semula Rp37.960.000,00 bertambah Rp6.800.000 menjadi Rp44.760.000,00		
	Pemerintah Kabupaten Bangli belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.		
	Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang belum melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.		
	3. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda (Paskibraka)		
	Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Badan Kesatuan Bangsa semula Rp955.415.450,00 bertambah Rp3.500.000,00 menjadi Rp958.915.450,00 atau 0,08% dari total Belanja Daerah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	Untuk itu, dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan ukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka sebagaimana maksud butir 5.3.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Bangli akan selalu berusaha konsisten untuk menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka
	4. Alokasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran untuk FKUB sebesar Rp125.605.000,00 tidak mengalami perubahan atau 0,01% dari total belanja daerah, yang diuraikan dalam Sub Kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli harus mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam APBD	Pemerintah Kabupaten Bangli selalu akan mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah
	Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, diuraikan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bangli dengan alokasi anggaran yang ada untuk tetap mengoptimalkan dan menjaga kerukunan beragama di Kabupaten Bangli.		
	5. Alokasi Anggaran untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 antara lain tercantum pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial pada Subkegiatan pelaksanaan forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 dan butir 5.3.1.a.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.
	Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran untuk Forkompinda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semula Rp584.505.000,00 bertambah Rp313.700.000,00 menjadi Rp898.205.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah yang diuraikan dalam sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan		
	6. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)		
	Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran TP-PKK semula Rp32.875.500,00 berkurang Rp2.580.000,00 menjadi Rp30.295.500,00 atau 92,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan pada subkegiatan:	Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir 5.3.12.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bangli akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD
	a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sebesar Rp8.944.500,00; dan		
	b. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga semula Rp23.931.000,00 berkurang Rp2.580.000,00 menjadi Rp30.295.500,00		
	dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK kabupaten melalui:		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	a. upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;		
	b. dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga ann trafficking, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual		
	c. mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian		
	d. mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;		
	e. dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, Thermometer, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (Ibu Hamil), Melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;		
	f. pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:		
	1) penghayatan dan pengamalan Pancasila;		
	2) gotong royong;		
	3) pangan;		
	4) sandang;		
	5) perumahan		
	6) pendidikan dan keterampilan;		
	7) kesehatan;		
	8) pengembangan kehidupan berkoperasi;		
	9) kelestarian lingkungan hidup; dan		
	10) perencanaan sehat.		
	g. dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/ Kabupaten/Kota dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan		
	h. penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.		
IV.	Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel 6 sebagai berikut;	Berdasarkan Tabel 6 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli agar terus mempertahankan konsistensi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk itu Pemerintah Kabupaten Bangli agar mempedomani Bab IV butir A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bangli akan akan terus mempertahankan konsistensi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk itu Pemerintah Kabupaten Bangli agar mempedomani Bab IV butir A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
V.	Kebijakan Pendapatan Daerah		
	A. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta untuk penganggaran target Pajak dan Retribusi mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah dan potensi pajak dan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 antara lain:		
	1. Pendapatan Daerah		
	Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan target pendapatan daerah semula Rp1.204.328.853.411,00 bertambah Rp46.334.311.558,66 menjadi Rp1.250.663.164.969,66 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Target pendapatan daerah dirinci sebagaimana Tabel 7 sebagai berikut:		
	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
	Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah semula Rp307.453.242.000,00 berkurang Rp3.991.599.246,34 menjadi Rp303.461.642.753,66 atau 24,26% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Realisasi Pendapatan Asli Daerah dirinci sebagaimana Tabel 8 sebagai berikut:	Untuk itu, penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada data potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangli serta memperhatikan perkiraan asumsi makro	Pemerintah Kabupaten Bangli akan melakukan analisa serta melakukan perhitungan kembali atas target PAD, yang disesuaikan dengan perkiraan/proyek realisasi PAD Tahun Anggaran 2024, dengan mempertimbangkan minimal faktor pertumbuhan produk domestik regional bruto dan PAD TA sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.1c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
	Berdasarkan Tabel 10 tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp136.531.749.576,29 lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun 2024 sebesar Rp101.734.261.287,98 atau meningkat sebesar Rp34.797.488.288,31 Apabila diprediksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan Bulan Juni Tahun 2025, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 sebesar Rp273.063.499.152,58 lebih rendah dari rencana target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp303.461.642.753,66 sehingga akan berpotensi tidak mencapai target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp30.398.143.601,08.	Pemerintah Kabupaten Bangli agar tetap realistis dan cermat dalam perencanaan target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dengan tetap mengupayakan langkah-langkah dan inovasi optimalisasi pendapatan daerah, sehingga perencanaan target Pendapatan Asli Daerah terukur dan dapat dicapai secara rasional berdasarkan pada potensi pendapatan daerah dimaksud	
	Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:		
	1) Pajak Daerah	Dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perizinannya mempertimbangkan hal sebagai berikut:	
	a) Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan target Pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp93.596.300.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sesuai dengan Tabel 3, dapat dilihat bahwa realisasi Pajak Daerah sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp36.525.991.429,00 lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun 2024 sebesar Rp20.749.868.374,00 atau meningkat sebesar Rp15.776.123.055,00 Apabila diprediksi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 berdasarkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan Bulan Juni tahun 2025, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 sebesar Rp73.051.982.858,00 lebih rendah dari rencana target Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp93.596.300.000,00 sehingga akan berpotensi tidak mencapai dari target Pajak Daerah sebesar Rp20.544.317.142,00.	1. kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak; dan	Pemerintah Kabupaten Bangli Akan memberlakukan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak;
	Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan Pajak Daerah:	2. perangkat daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan peraturan daerah dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.1.1.1.i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan peraturan daerah dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, akan tetap menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	-1 Pajak Reklame semula Rp1.078.000.000,00 berkurang Rp40.000.000,00 menjadi Rp1.038.000.000,00 yang diuraikan dalam sub rincian objek meliputi:		
	(a) pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron semula Rp1.060.000.000,00 berkurang Rp930.000.000,00 menjadi Rp130.000.000,00;		
	(b) pajak reklame kain semula Rp15.000.000,00 bertambah Rp885.000.000,00 menjadi Rp900.000.000,00;		
	('c) pajak reklame melekat/stiker semula Rp500.000,00 bertambah Rp7.500.000,00 menjadi Rp8.000.000,00;		
	(d) pajak reklame selebaran semula Rp2.500.000,00 berkurang Rp0,00 menjadi Rp2.500.000,00;		
	(2) Pajak Air Tanah sebesar Rp660.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;		
	(3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp4.427.500.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025		
	(4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp12.500.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan dalam sub rincian objek BPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp12.500.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;		
	(5) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) semula Rp37.176.500.000,00 bertambah Rp40.000.000,00 menjadi Rp37.216.500.000,00 yang diuraikan dalam sub rincian objek meliputi:		
	(a) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp17.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;		
	(b) PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp15.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;		
	(c) PBJT-Jasa Perhotelan semula Rp5.000.000.000,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp5.200.000.000,00;		
	(d) PBJT-Jasa Parkir semula sebesar Rp11.500.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025; dan		
	(e) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan semula Rp165.000.000,00 berkurang Rp160.000.000,00 menjadi Rp5.000.000,00.		
	(6) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp19.695.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025; dan		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	(7) psen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp18.059.300.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025		
	2) Retribusi Daerah		
	Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan target pendapatan Retribusi Daerah semula Rp189.646.304.000,00 berkurang Rp5.210.618.288,66 menjadi Rp184.435.685.711,34 atau 14,75% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.	Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bangli serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:	Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penetapan besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengupayakan didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bangli serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Sesuai dengan Tabel 10 dapat dilihat bahwa realisasi Retribusi Daerah sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp80.183.912.004,28 lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun 2024 sebesar Rp34.575.194.797,00 atau meningkat Rp45.608.717.207,28. Apabila diprediksi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 berdasarkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan Bulan Juni Tahun 2025, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 sebesar Rp160.367.824.008,56 lebih rendah dari rencana target Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp184.435.685.711,34 sehingga akan berpotensi tidak mencapai dari target Retribusi Daerah sebesar Rp24.067.861.702,78		
	Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan Retribusi Daerah:	1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun	
	a) retribusi jasa umum semula Rp126.484.900.000,00 berkurang Rp3.210.618.288,66 menjadi Rp123.274.281.711,34 yang diuraikan dalam rincian objek meliputi;		
	(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan semula Rp117.115.400.000,00 berkurang Rp1.210.618.288,66 menjadi Rp115.904.781.711,34 yang diuraikan dalam rincian objek pendapatan meliputi;	2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud Pasal 97 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan	
	(a) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas semula Rp16.346.600.000,00 berkurang Rp72.618.288,66 menjadi Rp16.273.981.711,34;	3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.	
	(b) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah semula Rp100.690.000.000,00 berkurang Rp1.138.000.000,00 menjadi sebesar Rp99.552.000.000,00;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	(c) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebesar Rp78.800.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;	Berkaitan dengan hal tersebut, untuk penggunaan opsen PKB harus berpedoman pada ketentuan PKB paling sedikit 10% untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir 3.3.1.1.2.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli untuk penggunaan opsen PKB telah berpedoman pada ketentuan PKB dan menggarkan lebih dari 10% untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir 3.3.1.1.2.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
	(2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp292.600.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;		
	(3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp571.300.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;	Sedangkan, untuk hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir 3.3.1.1.2.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	untuk hasil penerimaan Pajak Rokok telah dialokasikan lebih 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir 3.3.1.1.2.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
	(4) Retribusi Pelayanan Pasar semula Rp8.505.600.000,00 berkurang Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp6.505.600.000,00; yang diuraikan dalam rincian objek meliputi:		
	(a) Retribusi Pelataran sebesar Rp2.190.600.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;	Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Bangli menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok, sebesar 75 dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pendanaan program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dan butir 3.3.1.1.2.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
	(b) Retribusi Los semula Rp4.415.000.000,00 berkurang Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp2.415.000.000,00; dan		
	(c) Retribusi Kios sebesar Rp1.900.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025.		
	b) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp59.486.404.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan dalam rincian objek meliputi:; dan		
	(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp67.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan dalam sub rincian objek Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp67.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;		
	(2) Retribusi Terminal sebesar Rp7.500.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan dalam sub rincian objek Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal semula Rp7.500.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;		
	(3) Retribusi Penyeberangan di Air sebesar Rp71.700.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan dalam sub rincian objek Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang semula Rp71.700.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;		
	(4) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp215.800.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan dalam sub rincian objek yaitu:		
	(a) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan sebesar Rp210.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;		
	(b) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan sebesar Rp5.800.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025.		
	(5) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebesar Rp58.800.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	(6) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebesar Rp10.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;		
	(7) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp314.404.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;		
	c) Retribusi Perizinan Tertentu semula Rp3.675.000.000,00 berkurang Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp1.675.000.000,00 yang diuraikan dalam rincian objek yaitu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung semula Rp3.675.000.000,00 berkurang Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp1.675.000.000,00.		
	Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan Pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bangli serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:		
	a) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;		
	b) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan		
	c) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.		
	Penetapan target pendapatan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Penyeberangan di air dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana angka angka 2) huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d) agar disesuaikan dengan nomenklatur kode rekening Retribusi Daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
	3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula Rp6.682.100.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 atau 0,53% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025	Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli agar melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Bangli yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Sesuai dengan Tabel 10, dapat dilihat bahwa realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.239.937.778,62 lebih rendah bila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun 2024 sebesar Rp5.091.792.407,80 atau menurun sebesar Rp851.854.629,18.	Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:	Pemerintah Kabupaten Bangli akan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya
	Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menetapkan target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan potensi penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, dan juga berdasarkan atas realisasi penyetoran bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Pemilik Modal (KPM)		
	Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:		
	a) bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) semula Rp6.310.100.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;	a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;	
	b) bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) semula Rp6.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025; dan	b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;	
	c) bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) semula Rp366.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025.	c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;	
	Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) semula Rp5.736.400.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;	d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan	
		e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah,	
		dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, dan butir 3.3.1.2.b. Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024	
		Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangli harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris/pengawas dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi pemerintah Kabupaten Bangli sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.
	4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula Rp17.528.538.000,00 bertambah Rp1.219.019.042,32 menjadi Rp18.747.557.042,32 atau 1,50% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025	Penetapan target pendapatan dari hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana angka 1) agar disesuaikan dengan nomenklatur kode rekening Retribusi Daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Penetapan target pendapatan dari hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan telahdisesuaikan dengan nomenklatur kode rekening Retribusi Daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	Sesuai dengan Tabel 10, dapat dilihat bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.444.506.928,00 lebih rendah bila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun 2024 Rp41.317.405.709,18 atau menurun Rp22.872.898.781,18. Apabila diprediksi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 berdasarkan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan Bulan Juni Tahun 2025, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Lain-lain	Penetapan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli dalam Penetapan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah akan mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
	Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Bangli Tahun 2025 sebesar Rp36.889.013.856,00 lebih tinggi dari rencana target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.747.557.042,32 sehingga akan berpotensi mencapai dari target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp18.416.259.686,46.	Pemerintah Kabupaten Bangli agar tetap realistis dan cermat dalam perencanaan target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan tetap mengupayakan langkah-langkah dan inovasi optimalisasi Pendapatan Daerah, sehingga perencanaan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terukur dan dapat dicapai secara rasional berdasarkan pada potensi Pendapatan Daerah dimaksud.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan tetap realistis dan cermat dalam perencanaan target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan tetap mengupayakan langkah-langkah dan inovasi optimalisasi Pendapatan Daerah.
	Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
	Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:		
	a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan semula Rp397.000.000,00 berkurang Rp147.000.000,00 menjadi Rp250.000.000,00, yang diuraikan dalam rincian objek meliputi:		
	(1) hasil penjualan peralatan dan mesin semula Rp50.000.000,00 bertambah Rp150.000.000,00 menjadi sebesar Rp200.000.000,00, yang diuraikan dalam subrincian objek Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp50.000.000,00 bertambah Rp150.000.000,00 menjadi sebesar Rp200.000.000,00; dan		
	(2) hasil penjualan gedung dan bangunan semula Rp347.000.000,00 berkurang sebesar Rp297.000.000,00 menjadi sebesar Rp50.000.000,00, yang diuraikan dalam subrincian objek Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp347.000.000,00 berkurang Rp297.000.000,00 menjadi Rp50.000.000,00;		
	b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan semula Rp1.384.862.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan dalam rincian objek Hasil Sewa BMD sebesar Rp1.384.862.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;		
	c) jasa giro semula Rp3.706.000.000,00 berkurang Rp3.056.000.000,00 menjadi Rp650.000.000,00, yang diuraikan dalam rincian objek meliputi:		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	(1) Jasa Giro pada Kas Daerah semula Rp3.167.000.000,00 berkurang Rp2.617.000.000,00 menjadi Rp550.000.000,00; dan		
	(2) Jasa Giro pada Kas di Bendahara semula Rp539.000.000,00 berkurang Rp439.000.000,00 menjadi Rp100.000.000,00.		
	d) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir semula Rp0,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp200.000.000,00		
	e) Pendapatan Bunga semula Rp3.053.062.000,00 berkurang Rp3.043.062.000,00 menjadi Rp10.000.000,00 yang diuraikan dalam rincian objek Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Rp3.053.062.000,00 berkurang Rp3.043.062.000,00 menjadi Rp10.000.000,00		
	f) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan semula Rp290.000.000,00 berkurang Rp270.000.000,00 menjadi Rp20.000.000,00;		
	g) Pendapatan Denda Pajak Daerah semula Rp226.000.000,00 bertambah Rp479.509.582,66 menjadi Rp705.509.582,66, yang diuraikan dalam rincian objek meliputi :		
	(1) Pendapatan Denda Pajak Hotel semula Rp20.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025;		
	(2) Pendapatan Denda Pajak Restoran semula Rp105.000.000,00 berkurang Rp50.000.000,00 menjadi Rp55.000.000,00;		
	(3) Pendapatan Denda Pajak Parkir semula Rp1.000.000,00 berkurang Rp1.000.000,00 menjadi Rp0,00;		
	(4) Pendapatan Denda Pajak Air Tanah semula Rp100.000.000,00 berkurang Rp95.000.000,00 menjadi Rp5.000.000,00;		
	(5) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) semula Rp0,00 bertambah Rp325.509.582,66 menjadi Rp325.509.582,66; dan		
	(6) Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semula Rp0,00 bertambah Rp300.000.000,00 menjadi Rp300.000.000,00		
	h) Pendapatan Denda Retribusi Daerah semula Rp50.000.000,00 berkurang Rp50.000.000,00 menjadi Rp0,00 yang diuraikan dalam rincian objek yaitu Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum semula Rp50.000.000,00 berkurang Rp50.000.000,00 menjadi Rp0,00 yang diuraikan dalam sub rincian objek Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor Rp50.000.000,00 berkurang sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp0,00		
	i) Pendapatan dari Pengembalian semula Rp8.421.614.000,00 bertambah Rp5.894.953.171,00 menjadi Rp14.316.567.171,00 yang diuraikan dalam rincian objek meliputi:		
	(1) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas semula Rp0,00 bertambah Rp400.000.000,00 menjadi Rp400.000.000,00 yang diuraikan dalam sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp0,00 bertambah Rp400.000.000,00 menjadi Rp400.000.000,00;		
	(2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp8.421.614.000,00 berkurang Rp8.321.614.000,00 menjadi Rp100.000.000,00 yang diuraikan dalam sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS Rp8.421.614.000,00 berkurang Rp8.321.614.000,00 menjadi Rp100.000.000,00;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	(3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang semula Rp0,00 bertambah Rp600.000.000,00 menjadi Rp600.000.000,00 yang diuraikan dalam sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp600.000.000,00 menjadi sebesar Rp600.000.000,00;		
	(4) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa semula Rp0,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp200.000.000,00 yang diuraikan dalam sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Rp0,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp200.000.000,00;		
	(5) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp0,00 bertambah Rp11.881.567.171,00 menjadi Rp11.881.567.171,00 yang diuraikan dalam sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp0,00 bertambah Rp11.881.567.171,00 menjadi Rp11.881.567.171,00;		
	(6) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung semula Rp0,00 bertambah Rp700.000.000,00 menjadi Rp700.000.000,00, yang diuraikan dalam sub rincian objek meliputi:		
	i. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp0,00 bertambah Rp500.000.000,00 menjadi Rp500.000.000,00; dan		
	ii. Pendapatan dari Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan Rp0,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp200.000.000,00.		
	(7) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan semula Rp0,00 bertambah Rp435.000.000,00 menjadi Rp435.000.000,00, yang diuraikan dalam subrincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-jalan Kabupaten Rp0,00 bertambah Rp435.000.000,00 menjadi Rp435.000.000,00;		
	j) Pendapatan BLUD semula Rp0,00 bertambah Rp1.210.618.288,66 menjadi Rp1.210.618.288,66 yang diuraikan dalam rincian objek meliputi:		
	(1) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain semula Rp0,00 bertambah Rp918.000.000,00 menjadi Rp918.000.000,00; dan		
	(2) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah semula Rp0,00 bertambah Rp292.618.288,66 menjadi Rp292.618.288,66, yang diuraikan dalam sub rincian objek meliputi:		
	i. Pendapatan BLUD dari Jasa Giro Rp0,00 bertambah Rp112.618.288,66 menjadi Rp112.618.288,66; dan		
	ii. Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha Rp0,00 bertambah Rp180.000.000,00 menjadi Rp180.000.000,00		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	2 Pendapatan Transfer		
	Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula Rp891.195.807.411,00 bertambah Rp56.005.714.805,00 menjadi Rp947.201.522.216,00 atau 75,74% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025		
	Selanjutnya target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:		
	1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp842.730.907.000,00 berkurang Rp27.099.613.000,00 menjadi Rp815.631.294.000,00 atau 65,22% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain:		
	a) dana desa semula Rp62.508.182.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;		
	b) insentif fiskal semula Rp30.352.227.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;		
	c) Dana Bagi Hasil (DBH) semula Rp19.173.163.000,00 berkurang Rp2.326.000,00 menjadi Rp19.170.837.000,00, tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 78 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;		
	d) dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) semula Rp591.978.327.000,00 berkurang Rp23.107.707.000,00 menjadi Rp568.870.620.000,00, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp568.870.620.000,00;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	e) dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari :		
	(1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik semula Rp19.108.267.000,00 berkurang Rp4.496.880.000,00 menjadi Rp14.611.387.000,00, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.611.387.000,00; dan		
	(2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula Rp119.610.741.000,00 bertambah Rp507.300.000,00 menjadi Rp120.118.041.000,00, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp120.118.041.000,00.		
	2) Pendapatan Transfer antar Daerah semula Rp48.464.900.411,00 bertambah Rp83.105.327.805,00 menjadi Rp131.570.228.216,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut:	Selanjutnya, untuk penggunaan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi harus mempedomani ketentuan sebagai berikut:	
	a) Pendapatan Bagi Hasil		
	Target Pendapatan Bagi Hasil dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp40.339.297.589,00 bertambah Rp23.105.327.805,00 menjadi Rp63.444.625.394,00, yang diuraikan pada:	(1) pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% dari hak Kabupaten/Kota, harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 dan butir 3.3.1.1.2.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;	Pemerintah kabupaten bangli akan selalu konsisten menggunakan pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor lebih dari 10% dari hak Kabupaten/Kota, harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum
	(1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor semula Rp0,00 bertambah Rp9.383.997.008,00 menjadi Rp9.383.997.008,00;		
	(2) pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor semula Rp0,00 bertambah Rp8.189.235.652,00 menjadi Rp8.189.235.652,00;		
	(3) pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor semula Rp21.976.779.366,00 bertambah Rp5.503.702.509,00 menjadi Rp27.480.481.875,00;	(2) penerimaan pajak rokok dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan	Pemerintah Kabupaten Banagi akan berusaha selalu konsisten dalam menggunakan pajak rokok lebih dari 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum
	(4) pendapatan bagi hasil pajak air permukaan semula Rp40.496.981,00 bertambah Rp28.392.636,00 menjadi Rp68.889.617,00; dan		
	(5) pendapatan bagi hasil pajak rokok semula Rp18.322.021.242,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah agar disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.900/5338/PADFE/BPKAD tanggal 12 Agustus 2025 hal Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk Kabupaten Bangli dialokasikan sebesar Rp48.771.998.371,00 sebagai berikut:	(3) dalam rangka mendukung Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Bangli menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
	(1) pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar Rp348.931.052,00;		
	(2) pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp440.930.114,00;		
	(3) pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp29.519.316.280,00;		
	(4) pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp140.799.683,00; dan		
	(5) pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp18.322.021.242,00.		
	Pemerintah Kabupaten Bangli juga agar mengalokasikan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah atas Kewajiban Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.900/5341/PADFE/BPKAD tanggal 12 Agustuas 2025 hal Kewajiban Definitf Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2024, untuk Kabupaten Bangli dialokasikan sebesar Rp23.105.327.805,00 sebagai berikut:		
	(1) pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar Rp9.383.997.008,00;		
	(2) pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp8.189.235.652,00;		
	(3) pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp5.503.702.509,00; dan		
	(4) pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp28.392.636,00.		
	3) Bantuan Keuangan semula Rp8.125.602.822,00 bertambah Rp60.000.000.000,00 menjadi Rp68.125.602.822,00 yang diuraikan pada:	Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.900/5534/PADFE/BPKAD tanggal 20 Agustus 2025 hal Pagu Sementara Perubahan Belanja Bantuan Khusus (BKK) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk Kabupaten Bangli dialokasikan sebesar Rp 50.000.000.000,00.	
	a) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi semula Rp8.125.602.822,00 bertambah Rp50.000.000.000,00 menjadi Rp58.125.602.822,00; dan		Perintah Kabupaten Bangli akan melakukan penyesuaian penganggaran TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2O2l tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasilikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.n. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2024.
	b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota semula Rp0,00 bertambah Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp10.000.000.000,00;		
		Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud, dengan mempedomani butir 3.3.2.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
	4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula Rp5.679.804.000,00 berkurang Rp5.679.804.000,00 menjadi Rp0,00 atau 0,00% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025		
VI.	Kebijakan Belanja Daerah		
	A. Kebijakan Belanja Daerah		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menganggarkan belanja daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.2.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, antara lain dalam rangka pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli Masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian, penurunan *stunting*, dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem;		
	2. dalam rangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintah yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;		
	3. berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja Mandatory Spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	4. Pemerintah Kabupaten Bangli menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir 3.2.2.o. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;		
	5. dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Bangli memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;		
	6. belanja Daerah diuraikan menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; dan		
	7. belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sebagaimana maksud butir 3.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	B. Alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk masing-masing urusan dirinci sebagai berikut:		
	kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:		
	1. untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.		
	2. disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	C. Penyediaan alokasi Belanja Daerah Kabupaten Bangli semula Rp1.218.328.853.411,00 bertambah Rp33.570.667.269,47 atau 2,76% menjadi Rp1.251.899.520.680,47 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut:		
	1. Belanja Operasi		
	Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp968.210.393.306,00 bertambah Rp2.513.568.692,89 atau 0,26% menjadi Rp970.723.961.998,89 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.		
	Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:		
	Belanja Pegawai penyediaan anggaran Belanja Pegawai semula Rp611.170.824.963,83 berkurang Rp12.851.355.996,21 atau 2,10% menjadi Rp598.319.468.967,62 yang antara lain tercantum pada:		
	a. Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp347.111.723.150,00 berkurang Rp16.123.624.440,00 atau 4,65% menjadi Rp330.988.098.710,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sebagaimana maksud butir 3.4.1.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang tercantum pada:		
	1) belanja iuran jaminan kesehatan ASN dan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH sebagai berikut:		
	a) belanja iuran jaminan kesehatan ASN semula Rp17.502.288.038,00 berkurang Rp445.301.850,62 atau 2,54% menjadi Rp17.056.986.187,38. Pemerintah Kabupaten Bangli belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp22.110.763.327,44 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp5.053.777.140,06.	Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli agar menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
	b) belanja luran jaminan kesehatan bagi DPRD semula sebesar Rp66.000.000,00 tidak mengalami perubahan yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. .	Besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seharusnya Rp79.368.240,00 atau terdapat selisih kurang Rp13.368.240,00. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan	elanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli telah menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan
	c) belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH semula Rp42.000.000,00 tidak mengalami perubahan, yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Besaran alokasi anggaran iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir 3.4.1.2.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
		Dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah dan PPPK, Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana butir 3.4.1.1.1.f. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah dan PPPK selalu berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
	d) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diperuntukkan bagi ASN, KDH/WKDH, serta Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan pada:	Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	1) penyediaan alokasi anggaran belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan pada:	70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	BPJS Kesehatan.
	(1) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN semula Rp581.507.391,00 berkurang Rp11.137.007,30 atau 1,92% menjadi Rp570.370.383,70; dan		
	(2) belanja iuran jaminan kematian ASN semula Rp1.649.213.594,00 bertambah Rp11.226.644,30 atau 0,68% menjadi Rp1.660.440.238,30.		
	belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN seharusnya:		
	(a) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN yaitu 0,24% dari gaji pokok sebesar Rp587.147.728,13 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp16.777.344,43; dan		
	(b) belanja iuran jaminan kematian ASN, yaitu 0,72% dari gaji pokok sebesar Rp1.761.443.184,39 atau terdapat selisih kurang Rp101.002.946,09.		
	Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	e) penyediaan alokasi anggaran belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH, Pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan pada:		
	(1) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp1.200.000,00 tidak mengalami perubahan;		
	(2) belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp3.600.000,00 tidak mengalami perubahan;		
	(3) belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD sebesar Rp6.000.000,00 tidak mengalami perubahan; dan		
	(4) belanja jaminan kematian DPRD sebesar Rp36.000.000,00 tidak mengalami perubahan.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 5.3.6.a.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	f) hak keuangan dan administratif dewan perwakilan rakyat daerah, antara lain:		
	(1) belanja gaji dan tunjangan DPRD semula Rp22.272.534.000,00 bertambah Rp1.094.356.000,00 atau 4,91% menjadi Rp23.366.890.000,00, yaitu:		
	(a) belanja uang representasi DPRD semula Rp671.790.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran untuk Belanja Uang Representasi DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	g) belanja tunjangan jabatan DPRD semula Rp974.095.500,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 sebesar l45% dari uang representasi.	Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bangli harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar l45% dari uang representasi sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan selalu mempedomani Pasal 7 Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	h) belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD semula Rp122.134.950,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pemerintah Kabupaten Bangli berusaha selalu konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar l45% dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	i) belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD semula Rp3.780.000.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Bangli telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli harus mempertahankan secara terus menerus dalam konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.		
	j) belanja tunjangan reses DPRD semula Rp945.000.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Bangli telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.	Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli mempertahankan secara terus menerus dalam konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut dan Tunjangan Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut dan Tunjangan Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.
	k) penyediaan alokasi anggaran yang tercantum dalam rincian objek belanja:		
	(1) belanja tunjangan perumahan DPRD semula Rp10.220.700.000,00 bertambah Rp373.836.000,00 atau 3,66% menjadi Rp10.594.536.000,00;		
	(2) belanja tunjangan transportasi DPRD semula Rp4.836.468.000,00 bertambah Rp720.520.000,00 atau 14,90% menjadi Rp5.556.988.000,00; dan		
	(3) belanja uang jasa pengabdian DPRD semula Rp10.000.000,00 tidak mengalami perubahan.		
	dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	l) penyediaan anggaran belanja dana operasional Pimpinan DPRD semula Rp204.480.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.		
	Pemerintah Kabupaten Bangli telah memenuhi amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.		
	Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.		
	m) belanja penerimaan lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp600.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2025 dapat dianggarkan dengan penentuan besarannya disesuaikan dengan mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari jumlah PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp455.192.464,13.	Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan penyediaan anggaran untuk Dana Operasional KDH/WKDH mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf f dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak daerah namun belum mengalokasikan belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan Retribusi Daerah.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bangli akan selalu berusaha konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Dana Operasional KDH/WKDH mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf f dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.
	n) tambahan penghasilan ASN		
	tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula Rp193.718.269.943,00 bertambah Rp1.868.713.525,00 atau 0,96% menjadi Rp195.586.983.468,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:		
	(1) tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN semula Rp103.596.932.343,00 berkurang Rp1.162.733.426,00 atau 1,12% menjadi Rp102.434.198.917,00;		
	(2) tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN semula Rp28.042.934.800,00 bertambah Rp1.210.359.451,00 atau 4,32% dari APBD menjadi Rp29.253.294.251,00;		
	(3) tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN semula Rp62.078.402.800,00 bertambah Rp1.821.087.500,00 atau 2,93% menjadi Rp63.899.490.300,00.Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Bupati Kabupaten Bangli dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bangli juga memperhatikan kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.1.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli dapat menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Bupati Kabupaten Bangli dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	(4) belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula Rp46.111.126.830,00 berkurang Rp2.330.230.730,00 atau 5,05% menjadi Rp43.780.896.100,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	(5) belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD semula Rp96.838.000,00 bertambah Rp95.166.000,00 atau 98,27% menjadi Rp192.004.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;		
	(6) belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK semula Rp14.703.661.170,00 bertambah Rp3.893.502.030,00 atau 26,48% menjadi Rp18.597.163.200,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;		
	(7) belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK semula Rp193.675.000,00 bertambah Rp190.334.000,00 atau 98,27% menjadi Rp384.009.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025; dan		
	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.2.1.3.2.i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	(8) belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN semula Rp783.842.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;		
	o) belanja pegawai BLUD Penyediaan anggaran Belanja Pegawai BLUD semula Rp44.523.511.870,83 bertambah Rp248.848.918,79 atau 0,56% menjadi Rp44.772.360.789,62 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir 5.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	2. Belanja Barang dan Jasa		
	Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang/Jasa semula Rp333.260.908.976,17 bertambah Rp12.447.018.005,10 atau 3,73% menjadi Rp345.707.926.981,27 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.	Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain sebagaimana butir 1).a).(22) dan butir 1).a).(23) di atas dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, dan usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima sebagaimana dimaksud butir 3.4.1.2.1.b dan butir 3.4.1.2.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, dan usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima
	Harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:		
	a. belanja barang semula Rp72.656.476.044,00 berkurang Rp6.752.233.583,00 atau 9,29% menjadi sebesar Rp65.904.242.461,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek:		
	1) belanja barang pakai habis semula Rp72.545.146.044,00 berkurang Rp6.756.777.183,00 atau 9,31% menjadi Rp65.788.368.861,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:		
	a) belanja suku cadang-suku cadang alat laboratorium semula Rp31.440.716,00 berkurang Rp30.107.681,00 atau 95,76% menjadi Rp1.333.035,00;		
	b) belanja natura dan pakan-natura dan pakan lainnya semula Rp10.812.000,00 bertambah Rp12.720.000,00 atau 117,65% menjadi Rp23.532.000,00;		
	c) belanja makanan dan minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan semula Rp2.500.000.000,00 berkurang Rp2.500.000.000,00 atau 100,00% menjadi Rp0,00; dan		
	d) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya semula tidak diargarkan bertambah Rp24.838.000,00.		
	2) belanja barang tak pakai habis semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp4.543.600,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:		
	a) belanja komponen-komponen rambu-rambu semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp470.800,00; dan		
	b) belanja pipa-pipa plastik PVC (UPVC) semula tidak dianggarakan bertambah sebesar Rp4.072.800,00.		
	3) belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp111.330.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp111.330.000,00.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	b. belanja jasa semula Rp139.678.567.680,00 bertambah Rp21.302.838.145,00 atau 15,25% menjadi Rp160.981.405.825,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:	Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peran dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penganggaran jasa juga sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya, serta untuk penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi Pemerintah kota, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli dalam mengalokasikan anggaran belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peran dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penganggaran jasa juga sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya, serta untuk penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi Pemerintah kota, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
	1) belanja jasa kantor semula Rp93.215.270.900,00 bertambah Rp12.074.186.200,00 atau 12,95% menjadi Rp105.289.457.100,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:		
	(1) honorarium penyuluhan atau pendampingan semula Rp1.012.506.000,00 bertambah Rp507.300.000,00 atau 50,10% menjadi Rp1.519.806.000,00;		
	(2) belanja jasa tata rias semula Rp23.400.000,00 bertambah Rp9.600.000,00 atau 41,03% menjadi Rp33.000.000,00; dan		
	(3) belanja honorarium pengadaan barang/jasa semula Rp8.160.000,00 bertambah Rp16.320.000,00 atau 200,00% menjadi Rp24.480.000,00.		
	Harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	2) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja iuran jaminan/asuransi semula Rp34.954.821.980,00 bertambah Rp10.795.553.245,00 atau 30,88% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 Rp45.750.375.225,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:	Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) minimal 98% dari total penduduk pada Tahun 2025 sebagaimana telah diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024, maka Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI, wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional, dan penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bangli tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) minimal 98% dari total penduduk pada Tahun 2025 sebagaimana telah diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024, maka Pemerintah Kabupaten Bangli telah menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI, wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional, dan penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan
	(1) belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 semula Rp33.470.297.180,00 bertambah Rp10.791.353.245,00 atau 32,24% menjadi sebesar Rp44.261.650.425,00;		
	(2) belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN semula tidak dianggarakan bertambah Rp2.500.000,00; dan		
	(3) belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja rentan semula tidak dianggarkan bertambah Rp1.700.000,00.		
	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dengan memperhatikan ketentuan untuk penganggaran iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli, mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menganggarkan iuran jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menerima gaji/upah dan dianggarkan dalam APBD dan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembayaran iuran 1% kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.		
	Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bangli agar berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran, menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran, menganggarkan atas pembayaran Bantuan Iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran, menganggarkan kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penyediaan anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.11 dan butir 3.4.1.2.2.b.12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	
	3) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja sewa tanah semula Rp203.000.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	4) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja sewa peralatan dan mesin semula Rp2.035.724.000,00 berkurang Rp121.015.000,00 atau 5,94% menjadi Rp1.914.709.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:		
	(1) belanja sewa kendaraan bermotor penumpang semula Rp375.000.000,00 bertambah Rp125.000.000,00 atau 33,33% menjadi Rp500.000.000,00;		
	(2) belanja sewa alat rumah tangga lainnya (Home Use) semula Rp350.000.000,00 bertambah Rp60.000.000,00 atau 17,14% menjadi Rp410.000.000,00; dan		
	(3) belanja sewa peralatan jaringan semula Rp582.900.000,00 berkurang Rp263.850.000,00 atau 45,27% menjadi Rp319.050.000,00.		
	5) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula Rp1.140.600.000,00 berkurang Rp14.000.000,00 atau 1,23% menjadi Rp1.126.600.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturah Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi,
	(1) belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan semula Rp898.600.000,00 berkurang Rp14.000.000,00 atau 1,56% menjadi Rp884.600.000,00 semula sebesar Rp27.500.000,00;		
	(2) belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya semula Rp120.000.000,00 tidak mengalami perubahan; dan		
	(3) belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya semula Rp72.000.000,00 tidak mengalami perubahan.		
	6) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:		
	(1) belanja jasa konsultansi konstruksi semula tidak dianggarkan bertambah Rp300.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;		
	(2) belanja jasa konsultansi non konstruksi semula Rp1.703.000.000,00 berkurang Rp443.000.000,00 atau 26,01% menjadi Rp1.260.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	belanja beasiswa pendidikan ASN semula tidak dianggarakn bertambah Rp150.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.	Penyediaan anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.11 dan butir 3.4.1.2.2.b.12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bangli telah menyediakan anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.		
	Selain itu, uraian tersebut juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.		
	(3) belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan semula Rp6.217.826.000,00 berkurang Rp1.438.886.300,00 atau 23,14% menjadi Rp4.778.939.700,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025; dan		
	(4) belanja sewa aset tidak berwujud semula Rp208.324.800,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.		
	(5) Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Bangli.	Dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan, penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten bangli akan selalu untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan, penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid,
	Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten. Sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.2.f.2) dan butir 3.4.1.2.2.f.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	c. belanja pemeliharaan semula Rp3.248.068.000,00 bertambah Rp931.442.386,00 atau 28,68% menjadi Rp4.179.510.386,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:	Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, butir 3.4.1.2.3.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah kabupaten bangli dalam Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang selalu akan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang
	1. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp2.703.068.000,00 bertambah Rp21.952.600,00 atau 0,81% menjadi Rp2.725.020.600,00;		
	2. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan semula Rp402.500.000,00 bertambah Rp919.489.786,00 atau 228,44% menjadi Rp.1.321.989.786,00;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	3. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi semula Rp132.500.000,00 tidak mengalami perubahan; dan		
	4. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud semula Rp10.000.000,00 berkurang Rp10.000.000,00 atau 100,00% menjadi Rp0,00.		
	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. belanja perjalanan dinas semula Rp27.860.470.000,00 berkurang Rp5.934.910.000,00 atau 21,30% menjadi Rp21.925.560.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rincian objek belanja:	Mengingat Pemerintah Kabupaten Bangli belum memenuhi beberapa belanja yang bersifat mandatory yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi anggaran untuk pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangli sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan pada inspektorat dan diatas Rp15.000.000.000,00, alokasi, Jaminan Kesehatan DPRD dan Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dan iuran Jaminan Kematian ASN, maka alokasi anggaran belanja perjalanan dinas tersebut agar dirasionalisasi dan dialihkan untuk pemenuhan belanja mandatori pengawasan dan pemenuhan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja serta mengoptimalkan dan/atau meningkatkan anggaran dalam rangka pemenuhan belanja wajib pelayanan dasar SPM, belanja untuk mendukung urusan Pemerintah daerah antara lain urusan bidang lingkungan hidup pada program pengelolaan sampah, optimalisasi bidang perhubungan untuk mengatasi kemacetan serta mendukung kegiatan pada event-event internasional, dan dukungan anggaran untuk mendukung prioritas nasional, yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	hasil rasionalisasi dari belanja perjalanan dinas telah dialihkan untuk pemenuhan belanja mandatori pengawasan dan pemenuhan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja serta mengoptimalkan dan/atau meningkatkan anggaran dalam rangka pemenuhan belanja wajib pelayanan dasar SPM, belanja untuk mendukung urusan Pemerintah daerah antara lain urusan bidang lingkungan hidup pada program pengelolaan sampah, optimalisasi bidang perhubungan untuk mengatasi kemacetan serta mendukung kegiatan pada event-event internasional, dan dukungan anggaran untuk mendukung prioritas nasional, yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, walau belum sepenuhnya bisa memenuhi anggaran yang bersifat mandatory
	1. perjalanan dinas dalam negeri semula Rp27.860.470.000,00 berkurang Rp5.934.910.000,00 atau 21,30% menjadi Rp21.925.560.000,00;		
	2. belanja perjalanan dinas luar negeri semula Rp23.045.110.000,00 berkurang Rp3.801.960.000,00 atau 16,50% menjadi Rp19.243.150.000,00.		
	Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir 3.4.1.2.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	Penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk kegiatan yang bersifat urgen dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Bangli, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan butir 3.4.1.2.4.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:		
	1) Sekretariat Daerah semula Rp12.679.930.000,00 berkurang Rp5.679.930.000,00 atau 44,79% menjadi Rp7.000.000.000,00; dan		
	2) Sekretariat DPRD semula Rp12.500.000.000,00 berkurang Rp1.500.000.000,00 atau 12,00% menjadi Rp11.000.000.000,00.		
	e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat semula Rp277.100.000,00 bertambah Rp290.106.250,00 atau 104,69% menjadi Rp567.206.250,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan dalam rincian objek belanja:	Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan	penyediaan anggaran untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat semula Rp271.700.000,00 bertambah Rp190.106.250,00 atau 69,97% menjadi Rp461.806.250,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:	perundang-undangan, bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian, uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota, uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau uang yang diberikan kepada pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.5.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
	a) belanja hadiah yang bersifat perlombaan semula Rp147.700.000,00 bertambah Rp290.106.250,00 atau 196,42% menjadi Rp437.806.250,00;		
	b) belanja penghargaan atas suatu prestasi semula Rp24.000.000,00 tidak mengalami perubahan; dan		
	c) Belanja Beasiswa semula Rp100.000.000,00 berkurang Rp100.000.000,00 atau 100,00% menjadi Rp0,00.		
	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.		
	2. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat semula Rp5.400.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 atau 1851,85% menjadi Rp105.400.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:		
	a) belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain semula tidak dianggarkan bertambah Rp100.000.000,00; dan		
	b) belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat semula sebesar Rp5.400.000,00 tidak mengalami perubahan.		
	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturah Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.2.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. belanja barang dan jasa BOSP semula Rp34.640.775.255,00 berkurang Rp442.170.590,00 atau 1,28% menjadi Rp34.198.604.665,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;		
	g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas semula sebesar Rp5.808.050.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025		
	h. belanja barang dan jasa BLUD semula Rp49.091.401.997,17 bertambah Rp3.051.945.397,10 atau 6,22% menjadi Rp52.143.347.394,27 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.		
	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir 5.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	3. Belanja Bunga		
	Belanja Bunga semula Rp4.331.637.634,00 bertambah Rp891.982.616,00 atau 20,59% menjadi Rp3.439.655.018,00 dengan uraian Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat semula Rp4.331.637.634,00 berkurang Rp891.982.616,00 atau 20,59% menjadi Rp3.439.655.018,00		
	4. Belanja Hibah		
	Belanja Hibah semula Rp19.007.521.732,00 bertambah Rp3.809.889.300,00 atau 20,04% menjadi Rp22.817.411.032,00 dengan uraian sebagai berikut:		
	a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula Rp330.000.000,00 bertambah Rp1.154.409.000,00 atau 349,82% menjadi Rp1.484.409.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;	Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir 5.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi,
	b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp17.496.686.800,00 bertambah Rp662.050.300,00 atau 3,78% menjadi Rp18.158.737.100,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;		
	c. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia semula Rp0,00 bertambah menjadi Rp30.000.000,00 atau 100.00% menjadi Rp30.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025; dan		
	d. belanja hibah dana BOSP semula R376.940.000,00 bertambah Rp1.993.430.000,00 atau 528,85% menjadi Rp2.370.370.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.		
	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	5. Belanja Bantuan Sosial		
	Belanja Bantuan Sosial semula Rp439.500.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 11, sebagai berikut:	Dalam hal Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diprediksi tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Bangli agar berhati-hati dalam merealisasikan belanja hibah disesuaikan dengan pencapaian pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi, dimana Pemerintah Kabupaten Bangli akan selalu berhati-hati dalam merealisasikan belanja hibah disesuaikan dengan pencapaian pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 295 ayat (2) dan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, serta butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Bangli sudah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik semula sebesar Rp803.894.932,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Bangli mencantumkan dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 berdasarkan persetujuan gubernur untuk tingkat kabupaten/kota. sebagaimana maksud butir 3.4.1.5.e.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Bangli telah mencantumkan dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 berdasarkan persetujuan gubernur untuk tingkat kabupaten/kota
	Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar Lembaga pemerintah dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menganggarkan belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat mencantumkan dengan jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.	Pemerintah Kabupaten Bangli belum memenuhi alokasi anggaran untuk belanja mandatori yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti belum mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa yang dianggarkan secara bertahap sesuai dengan dengan ketentuan perundang-undangan, belum memenuhi alokasi anggaran belanja pegawai paling tinggi 30% dari total belanja daerah, belum mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan sekurang-kurangnya 0,765% dari total belanja diluar gaji dan tunjangan pada Inspektorat Daerah, serta belanja iuran jaminan kesehatan ASN, DPR dan KDH/WKDH. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengurangi alokasi anggaran hibah tersebut, dikecualikan untuk hibah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan mengalihkan ke pemenuhan belanja-belanja mandatori, mengoptimalkan dan/atau meningkatkan belanja untuk mendukung urusan Pemerintah Daerah antara lain meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, urusan bidang lingkungan hidup pada program pengelolaan sampah, optimalisasi bidang perhubungan untuk mengatasi kemacetan, mengalokasikan anggaran untuk mendukung event-	Pemerintah Kabupaten Bangli walau belum bisa mengurangi alokasi anggaran hibah tersebut namun dengan adanya sumber pendapatan baru dari BKK Kabupaten Badung dan BKK dari kabupaten Gianyar maka anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik telah bisa dinakan hingga mencapai 31,67% semoga secara bertahap bisa kita tingkatkan

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		event internasional serta belanja wajib dalam penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan peningkatan investasi, yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	
	6. Belanja Modal		
	Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp80.276.399.043,00 bertambah Rp45.907.095.576,58 atau 57,19% menjadi Rp126.183.494.619,58 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:		
	a. belanja modal tanah semula Rp0,00 bertambah Rp45.000.000,00 atau 100,00% menjadi Rp45.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan dalam objek belanja modal tanah;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. belanja modal peralatan dan mesin semula Rp25.196.682.243,00 bertambah Rp1.794.231.609,58 atau 7,12% menjadi Rp26.990.913.852,58 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja:	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.	Pemerintah Kabupaten bangli tetap akan memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.
	1) belanja modal alat besar semula Rp1.943.000.000,00 berkurang Rp100.000.000,00 atau 5,15% menjadi Rp1.843.000.000,00.		
	2) belanja modal alat angkutan semula Rp2.819.500.000,00 bertambah Rp1.900.000.000,00 atau 67,39% menjadi Rp4.719.500.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Modal alat angkutan darat bermotor;		
	3) belanja modal alat bengkel dan alat ukur semula Rp185.579.500,00 berkurang Rp47.526.100,00 atau 25,61% menjadi Rp138.053.400,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek:		
	a) belanja modal alat bengkel bermesin semula Rp142.512.500,00 berkurang Rp57.526.100.00 atau 40,37% menjadi Rp84.986.400,00; dan		
	b) belanja modal alat ukur semula Rp43.000.000,00 bertambah Rp10.000.000,00 atau 23,26% menjadi Rp53.000.000,00.		
	4) belanja modal alat pertanian semula Rp645.000.000,00 bertambah Rp5.000.000,00 atau 0,15% menjadi Rp645.950.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja alat pengolahan.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	5) belanja modal alat kantor dan rumah tangga semula Rp1.682.064.000,00 bertambah Rp618.709.400,00 atau 36,78% menjadi Rp2.300.773.400,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:		
	a) belanja modal alat kantor semula Rp442.716.100,00 bertambah Rp99.472.000,00 atau 22,47% menjadi Rp542.188.100,00;		
	b) belanja modal alat rumah tangga semula Rp1.072.397.500,00 bertambah Rp400.784.600,00 atau 37,37% menjadi Rp1.473.182.100,00; dan		
	c) belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat semula Rp166.950.400,00 bertambah Rp118.452.800,00 atau 70,95% menjadi Rp285.403.200,00.		
	6) belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar semula Rp62.652.000,00 bertambah Rp98.063.000,00 atau 156,52% menjadi Rp160.715.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:		
	a) belanja modal alat studio semula Rp31.652.000,00 berkurang Rp15.752.000,00 atau 49,77% menjadi Rp15.900.000,00; dan		
	b) belanja modal alat komunikasi semula Rp31.000.000,00 bertambah Rp113.815.000,00 atau 367,15% menjadi Rp144.815.000,00.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	7) belanja modal komputer semula Rp5.606.770.000,00 berkurang Rp2.378.717.500,00 atau 42,43% menjadi Rp3.228.052.500,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:		
	a) belanja modal komputer unit semula Rp5.234.841.000,00 berkurang Rp2.420.262.500,00 atau 46,23% menjadi Rp2.814.578.500,00; dan		
	b) belanja modal peralatan komputer semula Rp371.929.000,00 bertambah Rp41.545.000,00 atau 11,17% menjadi Rp413.474.000,00.		
	8) belanja modal peralatan dan mesin BOSP semula Rp3.283.390.245,00 bertambah Rp431.907.090,00 atau 13,15% menjadi Rp3.715.297.335,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:		
	a) belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS semula sebesar Rp3.283.390.245,00 bertambah Rp272.164.490,00 atau 8,29% menjadi Rp3.555.554.735,00; dan		
	b) belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP PAUD semula Rp0,00 bertambah Rp159.742.600,00 atau 100,00% menjadi Rp159.742.600,00.		
	9) belanja modal peralatan dan mesin BLUD semula Rp5.425.048.498,00 bertambah Rp1.232.324.289,58 atau 22,72% menjadi Rp6.657.372.787,58 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.		
	Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula Rp39.854.000,00 bertambah Rp38.521.430,00 atau 96,66% menjadi Rp78.375.430,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal alat kedokteran.		
	c. belanja modal gedung dan bangunan semula Rp29.553.127.000,00 bertambah Rp3.504.101.428,00 atau 11,86% menjadi Rp33.057.228.428,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:		
	1) belanja modal bangunan gedung semula Rp28.853.127.000,00 bertambah Rp3.484.101.428,00 atau 12,08% menjadi Rp32.337.228.428,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dan belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	2) belanja modal tugu titik kontrol/pasti semula Rp0,00 bertambah Rp20.000.000,00 atau 100,00% menjadi Rp20.000.000,00 dan		
	3) belanja modal gedung dan bangunan BLUD semula Rp700.000.000,00 tidak mengalami perubahan.		
	d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi semula Rp15.740.413.000,00 bertambah Rp47.839.115.489,00 atau 303,93% menjadi Rp63.579.528.489,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:		
	1) belanja modal jalan dan jembatan semula Rp15.404.913.000,00 bertambah Rp47.541.412.200,00 atau 308,61% menjadi Rp62.946.325.200,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:		
	a) belanja modal jalan semula Rp15.404.913.000,00 bertambah Rp47.486.912.200,00 atau 308,26% menjadi Rp62.891.825.200,00; dan		
	b) belanja modal jembatan semula Rp0,00 bertambah Rp54.500.000,00 atau 100,00% menjadi Rp54.500.000,00.		
	2) belanja modal bangunan air semula Rp53.500.000,00 bertambah Rp147.777.000,00 atau 276,22% menjadi Rp201.277.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:		
	a) belanja modal bangunan air irigasi semula Rp0,00 bertambah Rp147.777.000,00 atau 100,00% menjadi Rp147.777.000,00; dan		
	b) belanja modal bangunan air bersih/air baku semula Rp53.500.000,00 tidak mengalami perubahan.		
	3) belanja modal instalasi semula Rp60.000.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal instalasi air bersih/air baku.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	4) belanja modal jaringan semula Rp57.000.000,00 bertambah Rp144.926.289,00 atau 254,26% menjadi Rp201.926.289,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal jaringan listrik.		
	5) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD semula Rp165.000.000,00 bertambah Rp5.000.000,00 atau 3,03% menjadi Rp170.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.		
	e. belanja modal aset tetap lainnya semula Rp8.942.829.300,00 berkurang Rp7.962.901.300,00 atau 89,04% menjadi Rp979.928.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;		
	f. belanja modal aset lainnya semula Rp843.347.500,00 bertambah Rp687.548.350,00 atau 81,53% menjadi Rp1.530.895.850,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.		
	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana maksud butir 3.4.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	untuk Pengadaan barang milik daerah di kabupaten bangli dalam pelaksanaannya akan selalu berusaha untuk sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
	Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.	Dalam pelaksanaan pengadaan barang milik daerah agar tetap memperhatikan aspek kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.	

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Pemerintah Kabupaten Bangli dalam pelaksanaan Belanja Modal agar memperhatikan waktu tahapan pengadaan barang/jasa hingga penyelesaian pekerjaan secara cermat dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dalam pelaksanaan Belanja Modal akan selalu memperhatikan waktu tahapan pengadaan barang/jasa hingga penyelesaian pekerjaan secara cermat dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
		Pemerintah Kabupaten Bangli wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli telah menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan lebih dari 40% dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
	7. Belanja Tidak Terduga		
	Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam peraturan kepala daerah yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan butir 3.4.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp2.227.335.462,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	8. Belanja Transfer		
	Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula Rp167.614.725.600,00 berkurang Rp14.849.997.000,00 atau 8,86% menjadi Rp152.764.728.600,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:		
	a. belanja bagi hasil semula Rp12.845.170.400,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek:	Selanjutnya, besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah tersebut dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.4.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi,
	1) belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula Rp5.584.200.000,00 tidak mengalami perubahan; dan		
	2) belanja bagi hasil retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa semula Rp7.260.970.400,00 tidak mengalami perubahan.		
	Pemerintah Kabupaten Bangli sudah mengalokasikan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% dari rencana Pendapatan Pajak Daerah namun sudah mengalokasikan Belanja Bagi Hasil untuk Retribusi Daerah paling sedikit 10% dari rencana Pendapatan Retribusi Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sesuai amanat Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta butir 3.4.4.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
			Pemerintah Kabupaten Bangli akan selalu berusaha mengalokasikan anggaran Belanja ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir 3.4.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. belanja bantuan keuangan semula Rp154.769.555.200,00 berkurang Rp14.849.997.000,00 atau 9,59% menjadi Rp139.919.558.200,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:	Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan belanja bantuan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.4.2.l Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada desa semula Rp154.769.555.200,00 berkurang Rp14.849.997.000,00 atau 9,59% menjadi Rp139.919.558.200,00.		
	Dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.4.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Bangli sudah mengalokasikan anggaran Belanja ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
VII	**Kebijakan Pembiayaan Daerah**		
	Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.		
	A. Kebijakan Pembiayaan Daerah, yaitu:		
	1. pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.3.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;		
	2. klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; dan		
	3. pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir 3.2.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	Penyediaan alokasi pembiayaan daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. Penerimaan Pembiayaan		
	Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan penerimaan pembiayaan semula Rp27.500.000.000,00, berkurang Rp13.300.879.629,19 atau 48,37% menjadi Rp14.199.120.370,81 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula Rp27.500.000.000,00, berkurang Rp13.300.879.629,19 atau 48,37% menjadi Rp14.199.120.370,81 atau 1,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam objek:		
	a. Pelampauan Penerimaan PAD semula Rp8.000.000.000,00 berkurang Rp8.000.000.000,00 atau 100,00% menjadi Rp0,00; dan		
	b. Penghematan Belanja semula Rp19.500.000.000,00 berkurang Rp5.300.879.629,19 atau 27,18% menjadi Rp14.199.120.370,81.		
	2. Pengeluaran Pembiayaan		
	Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan pengeluaran pembiayaan semula Rp13.500.000.000,00 berkurang Rp537.235.340,00 atau 3,98% menjadi Rp12.962.764.660,00 yang terdiri dari:		
	a. Penyertaan Modal Daerah semula Rp1.000.000.000,00, tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025; dan		
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo semula Rp12.500.000.000,00 berkurang Rp537.235.340,00 atau 4,30% menjadi Rp11.962.764.660,00.		
VIII	**Rekomendasi**		
	Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:		
	A. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemuktahirannya, serta dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI), sebagaimana dimaksud pada butir D.1.a.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		Pemerintah Kabupaten Bangli telah menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemuktahirannya, serta dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI)
	B. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.		Pemerintah Kabupaten Bangli akan mengikuti arahan Pemerintah Provinsi Bali dalam Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah akan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	C. Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, dan penambahan Sub kegiatan baru dalam RAPBD yang tidak tercantum dalam KUA dan PPAS perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.		Pemerintah Kabupaten Bangli akan mengikuti arahan Pemerintah Provinsi Bali untuk menyusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
	D. Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Bangli menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang meliputi sasaran strategis utama yaitu:		Pemerintah Kabupaten Bangli akan menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang meliputi sasaran strategis utama seperti :penanggulangan kemiskinan,peningkatan investasi, pengendalian stunting melalui digitalisasi administrasi dan lain-lain
	1) penanggulangan kemiskinan;		
	2) peningkatan investasi;		
	3) pengendalian stunting melalui digitalisasi administrasi;		
	4) peningkatan penggunaan PDN; dan		
	5) pengendalian inflasi antara lain:		
	a) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis;		
	b) pengendalian laju alih fungsi lahan;		
	c) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran;		
	d) penguatan tata kelola logistik daerah; dan		
	e) pengawasan harga dan operasi pasar,		
	sebagaimana dimaksud pada butir E.2.ad.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	E. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada Tahun 2O24 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, agar Pemerintah Kabupaten Bangli mengambil langkah-langkah sebagai berikut:		Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengambil langkah-langkah sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bangli
	1) melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten/Kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:		
	a) rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;		
	b) pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;		
	c) pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;		
	d) pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; dan		
	e) pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.		
	2) menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah Desa/Kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah Desa/ Kelurahan melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:		
	a) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota; dan		
	b) advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Daerah Kabupaten/Kota.		
	3) menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat;		
	a) penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;		
	b) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan		
	c) pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.		
	4) memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	5) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.		
	sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, selain itu dalam pelaksanaan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, agar mengacu juga pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.		
	F. Pemerintah Kabupaten Bangli menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang meliputi sasaran strategis utama yaitu:		Pemerintah Kabupaten Bangli telah menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang meliputi sasaran strategis utama, dan akan berusaha menikatkan secara bertahap untuk tahun-tahun berikutnya deengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah
	1. penanggulangan kemiskinan;		
	2. peningkatan investasi;		
	3. pengendalian stunting melalui digitalisasi administrasi;		
	4. peningkatan penggunaan PDN; dan		
	5. pengendalian inflasi antara lain:		
	a. peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis;		
	b. pengendalian laju alih fungsi lahan;		
	c. pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran;		
	d. penguatan tata kelola logistik daerah; dan		
	e. pengawasan harga dan operasi pasar,		
	sebagaimana maksud pada butir E.2.ad.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024		
	G. Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan stunting pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengalokasikan dukungan anggaran Percepatan Penurunan Stunting dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 menggunakan hasil pemetaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.2/0335/Bangda, tanggal 17 Januari 2024, hal: Hasil Pemetaan Sub Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Berdasarkan indikator Perpres Nomor 72 Tahun 2021.		Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan dukungan anggaran Percepatan Penurunan Stunting dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 menggunakan hasil pemetaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.2/0335/Bangda, tanggal 17 Januari 2024, hal: Hasil Pemetaan Sub Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Berdasarkan indikator Perpres Nomor 72 Tahun 2021.
	H. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam rangka pengendalian Inflasi mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi:		
	1) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis;		
	2) pengendalian laju alih fungsi lahan;		
	3) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran;		
	4) penguatan tata kelola logistik daerah; dan		
	5) pengawasan harga dan operasi pasar.		
	Selanjutnya dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat.		Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	I. Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran program dan kegiatan pra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam/non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai yang diformulasikan ke dalam program "Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Tahap Prabencana" yang selanjutnya diuraikan ke dalam kegiatan, antara lain:		Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran program dan kegiatan pra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam/non alam dan bencana sosial sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
	1) perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana;		
	2) pengurangan risiko dan pencegahan bencana;		
	3) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;		
	4) kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana; dan		
	5) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.		
	sebagaimana maksud butir 5.3.4.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.		
	J. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan yang diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (value for money), Pemerintah Kabupaten Bangli agar melakukan langkah-langkah strategis mendorong percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;		Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha untuk melakukan langkah-langkah strategis mendorong percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa
	K. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Kabupaten Bangli agar mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli menyediakan alokasi anggaran pada jenis belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak berpedoman pada butir 3.4.3.d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, antara lain:		Pemerintah Kabupaten Bangli telah menyediakan alokasi anggaran pada jenis belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
	1) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;		
	2) pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:		
	a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;		
	b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;		
	c) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan		
	d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.		
	3) keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	L. Pemerintah Kabupaten Bangli harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik untuk pemenuhan belanja mandatory spending dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.		Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik untuk pemenuhan belanja mandatory spending dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan
	M. Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan Anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara memadai untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, peningkatan akses pelayanan Kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional serta penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan Anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara memadai dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, peningkatan akses pelayanan Kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional serta penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	N. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja penerima upah di lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3.6.a.14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	O. Pemerintah Kabupaten Bangli dapat menyediakan alokasi anggaran untuk pembentukan dan mendukung pelaksanaan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 90% pada akhir Tahun 2024 sesuai amanat pada butir 5.2.20.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	P. Pemerintah Kabupaten Bangli harus memenuhi 6 (enam) dimensi pengukuran IPKD, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020.		Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dalam rangka memenuhi 6(enam) dimensi IPKD dengan kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
	Q. Dalam rangka pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) menjadi destinasi yang berkelanjutan dan berkualitas, maka diperlukan dukungan alokasi anggaran guna percepatan pengembangan 5 (lima) DPSP. Dukungan alokasi anggaran tersebut untuk Tahun Anggaran 2024 dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok sesuai tujuannya yaitu kelembagaan, infrastruktur dan penataan kawasan, perekonomian lokal/masyarakat, dan peningkatan investasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam butir E.3.r Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dan berusaha memberi dukungan terhadap DPSP dengan mengalokasikan anggaran

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	R. Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah antara lain:		Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan membuat Teba Modern dan telah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholders lainnya
	1. penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan		
	2. pengurangan sampah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.		
	sebagaimana dimaksud dalam butir E.3.r Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	S. Pemerintah Kabupaten Bangli juga diminta untuk mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan kebijakan provinsi antara lain:		Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Bali untuk berupaya mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan kebijakan provinsi bali
	1. Penggunaan Busana Adat Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018;		
	2. Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018;		
	3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9393 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali di Kabupaten/Kota, ditetapkan bulan bahasa ini dilaksanakan setiap bulan Februari di masing-masing daerah di Bali, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, desa adat, sampai ke lembaga pendidikan, swasta maupun masyarakat;		
	4. Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018;		
	5. Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018;		
	6. Integrasi Sistem dan Data Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten/Kota secara Elektronik di Provinsi Bali Sejahtera dengan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2019;		
	7. Penyelenggaraan Bulan Bung Karno sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019;		
	8. Pelaksanaan kebijakan Bali Energi Bersih sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019;		
	9. Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019;		
	10. Kebijakan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019;		
	11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik;		
	12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;		
	13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Perlindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan;		
	14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat; dan		
	15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Bali; dan		
	17. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bersih Sampah.		
	T. Dalam rangka mengendalikan jumlah kasus positif rabies di Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengupayakan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian rabies, termasuk pengendalian rabies di sektor hulu dengan vaksinasi hewan penular rabies dan pengendalian populasi hewan penular rabies, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies.		Pemerintah Kabupaten Bangli telah Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengupayakan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian rabies, termasuk pengendalian rabies di sektor hulu dengan vaksinasi hewan penular rabies dan pengendalian populasi hewan penular rabies
	U. Pemerintah Kabupaten Bangli melaporkan rencana Defisit Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2025.		Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Bali untuk melaporkan rencana Defisit Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
	V. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp77.811.092.873,76 terdiri dari:		
	1. utang perhitungan pihak ketiga (PFK) sebesar Rp199,00;		
	2. utang bunga sebesar Rp318.824.263,00;		
	3. bagian lancar utang jangka panjang sebesar Rp11.962.764.660,00;		
	4. pendapatan diterima dimuka sebesar Rp1.175.988.258,12;		
	5. utang belanja sebesar Rp62.699.549.481,21; dan		
	6. utang jangka pendek lainnya sebesar Rp1.653.966.012,43,		
	Pemerintah Kabupaten Bangli agar menganggarkan belanja untuk pembayaran kewajiban tersebut sebagai prioritas yang berpedoman pada butir C.4.b.2).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		Pemerintah Kabupaten Bangli telah menganggarkan belanja untuk pembayaran kewajiban-kewajiban sebagai prioritas dalam APBD Perubahan ini
	W. Alokasi anggaran dalam rangka mendukung Program Pembangunan Tiga Juta Rumah per tahun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dianggarkan sesuai kewenangan dengan berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah. Selanjutnya, penganggaran Program Pembangunan Tiga Juta Rumah dialokasikan pada:		Pemerintah Kabupaten Bangli dalam rangka mendukung Program Pembangunan Tiga Juta Rumah per tahun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah mengagarkan sesuai kewenangan dengan berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024
	1. sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha;		
	2. sub kegiatan pembangunan rumah baru layak huni dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.		
	X. Alokasi anggaran dalam rangka mendukung program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dianggarkan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.		Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggarn untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Y. Alokasi anggaran untuk mendukung program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Digitalisasi Pembelajaran sesuai kewenangan dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran.		Alokasi anggaran di Kabupaten Bangli untuk mendukung program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Digitalisasi Pembelajaran sesuai kewenangan dengan telaha berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025
	Z. Alokasi anggaran dalam rangka mendukung Program Sekolah Rakyat dianggarkan sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Selanjutnya, untuk mendukung program Sekolah Rakyat di wilayah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah melakukan penyiapan lahan, perizinan, penyiapan guru dan tenaga pendidik.		Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka mendukung Program Sekolah Rakyat dianggarkan sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025
	AA. Alokasi anggaran dalam rangka mewujudkan swasembada pangan dianggarkan sesuai kewenangan antara lain guna mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran anggaran dalam rangka mewujudkan swasembada pangan dianggarkan sesuai kewenangan antara lain guna mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanian
	AB. Alokasi anggaran dalam rangka mewujudkan swasembada energi dianggarkan sesuai kewenangan antara lain guna memenuhi kebutuhan energi di tingkat daerah melalui pemanfaatan potensi energi lokal yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka mendukung swasembada energi di tingkat daerah
	AC. Alokasi anggaran dalam rangka mewujudkan swasembada energi dianggarkan sesuai kewenangan antara lain guna memenuhi kebutuhan energi di tingkat daerah melalui pemanfaatan potensi energi lokal yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan		Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka mendukung swasembada energi di tingkat daerah
	AD. Alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir 5.3.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		Pemerintah Kabupaten Bangli tetap mendukung penggunaan kendaraan bermotor listrik brrbasis bateray namun karena waktu pengisian daya yang lama, infrastruktur stasiun pengisian (SPKLU) yang masih terbatas, maka utk saat ini merencanakan pengadaan mobil hybrid.
	AE. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bangli		Pemerintah Kabupaten Bangli menyampaikan terimakasih atas evaluasinya dan kami berusaha dalam menyampaikan dokumen Perda tentang APBd dan Perbup tentang Penjabaran APBD sesuai dengan kenyataanya
	AF. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pemerintah Kabupaten Bangli menyampaikan terimakasih atas evaluasi Perda dan Perbup kami, dan Pemerintah Kabupaten Bangli tetap akan berpedoman pada peraturan dan perundangan dalam menyusun Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD walaupun tidak masuk dalam keputusan Gubernur tentang evaluasi ini

Bangli, 1 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGLI
KETUA,

I KETUT SUASTIKA

Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 2 September 2025

KABUPATEN BANGLI
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**307.453.242.000,00**	**303.028.444.139,32**	**-4.424.797.860,68**
4.1.01	Pajak Daerah	93.596.300.000,00	93.596.300.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	189.646.304.000,00	184.361.385.711,34	-5.284.918.288,66
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.682.100.000,00	6.316.100.000,00	-366.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.528.538.000,00	18.754.658.427,98	1.226.120.427,98
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**891.195.807.411,00**	**1.015.634.222.998,00**	**124.438.415.587,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	842.730.907.000,00	815.631.294.000,00	-27.099.613.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.464.900.411,00	200.002.928.998,00	151.538.028.587,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.679.804.000,00**	**0,00**	**-5.679.804.000,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.679.804.000,00	0,00	-5.679.804.000,00
	Jumlah Pendapatan	**1.204.328.853.411,00**	**1.318.662.667.137,32**	**114.333.813.726,32**
5	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**968.210.393.306,00**	**974.492.237.211,89**	**6.281.843.905,89**
5.1.01	Belanja Pegawai	611.170.824.963,83	598.304.468.967,62	-12.866.355.996,21
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.260.908.976,17	349.491.202.194,27	16.230.293.218,10
5.1.03	Belanja Bunga	4.331.637.634,00	3.439.655.018,00	-891.982.616,00
5.1.05	Belanja Hibah	19.007.521.732,00	22.817.411.032,00	3.809.889.300,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	439.500.000,00	439.500.000,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**80.276.399.043,00**	**190.477.718.706,58**	**110.201.319.663,58**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.196.682.243,00	27.989.995.839,58	2.793.313.596,58
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.553.127.000,00	33.993.239.428,00	4.440.112.428,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.740.413.000,00	124.401.490.989,00	108.661.077.989,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.942.829.300,00	2.517.096.600,00	-6.425.732.700,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	843.347.500,00	1.530.895.850,00	687.548.350,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.227.335.462,00**	**2.164.338.329,66**	**-62.997.132,34**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.227.335.462,00	2.164.338.329,66	-62.997.132,34
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**167.614.725.600,00**	**152.764.728.600,00**	**-14.849.997.000,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.845.170.400,00	12.845.170.400,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	154.769.555.200,00	139.919.558.200,00	-14.849.997.000,00
	Jumlah Belanja	**1.218.328.853.411,00**	**1.319.899.022.848,13**	**101.570.169.437,13**
	Total Surplus/(Defisit)	**-14.000.000.000,00**	**-1.236.355.710,81**	**12.763.644.289,19**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**27.500.000.000,00**	**14.199.120.370,81**	**-13.300.879.629,19**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.500.000.000,00	14.199.120.370,81	-13.300.879.629,19
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**13.500.000.000,00**	**12.962.764.660,00**	**-537.235.340,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12.500.000.000,00	11.962.764.660,00	-537.235.340,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**13.500.000.000,00**	**12.962.764.660,00**	**-537.235.340,00**
	Pembiayaan Netto	**14.000.000.000,00**	**1.236.355.710,81**	**-12.763.644.289,19**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Bangli, 2 September 2025

Bupati

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Lampiran II : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 2 September 2025

KABUPATEN BANGLI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	121.056.700.000,00	118.982.400.000,00	598.457.823.168,00	601.565.515.550,89	70.967.964.043,00	174.367.399.917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	669.425.787.211,00	775.932.915.468,47	106.507.128.257,47
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	99.300.000,00	125.000.000,00	288.796.444.655,00	281.842.022.838,00	25.890.128.745,00	23.091.727.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.686.573.400,00	304.933.750.148,00	-9.752.823.252,00
1	01	1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	99.300.000,00	125.000.000,00	288.796.444.655,00	281.842.022.838,00	25.890.128.745,00	23.091.727.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.686.573.400,00	304.933.750.148,00	-9.752.823.252,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	117.115.400.000,00	117.115.400.000,00	249.613.960.382,00	260.500.944.596,89	20.192.339.098,00	21.883.780.617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	269.806.299.480,00	282.384.725.214,47	12.578.425.734,47
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	78.800.000,00	78.800.000,00	97.662.386.880,00	106.110.559.395,00	750.841.600,00	1.204.958.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.413.228.480,00	107.315.518.225,00	8.902.289.745,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	Puskesmas Bangli	1.375.800.000,00	1.375.800.000,00	1.804.328.500,00	1.855.183.472,79	80.000.000,00	139.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.328.500,00	1.995.034.472,79	110.705.972,79
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Bangli Utara	1.217.700.000,00	1.217.700.000,00	1.650.833.000,00	1.700.213.786,31	163.600.000,00	202.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.433.000,00	1.902.813.786,31	88.380.786,31
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Susut I	1.612.700.000,00	1.612.700.000,00	2.098.028.500,00	2.105.731.997,00	79.000.000,00	209.004.575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.028.500,00	2.314.736.572,79	137.708.072,79
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Susut II	1.403.700.000,00	1.403.700.000,00	1.833.628.500,00	1.983.262.044,46	123.200.000,00	244.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956.828.500,00	2.227.462.044,46	270.633.544,46
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Tembuku I	1.474.400.000,00	1.474.400.000,00	1.829.728.000,00	1.845.360.825,43	168.700.000,00	498.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.428.000,00	2.344.060.825,43	345.632.825,43
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Tembuku II	1.554.500.000,00	1.554.500.000,00	2.028.828.500,00	2.043.932.817,41	70.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.828.500,00	2.163.932.817,41	65.104.317,41
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Kintamani I	1.598.700.000,00	1.598.700.000,00	2.027.378.500,00	2.090.185.294,58	161.771.500,00	365.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.150.000,00	2.455.956.794,58	266.806.794,58
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Kintamani II	1.047.900.000,00	1.047.900.000,00	1.496.090.502,00	1.788.035.934,72	125.637.998,00	291.792.632,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.728.500,00	2.079.828.567,14	458.100.067,14
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Kintamani III	1.087.400.000,00	1.087.400.000,00	1.444.971.500,00	1.563.730.052,09	175.957.000,00	250.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.928.500,00	1.814.387.052,09	193.458.552,09
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Kintamani IV	898.600.000,00	898.600.000,00	1.371.720.500,00	1.420.950.371,50	42.208.000,00	98.222.079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.928.500,00	1.519.172.450,87	105.243.950,87
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Kintamani V	1.764.500.000,00	1.764.500.000,00	2.254.896.000,00	2.266.147.829,13	92.054.000,00	92.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346.950.000,00	2.358.201.829,13	11.251.829,13
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Kintamani VI	1.310.700.000,00	1.310.700.000,00	1.708.081.500,00	1.823.310.116,34	107.920.000,00	114.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.001.500,00	1.937.830.116,34	121.828.616,34
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah	100.690.000.000,00	100.690.000.000,00	130.403.060.000,00	131.904.340.660,13	18.051.449.000,00	18.051.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.454.509.000,00	149.955.789.660,13	1.501.280.660,13
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.842.000.000,00	1.742.000.000,00	34.161.430.631,00	33.426.787.616,00	18.760.499.300,00	123.245.895.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.921.929.931,00	156.672.682.706,00	103.750.752.775,00
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	6.151.620.000,00	6.649.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151.620.000,00	6.649.840.000,00	498.220.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.842.000.000,00	1.742.000.000,00	28.009.810.631,00	26.776.947.616,00	18.760.499.300,00	123.245.895.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.770.309.931,00	150.022.842.706,00	103.252.532.775,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	0,00	20.259.524.950,00	20.341.486.950,00	6.124.996.900,00	6.124.996.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384.521.850,00	26.466.483.850,00	81.962.000,00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	12.284.461.650,00	12.062.999.250,00	3.829.900,00	3.829.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.288.291.550,00	12.066.829.150,00	-221.462.400,00
1	05	1.05.0.00.0.00.09.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	7.975.063.300,00	8.278.487.700,00	6.121.167.000,00	6.121.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.096.230.300,00	14.399.654.700,00	303.424.400,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	0,00	5.626.462.550,00	5.454.273.550,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626.462.550,00	5.475.273.550,00	-151.189.000,00
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	5.626.462.550,00	5.454.273.550,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626.462.550,00	5.475.273.550,00	-151.189.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.033.204.000,00	1.033.204.000,00	94.563.106.263,00	98.884.018.076,00	5.805.755.600,00	7.836.506.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.368.861.863,00	106.720.524.965,00	6.351.663.102,00
2	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	2.817.806.800,00	6.555.276.390,00	30.100.000,00	1.698.056.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.906.800,00	8.253.332.902,00	5.405.426.102,00
2	01	1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	2.817.806.800,00	6.555.276.390,00	30.100.000,00	1.698.056.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.906.800,00	8.253.332.902,00	5.405.426.102,00
2	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	411.132.500,00	454.356.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.132.500,00	454.356.500,00	43.224.000,00
2	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	411.132.500,00	454.356.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.132.500,00	454.356.500,00	43.224.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	382.704.000,00	382.704.000,00	34.542.023.913,00	33.271.511.586,00	4.000.000.000,00	4.263.294.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.542.023.913,00	37.534.806.363,00	-1.007.217.550,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	382.704.000,00	382.704.000,00	34.542.023.913,00	33.271.511.586,00	4.000.000.000,00	4.263.294.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.542.023.913,00	37.534.806.363,00	-1.007.217.550,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	6.193.776.400,00	6.528.246.400,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203.776.400,00	6.538.246.400,00	334.470.000,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	6.193.776.400,00	6.528.246.400,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203.776.400,00	6.538.246.400,00	334.470.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	12.021.762.000,00	11.514.629.500,00	944.500.600,00	944.500.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.966.262.600,00	12.459.130.100,00	-507.132.500,00
2	13	2.13.2.14.0.00.09.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	8.650.658.600,00	8.049.676.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650.658.600,00	8.049.676.100,00	-600.982.500,00
2	13	2.13.2.14.0.00.09.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	3.371.103.400,00	3.464.953.400,00	944.500.600,00	944.500.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315.604.000,00	4.409.454.000,00	93.850.000,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	650.500.000,00	650.500.000,00	8.205.563.650,00	8.291.650.000,00	146.500.000,00	193.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352.063.650,00	8.485.150.000,00	133.086.350,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	650.500.000,00	650.500.000,00	8.205.563.650,00	8.291.650.000,00	146.500.000,00	193.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352.063.650,00	8.485.150.000,00	133.086.350,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	0,00	7.200.626.850,00	8.024.956.850,00	0,00	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.626.850,00	8.126.956.850,00	926.330.000,00
2	16	2.16.2.21.2.20.03.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	0,00	62.720.000,00	74.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.720.000,00	74.720.000,00	12.000.000,00
2	16	2.16.2.21.2.20.03.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
2	16	2.16.2.21.2.20.03.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	0,00	7.132.806.850,00	7.945.136.850,00	0,00	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132.806.850,00	8.047.136.850,00	914.330.000,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0,00	0,00	6.329.863.450,00	6.557.010.150,00	209.382.000,00	239.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539.245.450,00	6.796.392.150,00	257.146.700,00
2	17	2.17.2.07.0.00.06.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	94.931.650,00	172.670.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.931.650,00	172.670.850,00	77.739.200,00
2	17	2.17.2.07.0.00.06.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	6.234.931.800,00	6.384.339.300,00	209.382.000,00	239.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444.313.800,00	6.623.721.300,00	179.407.500,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	0,00	6.915.794.150,00	6.988.504.150,00	346.800.000,00	346.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262.594.150,00	7.335.304.150,00	72.710.000,00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	6.915.794.150,00	6.988.504.150,00	346.800.000,00	346.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262.594.150,00	7.335.304.150,00	72.710.000,00
2	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	0,00	9.066.637.800,00	9.829.837.800,00	54.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.121.137.800,00	9.847.337.800,00	726.200.000,00
2	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	9.066.637.800,00	9.829.837.800,00	54.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.121.137.800,00	9.847.337.800,00	726.200.000,00
2	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	0,00	706.407.500,00	698.827.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.407.500,00	698.827.500,00	-7.580.000,00
2	27	3.27.3.25.2.09.01.0000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	706.407.500,00	698.827.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.407.500,00	698.827.500,00	-7.580.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	0,00	151.711.250,00	169.211.250,00	63.973.000,00	21.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.684.250,00	190.684.250,00	-25.000.000,00
2	01	4.01.2.23.2.24.01.0003	Asisten Administrasi Umum	0,00	0,00	25.714.000,00	25.714.000,00	62.963.000,00	20.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.677.000,00	46.177.000,00	-42.500.000,00
2	01	4.01.2.23.2.24.01.0003	Asisten Administrasi Umum	0,00	0,00	125.997.250,00	143.497.250,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.007.250,00	144.507.250,00	17.500.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	68.941.262.000,00	66.941.262.000,00	73.907.348.750,00	78.624.836.850,00	1.034.715.200,00	1.932.036.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.942.063.950,00	80.556.873.450,00	5.614.809.500,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	58.800.000.000,00	58.800.000.000,00	30.628.533.300,00	33.673.079.500,00	133.810.000,00	357.379.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.762.343.300,00	34.030.459.300,00	3.268.116.000,00
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	58.800.000.000,00	58.800.000.000,00	30.628.533.300,00	33.673.079.500,00	133.810.000,00	357.379.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.762.343.300,00	34.030.459.300,00	3.268.116.000,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	756.400.000,00	756.400.000,00	29.908.311.700,00	31.370.300.200,00	584.940.000,00	632.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.493.251.700,00	32.002.775.200,00	1.509.523.500,00
3	27	3.27.3.25.2.09.01.0000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	756.400.000,00	756.400.000,00	29.009.686.700,00	30.415.851.700,00	424.440.000,00	471.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.434.126.700,00	30.887.826.700,00	1.453.700.000,00
3	27	3.27.3.25.2.09.01.0000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	898.625.000,00	954.448.500,00	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.125.000,00	1.114.948.500,00	55.823.500,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9.384.862.000,00	7.384.862.000,00	13.346.575.000,00	13.557.528.400,00	315.965.200,00	942.181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662.540.200,00	14.499.710.200,00	837.170.000,00
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	3.458.417.600,00	3.873.741.000,00	315.965.200,00	717.181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774.382.800,00	4.590.922.800,00	816.540.000,00
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.384.862.000,00	7.384.862.000,00	9.888.157.400,00	9.683.787.400,00	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888.157.400,00	9.908.787.400,00	20.630.000,00
3	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	0,00	23.928.750,00	23.928.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.928.750,00	23.928.750,00	0,00
3	01	4.01.2.23.2.24.01.0001	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	0,00	0,00	23.928.750,00	23.928.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.928.750,00	23.928.750,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	122.568.160.900,00	120.934.769.900,00	1.395.103.000,00	4.613.478.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.963.263.900,00	125.548.248.200,00	1.584.984.300,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	73.517.099.900,00	71.542.478.100,00	1.395.103.000,00	4.008.101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.912.202.900,00	75.550.579.400,00	638.376.500,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	35.489.944.000,00	32.064.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.489.944.000,00	32.064.614.000,00	-3.425.330.000,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0001	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	0,00	0,00	26.896.918.450,00	26.865.584.550,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.931.918.450,00	26.900.584.550,00	-31.333.900,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0002	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	730.369.650,00	690.869.650,00	165.757.500,00	165.757.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.127.150,00	856.627.150,00	-39.500.000,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0003	Asisten Administrasi Umum	0,00	0,00	10.399.867.800,00	11.921.409.900,00	1.194.345.500,00	3.807.343.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594.213.300,00	15.728.753.700,00	4.134.540.400,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	49.051.061.000,00	49.392.291.800,00	0,00	605.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.051.061.000,00	49.997.668.800,00	946.607.800,00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	49.051.061.000,00	49.392.291.800,00	0,00	605.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.051.061.000,00	49.997.668.800,00	946.607.800,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.013.297.687.411,00	1.131.705.801.137,32	37.819.415.543,00	33.033.763.568,00	506.357.600,00	751.397.100,00	2.227.335.462,00	2.164.338.329,66	167.614.725.600,00	152.764.728.600,00	208.167.834.205,00	188.714.227.597,66	-19.453.606.607,34
5	01		PERENCANAAN	0,00	0,00	5.975.943.750,00	6.061.818.150,00	6.600.000,00	173.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982.543.750,00	6.235.620.150,00	253.076.400,00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	5.975.943.750,00	6.061.818.150,00	6.600.000,00	173.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982.543.750,00	6.235.620.150,00	253.076.400,00
5	02		KEUANGAN	1.013.297.687.411,00	1.131.705.801.137,32	23.749.894.493,00	18.175.506.318,00	277.790.100,00	445.995.100,00	2.227.335.462,00	2.164.338.329,66	167.614.725.600,00	152.764.728.600,00	193.869.745.655,00	173.550.568.347,66	-20.319.177.307,34
5	02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.013.297.687.411,00	1.131.705.801.137,32	23.749.894.493,00	18.175.506.318,00	277.790.100,00	445.995.100,00	2.227.335.462,00	2.164.338.329,66	167.614.725.600,00	152.764.728.600,00	193.869.745.655,00	173.550.568.347,66	-20.319.177.307,34
5	03		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	0,00	6.578.462.000,00	6.984.221.800,00	179.425.500,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757.887.500,00	7.084.221.800,00	326.334.300,00
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	565.955.500,00	736.930.500,00	29.177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.133.000,00	736.930.500,00	141.797.500,00
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	6.012.506.500,00	6.247.291.300,00	150.248.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.162.754.500,00	6.347.291.300,00	184.536.800,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	1.515.115.300,00	1.812.217.300,00	42.542.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.657.300,00	1.843.817.300,00	286.160.000,00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00	1.515.115.300,00	1.812.217.300,00	42.542.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.657.300,00	1.843.817.300,00	286.160.000,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	12.933.683.400,00	13.843.582.700,00	261.734.800,00	461.312.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195.418.200,00	14.304.894.800,00	1.109.476.600,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	12.933.683.400,00	13.843.582.700,00	261.734.800,00	461.312.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195.418.200,00	14.304.894.800,00	1.109.476.600,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	0,00	0,00	12.933.683.400,00	13.843.582.700,00	261.734.800,00	461.312.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195.418.200,00	14.304.894.800,00	1.109.476.600,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	0,00	21.788.755.850,00	21.409.031.135,00	304.768.800,00	515.587.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.093.524.650,00	21.924.618.935,00	-168.905.715,00
7	01		KECAMATAN	0,00	0,00	21.788.755.850,00	21.409.031.135,00	304.768.800,00	515.587.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.093.524.650,00	21.924.618.935,00	-168.905.715,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Bangli	0,00	0,00	10.021.673.200,00	10.090.248.485,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021.673.200,00	10.290.248.485,00	268.575.285,00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Kintamani	0,00	0,00	4.118.514.250,00	3.791.914.250,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118.514.250,00	3.821.914.250,00	-296.600.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Susut	0,00	0,00	3.466.410.500,00	3.598.640.500,00	39.121.000,00	22.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505.531.500,00	3.621.030.500,00	115.499.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tembuku	0,00	0,00	4.182.157.900,00	3.928.227.900,00	265.647.800,00	263.197.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447.805.700,00	4.191.425.700,00	-256.380.000,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	6.172.099.432,00	6.196.719.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.099.432,00	6.196.719.432,00	24.620.000,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	6.172.099.432,00	6.196.719.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.099.432,00	6.196.719.432,00	24.620.000,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	6.172.099.432,00	6.196.719.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.099.432,00	6.196.719.432,00	24.620.000,00

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
	TOTAL	1.204.328.853.411,00	1.318.662.667.137,32	968.210.393.306,00	974.492.237.211,89	80.276.399.043,00	190.477.718.706,58	2.227.335.462,00	2.164.338.329,66	167.614.725.600,00	152.764.728.600,00	1.218.328.853.411,00	1.319.899.022.848,13	101.570.169.437,13

Kab. Bangli, 2 September 2025

Bupati

I NYOMAN SEDANA ARTA

Lampiran III : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 2 September 2025

KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.204.328.853.411,00	1.318.662.667.137,32	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	307.453.242.000,00	303.028.444.139,32	
4.1.01	Pajak Daerah	93.596.300.000,00	93.596.300.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	189.646.304.000,00	184.361.385.711,34	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.682.100.000,00	6.316.100.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.528.538.000,00	18.754.658.427,98	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	891.195.807.411,00	1.015.634.222.998,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	842.730.907.000,00	815.631.294.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.464.900.411,00	200.002.928.998,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.679.804.000,00	0,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.679.804.000,00	0,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	40.800.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	233.152.749.000,00	225.191.852.060,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksannya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.480.000,00	30.960.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.730.800,00	6.730.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.142.800,00	3.842.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.072.800,00	238.747.800,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.334.750,00	36.034.750,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	3.510.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.500.000,00	102.900.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.500.000,00	17.500.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.786.000,00	165.186.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	804.200.000,00	940.480.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.528.250,00	256.438.250,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.840.000,00	52.890.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110.000.000,00	110.000.000,00	

Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Porsentase Kualitas Pengelolaan Pendidikan			
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	419.000.000,00	650.469.428,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	226.388.357,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.904.500.000,00	3.439.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	351.000.000,00	183.424.243,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	4.700.861,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	43.598.333,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.917.500,00	5.067.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.525.000.000,00	8.883.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.400.100,00	19.400.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.093.280.370,00	19.651.682.936,00	
5.1.05	Belanja Hibah	149.100.000,00	215.700.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.159.237.730,00	2.012.600.464,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	97.406.500,00	1.368.926.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	808.904.604,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.625.000.000,00	1.512.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	22.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	30.082.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	421.800.000,00	421.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.854.000.000,00	613.060.920,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.385.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.347.500.000,00	1.702.541.691,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.271.000.000,00	5.847.766.466,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	88.696.000,00	88.696.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.306.000.000,00	1.296.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	192.112.935,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	253.000.000,00	237.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	228.000.000,00	228.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	161.304.000,00	161.304.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.182.500.000,00	4.879.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.097.714.885,00	12.892.910.842,00	
5.1.05	Belanja Hibah	227.840.000,00	241.920.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.124.152.515,00	1.288.299.158,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	185.478.000,00	488.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.800,00	19.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	26.935.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.138.400,00	18.138.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.100.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.800.000,00	399.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.974.000,00	299.974.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	578.700.000,00	541.357.400,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.988.700.000,00	1.869.700.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	159.742.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.905.000.000,00	3.398.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.800.000,00	53.600.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	150.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.530.000,00	98.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	137.958.650,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.050.000,00	43.900.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	31.500.000,00	43.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.153.700,00	15.585.700,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.380.000,00	22.348.000,00	
Program	: 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Porsentase Pengembangan Kurikulum			
Kegiatan	: 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Muatan Lokas Pendidikan Dasar			
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.591.000,00	21.691.000,00	
Program	: 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

Indikator Hasil	: Meningkatnya Prosentase Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan	: 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Indikator Keluaran	: Terlaksannya Pendidikan dan Tenaga Pendidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang adil dan Merata
Sub Kegiatan	: 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.877.500,00	29.367.500,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.177.000,00	77.587.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	100.000.000,00	

Program	: 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
Indikator Hasil	: -
Kegiatan	: 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Partisipasi Lembaga PAUD dan Nonformal
Sub Kegiatan	: 1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Program	: 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Berbasis Keagamaan Pada Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Dalam Bentuk Pesraman
Kegiatan	: 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Telaksanya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	20.200.000,00	
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.560.000,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	48.555.179.000,00	48.555.179.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.220.000,00	124.080.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksannya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.060.000,00	79.900.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.060.000,00	41.400.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.425.500,00	7.425.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.693.200,00	7.693.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.587.100,00	162.611.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.734.500,00	21.973.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	6.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.937.500,00	45.937.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.600.200,00	140.338.200,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.449.500,00	286.449.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.400.000,00	36.480.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.958.000,00	268.007.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	28.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	37.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.100.000,00	25.601.250,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	444.303.900,00	420.525.130,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	22.700.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.000.000,00	598.158.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.301.200,00	63.301.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.923.145.317,00	5.155.184.837,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.000.000,00	142.800.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.775.000,00	136.725.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.325.000,00	84.325.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.997.000,00	249.997.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.625.000,00	25.625.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.025.000,00	19.025.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.250.000,00	46.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.213.000,00	136.893.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.475.000,00	42.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.475.000,00	27.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.475.000,00	12.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.525.000,00	2.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.475.000,00	50.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	550.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000.000,00	50.476.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.400.000,00	83.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.920.000,00	90.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.730.000,00	309.730.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.560.000,00	336.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	2.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	779.613.500,00	779.613.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.751.341.980,00	44.531.295.225,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.808.000,00	3.808.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.275.000,00	166.275.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok			
Indikator Keluaran	: Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.475.000,00	27.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.390.000,00	119.390.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.774.083,00	79.774.083,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terbitnya izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.022.100.000,00	1.190.500.000,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya perizinan praktek tenaga kesehatan			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	7.200.000,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.271.000,00	98.271.000,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	704.010.000,00	711.010.000,00	
Program	: 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
Indikator Hasil	: Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman			
Kegiatan	: 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
Indikator Keluaran	: Terbitnya izin Apotek, Toko Obat, Alat Kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.626.000,00	91.626.000,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Terbitya sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.771.500,00	183.771.500,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
Indikator Keluaran	: Terbitnya sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeriksaan post market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.392.500,00	183.392.500,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.925.000,00	213.925.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Bangli			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	826.600.000,00	831.917.302,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.200.000,00	514.737.670,79	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.000.000,00	119.851.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.000.000,00	20.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP			

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.020.000,00	16.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.600.000,00	29.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.678.500,00	139.678.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	8.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	105.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	61.000.000,00	61.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.860.000,00	46.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.390.000,00	2.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.040.000,00	68.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Terrsedianya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.440.000,00	13.440.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			

Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Bangli Utara			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	664.222.375,00	696.694.645,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.877.625,00	406.786.141,31	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.600.000,00	202.600.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	17.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			

Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	17.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	17.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.183.000,00	224.183.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	13.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	25.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.100.000,00	54.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	70.300.000,00	70.300.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.680.000,00	62.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			

Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	20.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	31.200.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.520.000,00	12.520.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Susut I			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	865.345.440,00	868.600.299,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	668.354.560,00	672.803.198,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.000.000,00	209.004.575,79	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.300.000,00	31.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	19.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	9.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.678.500,00	197.678.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	13.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	12.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.050.000,00	44.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	66.800.000,00	66.800.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.964.000,00	59.964.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok			
Indikator Keluaran	: Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	10.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.150.000,00	52.150.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.836.000,00	6.836.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Susut II			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	937.247.999,50	963.450.326,50	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.252.000,50	466.683.217,96	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.200.000,00	244.200.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan Dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.750.000,00	31.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	16.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.378.500,00	207.378.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	18.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	6.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.950.000,00	37.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	66.000.000,00	66.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.870.000,00	47.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	13.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.800.000,00	50.800.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.930.000,00	17.930.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Tembuku I			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	833.268.500,00	847.051.163,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.431.500,00	474.281.662,43	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.700.000,00	498.700.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.580.000,00	26.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	12.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.778.000,00	172.778.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	12.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	11.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	38.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	62.500.000,00	62.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	51.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.370.000,00	21.370.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	61.800.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	11.200.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Tembuku II			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	832.640.000,00	840.882.709,60	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	651.860.000,00	658.721.607,81	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	120.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan Dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.160.000,00	18.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			

Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	26.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	28.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.278.500,00	195.278.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.785.000,00	22.785.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.515.000,00	51.515.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	64.800.000,00	64.800.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.630.000,00	58.630.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			

Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	740.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Tersedianya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kot			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.470.000,00	6.470.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Kintamani I			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	899.359.200,00	899.359.200,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.569.300,00	600.376.094,58	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.771.500,00	365.771.500,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			

Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.050.000,00	39.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	8.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	7.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.200.000,00	208.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	10.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.700.000,00	40.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	70.000.000,00	70.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.300.000,00	67.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.800.000,00	59.800.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Kintamani II			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.01	Belanja Pegawai	630.873.149,00	767.047.433,69	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.388.853,00	447.160.001,03	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.637.998,00	291.792.632,42	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan Dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.200.000,00	39.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	16.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.878.500,00	187.878.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.700.000,00	72.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	68.300.000,00	68.300.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.800.000,00	67.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	40.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.700.000,00	47.700.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Kintamani III			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	717.670.800,00	722.404.560,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.772.200,00	307.796.992,09	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.957.000,00	250.657.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan Dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	38.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			

Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.600.000,00	31.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.528.500,00	185.528.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.750.000,00	61.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	63.000.000,00	63.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.600.000,00	61.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			

Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.600.000,00	55.600.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	

Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Kintamani IV
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan administrasi Pemerintah Daerah
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	558.735.447,33	577.404.190,83	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.656.552,67	328.217.680,67	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.208.000,00	98.222.079,37	

Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan Dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.300.000,00	51.300.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	11.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	18.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	24.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.078.500,00	157.078.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.849.500,00	7.849.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.550.500,00	54.550.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	61.800.000,00	61.800.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.640.000,00	53.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.300.000,00	29.300.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.760.000,00	8.760.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Kintamani V			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	893.580.000,00	893.580.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	778.866.000,00	790.117.829,13	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.054.000,00	92.054.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan Dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya pelayanan untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.210.000,00	46.210.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.800.000,00	240.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	8.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.150.000,00	42.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	68.500.000,00	68.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.800.000,00	68.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			

Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.540.000,00	6.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.100.000,00	71.100.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kintamani VI			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	754.368.960,00	754.368.960,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.411.040,00	563.639.656,34	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.920.000,00	114.520.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan Dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.805.000,00	14.805.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	19.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			

Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	9.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.619.500,00	177.619.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	12.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.564.000,00	99.564.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	60.842.000,00	60.842.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.629.500,00	48.629.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.152.000,00	10.152.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.389.500,00	11.389.500,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah			

Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah			
Program	: -			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: -			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 -			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah			
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	47.413.060.000,00	47.293.060.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	35.109.600.000,00	35.109.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.548.762.366,00	45.912.025.642,13	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.050.000.000,00	4.050.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	700.000.000,00	700.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000,00	150.000.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat			

Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.03	Belanja Bunga	4.331.637.634,00	3.439.655.018,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.578.057.000,00	5.578.057.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.273.392.000,00	1.273.392.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kompetensi Teknis SDM Kesehatan sesuai standar			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	150.000.000,00	

Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	12.249.371.000,00	11.799.371.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.187.000,00	7.187.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.250.200,00	357.250.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.815.000,00	40.815.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	3.720.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.680.000,00	17.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.150.000,00	53.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.041.600,00	20.041.600,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	46.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.653.150,00	392.343.150,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			

Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.340.000,00	1.340.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	609.103.000,00	553.095.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.640.000,00	31.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	86.742.000,00	
Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
Indikator Hasil	: Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik			
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.420.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	147.777.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.474.460.000,00	630.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.755.474.800,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.207.900,00	353.398.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.864.300,00	0,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	400.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	486.847.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.090.816.981,00	5.683.619.406,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.700.000,00	0,00	
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
Indikator Hasil	: Prosentase rumah tinggal bersanitasi layak			
Kegiatan	: 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Pengelolaan dan Pengembangan sistem Air Limbah Domestik Daerah Kabupaten /Kota			
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.310.000.000,00	330.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	248.701.150,00	
Program	: 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
Indikator Hasil	: Prosentase Jaringan Drainase dalam kondisi baik			

Kegiatan	: 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
Indikator Hasil	: Rasio Bangunan Ber - IMB persatuan Bangunan			
Kegiatan	: 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	50.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	230.000.000,00	1.104.409.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	1.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	73.500.000,00	73.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.600.000,00	371.400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	500.000.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	50.000.000,00	
Program	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
Indikator Hasil	: Dokumen Penyusunan Perencanaan Penataan Kota			
Kegiatan	: 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	23.040.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	1.947.837.140,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
Indikator Hasil	: Prosentase Panjang Jalan Kondisi Baik			
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota			
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direkonstruksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.840.000,00	186.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.547.800.000,00	117.839.712.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dibangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.714.199.800,00	4.982.721.260,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	203.200.200,00	295.020.400,00	

Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Indikator Hasil	: Persentase Tenaga Terampil Konstruksi
Kegiatan	: 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Tenaga yang Terampil
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.265.000,00	49.265.000,00	

Kegiatan	: 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Tenaga yang Terampil
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Indikator Hasil	: Prosentase ruang publik umum yang nyaman dan aman
Kegiatan	: 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: "Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota"
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.510.000,00	16.920.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			

Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.200.000,00	70.200.000,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK			
Indikator Keluaran	: Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.500.000,00	71.300.000,00	
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
Indikator Hasil	: Rasio Rumah Layak Huni			
Kegiatan	: 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			

Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	180.000.000,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
Indikator Hasil	: Rasio Rumah Layak Huni			
Kegiatan	: 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.801.620.000,00	814.840.000,00	
Program	: 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
Indikator Hasil	: Prosentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			
Kegiatan	: 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencegahan, Perumahan, dan kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
Indikator Hasil	: Prosentase Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			
Kegiatan	: 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
Indikator Keluaran	: Tertatanya Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.655.000.000,00	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja			
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Prosentase pelaksanaan pelayanan adminsitrasi Perkantoran			
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.764.550,00	66.764.550,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.459.700,00	2.459.700,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	10.473.990.000,00	10.173.990.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Kepagawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.024.000,00	1.024.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.018.400,00	2.018.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.684.200,00	66.684.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	2.880.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	4.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.220.000,00	11.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.240.700,00	185.975.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.330.000,00	9.330.000,00	
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Prosentase Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			
Kegiatan	: 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.454.000,00	5.934.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	3.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.286.846.300,00	1.297.376.300,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.000,00	67.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.500,00	247.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0006 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.200,00	277.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.905.900,00	1.905.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.200,00	214.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.999.950,00	9.069.950,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.633.200,00	203.676.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.857.000,00	1.857.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.000,00	108.000,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Terwujudnya Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.199.750,00	15.279.750,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.09.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran			
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.09.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran			
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.515.666.000,00	6.560.666.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.389.900,00	2.389.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.364.400,00	1.364.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.404.100,00	41.420.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.066.800,00	5.066.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.050.000,00	37.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.980.000,00	58.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Miliki Daerah yang dipelihara			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.209.400,00	276.467.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	21.900.000,00	
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana			
Kegiatan	: 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga/Desa yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.670.200,00	17.670.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	24.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiap Siagaan			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.763.800,00	700.763.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.936.000,00	100.936.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.060.000,00	6.060.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	50.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang tertangani akibat Pasca Bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.518.700,00	186.048.700,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.857.113.000,00	5.857.113.000,00	

Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana			
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.320.000,00	304.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.118.000,00	79.118.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.000.000,00	60.000.000,00	
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.02.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.02.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.585.614.000,00	4.405.614.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.164.300,00	4.164.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: 0			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.575.200,00	3.575.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.007.300,00	326.577.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.460.200,00	14.460.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.420.000,00	6.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.982.400,00	3.982.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	21.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.980.000,00	7.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	24.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.300.000,00	36.300.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.767.650,00	198.973.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			

Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.710.000,00	18.710.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan			
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan			
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.650.000,00	37.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.661.000,00	32.161.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.039.100,00	35.539.100,00	
Program	: 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
Indikator Hasil	: jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke desa/kelurahan asal			
Kegiatan	: 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			
Indikator Keluaran	: Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.			
Sub Kegiatan	: 1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
Indikator Keluaran	: penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	0,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	39.500.000,00	39.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.652.800,00	98.052.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Kegiatan	: 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
Indikator Keluaran	: Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar Lanjut usia terlantar,Gelandanngan Pengemis diluar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	47.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.635.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase Penyandang Disabilitas Fisik dan mental serta lanjut Usia Tidak Potensial yang menerima jaminan sosial			
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyandang Disabilitas Fisik dan mental serta lanjut Usia Tidak Potensial yang menerima jaminan sosial			
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.275.000,00	57.775.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
Indikator Hasil	: Presentase Penannganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial			
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase Penannganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial			
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.603.600,00	53.103.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: persentase penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial			
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
Organisasi	: 2.17.2.07.0.00.06.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja			
Unit Organisasi	: 2.17.2.07.0.00.06.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja			
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: Prosentase jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi			
Kegiatan	: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah peningkatan kompetensi calon tenaga kerja			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
Indikator Keluaran	: Jumlah terbinanya lembaga latihan kerja swasta			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.383.950,00	16.383.950,00	
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: Prosentase jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan			
Kegiatan	: 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah peningkatan pengelolaan informasi pasar kerja			
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.327.700,00	60.827.700,00	
Kegiatan	: 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pekerja migran yang dilatih			
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan			

Indikator Keluaran	: Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
Indikator Hasil	: Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek			
Kegiatan	: 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah perusahaan yang didata dab diberi sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaa			
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.220.000,00	95.459.200,00	
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan			
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perselisihan yang Dicegah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah LKS Tripartit yang Dibina			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.02.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.02.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta			
Kegiatan	: 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta			
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.120.000,00	112.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Prosentase Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi			
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	30.000.000,00	
Kegiatan	: 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.168.000,00	23.168.000,00	
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu			
Kegiatan	: 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu			

Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: MENINGKATNYA PORSENTASE PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN KOTA			
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.375.000,00	61.375.000,00	
Kegiatan	: 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
Indikator Hasil	: Tersedianya Data Informasi Gender dan Anak			
Kegiatan	: 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah data gender dan anak yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
Indikator Hasil	: Terwujudnya Kabupaten Layak Anak			
Kegiatan	: 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen lembaga penyedia layanan perlindungan anak			
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.675.000,00	81.419.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.270.500,00	19.270.500,00	
Kegiatan	: 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
Indikator Hasil	: Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu			
Kegiatan	: 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pencegahan terhadap kekerasan Anak			
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			

Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah layanan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus			
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK			
Indikator Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.524.000,00	76.604.000,00	
Kegiatan	: 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.03.0009 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
Organisasi	: 3.27.3.25.2.09.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan			
Unit Organisasi	: 3.27.3.25.2.09.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan			
Program	: 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang diadakan			

Kegiatan	: 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandiaraian pangan yang diadakan			
Sub Kegiatan	: 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase tingkat diversifikasi masyarakat			
Kegiatan	: 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
Indikator Keluaran	: Persentase harga Pangan pokok terpantau			
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
Indikator Keluaran	: Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.812.000,00	25.862.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	73.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.747.500,00	31.247.500,00	
Kegiatan	: 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			

Indikator Keluaran	: Persentase laporan pola konsumsi dan suplai pangan tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			
Indikator Keluaran	: Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.697.500,00	42.567.500,00	
Program	: 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase kasus kerawanan pangan menurun			
Kegiatan	: 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase laporan ketahanan pangan tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			
Indikator Keluaran	: Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.245.000,00	22.745.000,00	
Kegiatan	: 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase kerawanan pangan kabupaten terpantau			
Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.520.500,00	476.770.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase Skor Pola Pangan Harapan			
Kegiatan	: 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Informasi pemantauan mutu dan keamanan pangan tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.385.000,00	25.885.000,00	
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup			
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.496.250,00	4.496.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.927.650,00	3.927.650,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	26.850.391.800,00	25.250.391.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	875.000,00	875.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.988.800,00	3.988.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.037.600,00	15.037.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.066.600,00	263.976.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.126.000,00	22.126.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.940.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.567.500,00	71.567.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.125.300,00	191.159.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.930.000,00	11.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Persentase perencanaan lingkungan hidup			
Kegiatan	: 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen KLHS yang tersusun			
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terukurnya Tingkat Pencemaran di Kabupaten Bangli			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.890.400,00	88.908.150,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.771.200,00	3.358.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	
Kegiatan	: 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.03.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.873.300,00	196.200.500,00	
Program	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
Indikator Hasil	: Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati			
Kegiatan	: 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kelestarian lingkungan			
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
Indikator Keluaran	: Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.245.528.000,00	1.350.766.036,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	10.000.000,00	
Program	: 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
Indikator Hasil	: Persentase Perijinan dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Bahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			
Kegiatan	: 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3			
Indikator Keluaran	: Persentase Perijinan dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Bahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			
Sub Kegiatan	: 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.416.750,00	1.321.750,00	
Program	: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
Indikator Hasil	: Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki ijin lingkungan dan PPLH			
Kegiatan	: 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha/Kegiatan Yang Sudah Memiliki Ijin Lingkungan dan PPLH			
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.920.000,00	47.095.000,00	
Program	: 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal			
Kegiatan	: 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.981.250,00	6.111.750,00	
Program	: 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			
Kegiatan	: 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tertanganinya Pengelolaan Pengaduan Masayarakat di Bidang PPLH			
Sub Kegiatan	: 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.415.000,00	1.050.000,00	
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			

Indikator Hasil	: Persentase jumlah sampah yang tertangani
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah
Indikator Keluaran	: Peningkatkan Kelestarian Lingkungan
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.412.400,00	103.621.700,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000.000,00	4.005.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
Indikator Keluaran	: jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.180.943.113,00	5.406.201.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	43.500.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	6.375.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	198.419.777,00	

Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Prosentase Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.810.000,00	2.810.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase laporan Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.909.582.000,00	5.129.582.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.869.200,00	5.869.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.704.400,00	6.704.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.202.800,00	124.202.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.406.500,00	4.406.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	4.620.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	60.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.660.000,00	232.560.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.062.400,00	84.062.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.180.000,00	18.180.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
Indikator Hasil	: Prosentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk			
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk yang didaftar			
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Kegiatan	: 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Prosentase Meningkatnya Penduduk yang didaftar			
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.624.000,00	428.352.200,00	
Kegiatan	: 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Prosentase meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.648.400,00	40.620.200,00	
Kegiatan	: 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk			
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.04.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
Indikator Hasil	: Prosentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil			

Kegiatan	: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Prosentase Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil			
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.722.000,00	96.722.000,00	
Kegiatan	: 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Prosentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.500.000,00	125.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Kualitas Laporan Informasi Administrasi Kependudukan			
Kegiatan	: 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan			
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	10.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Prosentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.640.000,00	130.540.000,00	
Kegiatan	: 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Prosentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			

Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.994.700,00	1.064.700,00	
Program	: 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
Indikator Hasil	: Prosentase Meningkatnya kualitas Penyusunan Profil Kependudukan			
Kegiatan	: 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Prosentase Meningkatnya Profil Kependudukan yang disusun			
Sub Kegiatan	: 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.500.000,00	
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Organisasi	: 2.13.2.14.0.00.09.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Unit Organisasi	: 2.13.2.14.0.00.09.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.769.129.000,00	4.569.129.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.382.800,00	3.382.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.077.600,00	29.077.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.650.900,00	195.650.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.911.150,00	11.023.650,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.340.000,00	8.340.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.777.300,00	232.302.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	21.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA			
Indikator Hasil	: Prosentase desa yang melakukan penataan desa			
Kegiatan	: 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa			
Indikator Keluaran	: Tertatanya desa yang baik			
Sub Kegiatan	: 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.266.500,00	2.266.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.015.000,00	315.000,00	
Program	: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
Indikator Hasil	: Prosentase desa dalam meningkatkan kerjasama desa			
Kegiatan	: 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa			
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Prosentase administrasi pemerintahan desa yang baik			
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Tertatanya administrasi pemerintahan desa yang baik			
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.250.000,00	358.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.317.650.000,00	1.314.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			

Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.425.000,00	138.425.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.110.000,00	7.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.405.500,00	123.985.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.585.000,00	6.585.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.835.000,00	14.235.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.802.000,00	35.802.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.840.000,00	6.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.944.500,00	8.944.500,00	
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
Indikator Hasil	: Prosentase lembaga kemasyarakatan dalam menunjang pemberdayaan masyarakat			
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya lembaga Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.944.350,00	92.944.350,00	

Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.986.000,00	24.306.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.931.000,00	21.351.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.283.000.000,00	762.460.000,00	
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
Program	: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
Indikator Hasil	: Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani (unmeet need)			
Kegiatan	: 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
Indikator Keluaran	: Tercapainya Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0007 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0017 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tercapainya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0010 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.600.000,00	117.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.320.000,00	579.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
Indikator Hasil	: Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) bagi pasangan usia subur			
Kegiatan	: 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
Indikator Keluaran	: Tercapianya Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.000.000,00	147.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.102.000,00	109.102.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	134.200.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
Indikator Keluaran	: Tercapainya Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.000.000,00	396.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.463.400,00	29.213.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.430.600,00	141.430.600,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	803.070.000,00	803.070.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.548.000,00	38.548.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.050.000,00	198.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.900.000,00	25.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria			
Indikator Keluaran	: Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
Indikator Keluaran	: Tercapainya Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.200.000,00	191.200.000,00	
Program	: 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaa Pembinaan terhadap seluruh Poktan			
Kegiatan	: 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Tercapinya Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keleluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	39.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			

Indikator Keluaran	: Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0020 Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.332.720.000,00	1.332.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Kegiatan	: 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Tercapainya Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga			
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan			
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.637.236.000,00	4.557.236.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase capaian penunjang perangkat daerah kabupaten			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.372.600,00	1.372.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.789.400,00	4.789.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.996.200,00	225.196.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.575.000,00	155.775.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.220.000,00	5.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.990.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.500.000,00	42.500.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.300.000,00	50.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.260.000,00	119.760.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase capaian penunjang perangkat daerah kabupaten 3 Jenis			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.196.850,00	217.601.850,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	14.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLA J)			
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan yang tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.651.674.400,00	1.675.674.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.000.000,00	57.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.470.200,00	118.790.200,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.124.050,00	235.175.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	30.000.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.000.000,00	29.000.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	35.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	610.854.850,00	751.854.850,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.161.600,00	36.561.600,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.091.050,00	66.091.050,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pengelolaan Pelayaran			
Kegiatan	: 2.15.03.2.04 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.051.450,00	48.051.450,00	
Kegiatan	: 2.15.03.2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.05.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.03.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.03.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	14.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.141.047.450,00	4.301.047.450,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	1.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.318.800,00	1.318.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.611.500,00	44.611.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	4.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.940.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.524.000,00	67.524.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.730.000,00	59.730.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.975.100,00	92.975.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	17.700.000,00	
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	877.630.000,00	1.277.430.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.200.000,00	43.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	728.770.000,00	1.012.440.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	18.037.500,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	16.962.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
Indikator Hasil	: Persentase Layanan SPBE yang dibangun			
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.510.000,00	399.810.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	67.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.160.000,00	580.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas			
Indikator Keluaran	: Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000,00	1.290.000,00	
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
Organisasi	: 2.17.2.07.0.00.06.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja			
Unit Organisasi	: 2.17.2.07.0.00.06.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja			
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: tersedianya administrasi keuangan			

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.053.892.000,00	4.983.892.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: tersediannya administrasi kepegawaian perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: tersedianya administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.318.600,00	5.318.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.381.300,00	26.381.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.592.900,00	207.492.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.558.650,00	21.558.650,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.382.000,00	9.382.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.276.000,00	144.276.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.530.000,00	162.530.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya barang milik daerah urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.316.450,00	77.473.950,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.165.000,00	18.165.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	30.000.000,00	
Program	: 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
Indikator Hasil	: Prosentase koperasi yang difasilitasi IUSP dan Ijin operasional			
Kegiatan	: 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjamnya			
Sub Kegiatan	: 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan ijin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam			
Sub Kegiatan	: 2.17.02.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
Indikator Hasil	: Prosentase koperasi aktif			
Kegiatan	: 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi			
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.505.000,00	85.905.000,00	
Program	: 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
Indikator Hasil	: Prosentase koperasi yang sehat dan berkualitas			
Kegiatan	: 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah koperasi yang dinilai			
Sub Kegiatan	: 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
Indikator Hasil	: Prosentase peningkatan profesionalisme pengelola koperasi			
Kegiatan	: 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengelola koperasi yang dilatih			
Sub Kegiatan	: 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
Indikator Hasil	: Prosentase struktur permodalan dan usaha koperasi			
Kegiatan	: 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah koperasi yang difasilitasi			
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.345.000,00	59.345.000,00	
Program	: 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
Indikator Hasil	: Prosentase wirausaha baru			
Kegiatan	: 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
Indikator Keluaran	: Jumlah wirausaha baru			
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.288.900,00	128.188.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.618.000,00	90.618.000,00	
Program	: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
Indikator Hasil	: Prosentase pelaku usaha kecil yang berdaya saing			
Kegiatan	: 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah UMKM yang difasilitasi			
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.144.000,00	266.194.000,00	
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.808.265.000,00	5.858.265.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum pada DPMPTSP			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.000,00	440.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.083.400,00	2.083.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.948.500,00	84.948.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.601.250,00	5.601.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.010.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.240.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.700.000,00	7.700.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.450.000,00	257.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.620.000,00	307.920.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.907.650,00	98.907.650,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.180.000,00	26.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	80.000.000,00	
Program	: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Jumlah Nilai Investasi			
Kegiatan	: 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.629.650,00	2.629.650,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			
Indikator Keluaran	: Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.564.850,00	2.564.850,00	
Kegiatan	: 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang disusun			
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.940.000,00	24.080.000,00	
Program	: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Jumlah Investor (PMA/PMDN)			

Kegiatan	: 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.145.650,00	25.305.650,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.850,00	999.850,00	
Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
Kegiatan	: 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan			
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.269.650,00	75.169.650,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.600.000,00	194.600.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.714.950,00	24.114.950,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.943.750,00	75.743.750,00	
Program	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Persentase perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)			
Kegiatan	: 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)			
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	20.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.430.000,00	30.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.930.000,00	34.550.000,00	
Program	: 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik			
Kegiatan	: 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.940.000,00	540.000,00	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Partisipasi Kepemudaan			
Kegiatan	: 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya pengembangan kepeloporan pemuda untuk mendorong kreatifitas, inovasi, terobosan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah dan nasional			
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.292.800,00	112.322.800,00	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.600.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya prosentase perolehan medali pada event tingkat provinsi, nasional dan Internasional			
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terbentuknya Pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan , kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Memasyarakatkan Olahraga, menjaring bibit atlet potensial, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan prestasi olahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan kesehatan nasional.			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	981.514.000,00	2.290.820.250,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	17.500.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Olahraga Prestasi melalui Pembinaan dan Pengembangan Olahraga secara terencana,sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	1.500.000.000,00	3.612.250.300,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			
Indikator Keluaran	: Meningkatkan Kesehatan, Kebugaran, Rekreasi dan Kesenangan Masyarakat melalui Olahraga			

Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	5.750.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	284.133.040,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	45.000.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	34.550.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	1.600.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	1.006.512,00	
Program	: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pembinaan Kepramukaan			
Kegiatan	: 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			
Indikator Keluaran	: Mewujudkan Generasi yang tangguh, Berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air yang ditujukan pada setiap kegiatan			
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.03.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.03.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			
Program	: 2.20.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Kegiatan	: 2.20.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.20.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
Indikator Hasil	: Tersedianya Data Tentang Kabupaten Bangli			
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
Indikator Hasil	: Prosentase Keamanan SPBE			
Kegiatan	: 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	
Kegiatan	: 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.520.000,00	20.520.000,00	
Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan desa adat serta subak dan subak abian yang dikelola dengan nilai-nilai sad kerthi			
Kegiatan	: 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan kebudayaan			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	659.390.200,00	669.890.200,00	
Kegiatan	: 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis kesenian yang terdata			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase bendesa adat,kelihan banjar adat,dan banjar adat yang ditingkatkan kapasitasnya			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.980.000,00	190.450.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	5.605.742.900,00	6.415.742.900,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	17.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
Indikator Hasil	: Jumlah Penyelenggaraan presentasi seni dan budaya			
Kegiatan	: 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kesenian daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.822.000.000,00	1.773.750.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	715.743.900,00	715.743.900,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.000.000,00	0,00	
Program	: 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
Indikator Hasil	: Jumlah simpul-simpul sejarah yang dilindungi/dikembangkan/dimanfaatkan/dibina			
Kegiatan	: 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
Indikator Hasil	: Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai warisan budaya Bali			
Kegiatan	: 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya jumlah cagar budaya yang ditetapkan			
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.780.800,00	64.260.800,00	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0003 Asisten Administrasi Umum			
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
Indikator Hasil	: Cakupan Peningkatan Kwalitas Pembinaan Perpustakaan			
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan yang dikelola			
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.447.250,00	5.447.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.277.150,00	5.277.150,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.090.800,00	13.090.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.850,00	495.850,00	
Kegiatan	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi dan lomba			
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.432.400,00	112.932.400,00	
Program	: 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
Indikator Hasil	: PERSENTASE PENINGKATAN PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
Kegiatan	: 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah naskah kuno yang dilestarikan			
Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.253.800,00	6.253.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.010.000,00	1.010.000,00	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
Indikator Hasil	: Persentse Instansi Pemerintah yang pengelolaan kearsipannya mengacu pada peraturan perundang-undangan			
Kegiatan	: 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah Perangkat Daerah yang Arsip Dinamis diawasi dan dikelola			
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			

Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.479.000,00	9.479.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	5.150.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Arsip Statis Yang Dikelola Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI			
Indikator Keluaran	: Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.365.000,00	1.365.000,00	
Kegiatan	: 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah Informasi Simpul Jaringan Nasional Yang Dilestarikan dan Unit Kearsipan Yang Dibina dan Dilberdayakan			
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	2.025.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.463.000,00	20.463.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.675.000,00	2.675.000,00	
Program	: 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
Indikator Hasil	: Cakupan Dokumen/arsip daerah yang dilestarikan			
Kegiatan	: 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
Indikator Keluaran	: jumlah Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang			
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	2.450.000,00	
Kegiatan	: 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.285.000,00	1.285.000,00	
Kegiatan	: 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang			
Indikator Keluaran	: jumlah Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang			
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.285.000,00	1.285.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Organisasi	: 3.27.3.25.2.09.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan			
Unit Organisasi	: 3.27.3.25.2.09.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan			
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			

Indikator Hasil	: Persentase konsumsi ikan masyarakat meningkat			
Kegiatan	: 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Prasaran usaha perikanan tangkap tersedia			
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
Indikator Hasil	: Persentase Konsumsi Ikan Masyarakat Meningkat			
Kegiatan	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			
Indikator Keluaran	: Produktivitas perikanan budidaya			
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.342.550,00	82.666.050,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.794.650,00	298.694.650,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			
Indikator Keluaran	: Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.623.000,00	250.423.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.000.000,00	107.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.500.000,00	53.500.000,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
Indikator Hasil	: Persentase Konsumsi Ikan Masyarakat Meningkat			
Kegiatan	: 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			
Indikator Keluaran	: Produktivitas perikanan budidaya			
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasnya promosi produk unggulan daerah			
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.265.300,00	40.265.300,00	
Kegiatan	: 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			

Indikator Keluaran	: Persentase pengethuan dan kesehatan masyarakat meningkat			
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.399.500,00	278.199.500,00	
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Meningkatkan kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.882.000,00	2.882.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.097.412.000,00	5.047.412.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.398.200,00	3.398.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.188.200,00	5.188.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.443.700,00	458.343.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.721.500,00	47.721.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.970.000,00	0,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Prosentase cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.080.000,00	20.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.349.500,00	190.349.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.280.000,00	23.280.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: tertibnya administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.389.400,00	107.389.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.420.000,00	12.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
Indikator Hasil	: Persentase pengembangan destinasi pariwisata			
Kegiatan	: 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase Daya Tarik wisata kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan,berkembang,pemantapan,revitalisasi)			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.176.000.000,00	1.176.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.091.834.800,00	25.246.651.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	13.815.000,00	
Kegiatan	: 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase Pengadaan /pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.380.000,00	81.380.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	332.054.800,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Industri Pariwisata yang memiliki TDUP			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.04.0011 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
Indikator Hasil	: IKM Kepariwisataan			
Kegiatan	: 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase Penyelenggaraan pemasaran dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota			
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.610.000,00	124.010.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.094.000,00	118.494.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.810.000,00	11.510.000,00	

Program	: 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
Indikator Hasil	: Prosentase Pengembangan Ekonomi Kreatif			
Kegiatan	: 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Prosentase Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif			
Sub Kegiatan	: 3.26.04.2.02.0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan SDM Pariwisata			
Kegiatan	: 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
Indikator Keluaran	: Prosentase Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Prosentase pelaksanaan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif			

Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
Organisasi	: 3.27.3.25.2.09.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan			
Unit Organisasi	: 3.27.3.25.2.09.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan			
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.404.500,00	7.404.500,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Gaji dan tunjangan ASN tersedia			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	25.776.771.000,00	26.006.771.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Pelayanan administrasi perkantoran memadai			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.959.600,00	6.959.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.422.000,00	15.887.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.440.000,00	100.975.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.097.800,00	302.097.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.581.900,00	15.581.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.340.000,00	5.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.660.000,00	15.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.498.000,00	201.998.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.767.050,00	223.567.050,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.030.000,00	22.030.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	321.000.000,00	371.000.000,00	
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			

Indikator Hasil	: Produktivitas tanaman perkebunan unggulan perhektar
Kegiatan	: 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Indikator Keluaran	: Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	116.000,00	116.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.450.500,00	388.650.500,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	10.812.000,00	10.812.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.880.600,00	67.680.600,00	

Kegiatan	: 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Sumber Daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
Indikator Keluaran	: Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan
Indikator Keluaran	: Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.157.600,00	360.357.600,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			
Indikator Keluaran	: Persentase bibit ternak yang diadakan			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			
Indikator Keluaran	: Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Persentase perencanaan pembangunan prasarana pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Persentase pembangunan prasarana pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			
Indikator Keluaran	: Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.569.200,00	5.569.200,00	
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit			
Indikator Keluaran	: Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.248.400,00	604.248.400,00	
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
Indikator Hasil	: Persentase Kasus penyakit ternak menurun			
Kegiatan	: 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Coverage Vaksinasi Rabies tercapai			
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.038.039.900,00	1.043.439.900,00	
Kegiatan	: 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner terkelola			
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			

Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase kelompok yang dibina dalam pengendalian OPT			
Kegiatan	: 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Kelompok yang di bina			
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.282.050,00	34.782.050,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase penyenggaraan penyuluh pertanian			
Kegiatan	: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
Indikator Keluaran	: Persentase penyenggaraan penyuluhan pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.677.600,00	129.677.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.921.000,00	39.921.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	507.300.000,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Program	: 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan			
Kegiatan	: 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C			
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat			
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C			
Indikator Keluaran	: Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P B2)			
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.06.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Distribusi Perdagangan			
Kegiatan	: 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyediaan sarana distribusi perdagangan			
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.392.023.000,00	3.803.246.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	231.965.200,00	613.181.800,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	20.000.000,00	
Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting			
Kegiatan	: 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.956.000,00	6.256.000,00	
Program	: 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			

Kegiatan	: 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah Pedagang yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional
Sub Kegiatan	: 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Kegiatan	: 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.438.600,00	46.738.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.000.000,00	84.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	17.500.000,00	

Program	: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
Indikator Hasil	: Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri
Kegiatan	: 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase dokumen Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Kegiatan	: 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.033.283.000,00	4.783.283.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.080.000,00	24.310.000,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan komponen instalasi listrik penerangan kantor			
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	18.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.354.000,00	3.354.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.113.000,00	240.513.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.819.550,00	6.819.550,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	4.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.370.000,00	75.370.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.900.000,00	140.300.000,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.407.850,00	82.407.850,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.970.000,00	19.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
Indikator Hasil	: Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.794.120.000,00	3.854.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.620.000,00	409.820.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	225.000.000,00	
Program	: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
Indikator Hasil	: Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			
Kegiatan	: 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
Sub Kegiatan	: 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0001 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat			
Program	: 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
Indikator Hasil	: Prosentase jumlah transmigran yang ditempatkan			
Kegiatan	: 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase Calon Transmigrasi Yang Difasilitasi			
Sub Kegiatan	: 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.928.750,00	23.928.750,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	24.127.464.000,00	23.327.464.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.679.930.000,00	7.000.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	832.070.000,00	832.070.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	825.480.000,00	880.080.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0001 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat			
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			
Kegiatan	: 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	587.385.000,00	898.205.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.790.000,00	2.790.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.506.000,00	109.946.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.331.918.800,00	20.303.718.800,00	
5.1.05	Belanja Hibah	5.105.000.000,00	4.585.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.641.500,00	13.816.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.167.250,00	7.439.250,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.337.550,00	128.237.550,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.996.450,00	541.996.450,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.970.900,00	239.070.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.205.000,00	35.365.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0002 Asisten Perekonomian dan Pembangunan			
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indikator Hasil	: Cakupan pelayanan fasilitasi administrasi perekonomian dan pembangunan			
Kegiatan	: 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.320.000,00	6.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.655.000,00	245.655.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.390.200,00	6.990.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.756.000,00	20.756.000,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.512.000,00	44.512.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.864.350,00	74.864.350,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.230.000,00	61.430.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.800.000,00	73.800.000,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.967.100,00	46.167.100,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.610.000,00	83.610.000,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	8.347.500,00	8.347.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.820.000,00	133.320.000,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.855.000,00	5.855.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0003 Asisten Administrasi Umum			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.080.000,00	219.100.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.000,00	45.625.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	807.283.100,00	389.298.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.787.800,00	75.787.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.565.900,00	80.558.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.356.071.200,00	1.502.513.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.882.500,00	67.882.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	1.150.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	2.306.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	380.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	200.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	692.975.000,00	865.671.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	781.000.000,00	978.200.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	50.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.529.000,00	563.323.850,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	874.392.250,00	814.611.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.600.000,00	99.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	40.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	150.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	505.990.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	153.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	980.000.000,00	980.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000.000,00	720.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Penataan Organisasi			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.543.800,00	111.943.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.700.000,00	23.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.645.000,00	69.645.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.859.000,00	24.859.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.305.350,00	69.205.350,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.937.500,00	31.937.500,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.004.953.250,00	2.438.753.250,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.233.600,00	469.043.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.244.050,00	37.204.050,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD			
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD			
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD			
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Meningkatnya indek Repormasi Birokrasi			
Kegiatan	: 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.943.240.000,00	3.938.240.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen Bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Paket logistik Kantor yang disediakan undefined			

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.375.000,00	6.375.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.801.600,00	376.676.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.360.000,00	78.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.100.000,00	513.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.750.000,00	182.373.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan Mesin dan Sarana Prasarana Kantor yang diadakan			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	145.356.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	460.021.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Umum yang disediakan			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	270.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.791.600.000,00	1.878.400.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Angkutan dan peralatan Mesin yan terpelihara			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.054.600,00	187.131.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.530.000,00	124.530.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	150.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang menerima Pakaian dan Atributnya			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	22.477.014.000,00	23.571.370.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.000.000,00	510.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	300.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.805.800,00	53.805.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.605.040.000,00	11.119.040.000,00	
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Prosentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			
Kegiatan	: 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.300.000,00	135.300.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen hasil pendalaman tugas DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.433.100.000,00	2.433.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.250.000,00	41.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.214.300.000,00	1.367.300.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses			
Indikator Keluaran	: Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.090.440.000,00	2.125.440.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN			
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.575.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.600.867.700,00	4.720.867.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.150.000,00	21.650.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.162.600,00	1.162.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.254.400,00	1.254.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.096.600,00	71.559.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.107.350,00	12.107.350,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	67.629.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.600.000,00	106.173.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.500.000,00	166.760.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.977.100,00	108.204.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	14.200.000,00	
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan			
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
Indikator Keluaran	: Persentase koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan Pembangunan daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.459.000,00	425.459.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.740.000,00	4.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.990.000,00	6.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.300.000,00	186.100.000,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	1.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	20.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.404.000,00	2.404.000,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen hasil pengendalian,evaluasi dan pelaporan yang tersusun			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.460.000,00	18.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.330.000,00	41.830.000,00	
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Keselarasan antar dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.085.000,00	103.485.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.085.000,00	28.485.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.855.000,00	24.255.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.620.000,00	2.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayanan			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.630.000,00	24.030.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.220.000,00	28.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN			
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	17.409.356.143,00	11.830.342.168,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.882.000,00	3.882.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.139.200,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.036.828.300,00	1.016.634.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.119.500,00	63.931.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.369.100,00	128.369.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.421.000,00	317.626.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.200.000,00	100.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.080.000,00	480.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.884.750,00	302.939.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.250.000,00	66.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
Indikator Keluaran	: Pesentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.950.000,00	23.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	11.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.852.100,00	2.852.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.968.000,00	146.108.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.674.850,00	71.674.850,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.674.650,00	19.674.650,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	638.400.000,00	588.900.000,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.780.000,00	168.717.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.892.500,00	223.607.500,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah			

Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	154.769.555.200,00	139.919.558.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.227.335.462,00	2.164.338.329,66	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.845.170.400,00	12.845.170.400,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.800.000,00	62.800.000,00	
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Kegiatan	: 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Harga yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.900.000,00	215.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.491.000,00	4.491.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.730.000,00	4.430.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.250.000,00	95.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.050.000,00	52.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.301.000,00	103.900.650,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase PAD terhadap Pendapatan			
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.671.000,00	319.821.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	414.400.000,00	414.400.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	545.654.500,00	511.594.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	814.110.000,00	814.110.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	743.755.000,00	910.515.000,00	
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN			
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.332.500,00	1.332.500,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.007.153.000,00	5.417.153.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.000,00	390.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	585.000,00	585.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.640.000,00	15.640.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.109.800,00	1.109.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	895.200,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.282.500,00	77.282.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	675.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.340.000,00	5.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.100.000,00	26.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.900.000,00	179.400.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.597.500,00	97.277.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	3.530.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.13 Penataan Organisasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Organisasi yang tertata			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	875.000,00	875.000,00	
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Pelayanan			
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.562.500,00	54.462.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.227.500,00	16.227.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.283.000,00	21.783.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.837.500,00	21.337.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.945.000,00	3.945.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Persentase Layanan Aparatur			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.392.500,00	26.392.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.960.000,00	44.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.050.000,00	28.050.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.187.500,00	39.187.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.414.000,00	120.214.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.574.000,00	2.574.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.067.500,00	21.067.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.248.000,00	0,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			

Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
Indikator Hasil	: Persentase ASN mendapatkan Pendidikan Diklat			
Kegiatan	: 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis			
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565.955.500,00	736.930.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.177.500,00	0,00	
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah			
Unit Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah			
Program	: 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	

Kegiatan	: 5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: JUmlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	790.132.000,00	1.140.132.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.215.000,00	1.215.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: JUmlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.878.900,00	1.878.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.107.600,00	2.107.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.224.800,00	36.224.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.566.000,00	2.566.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.542.000,00	31.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.430.000,00	4.430.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.560.000,00	54.600.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.555.700,00	46.555.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	3.570.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Presentase Penelitian dan pengembangan Daerah undefined			
Kegiatan	: 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.337.100,00	341.897.100,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan di Bidang sosial dan kependudukan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembagan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Inovasi dan teknologi yang telah di uji cobakan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.358.800,00	114.478.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.629.400,00	45.011.400,00	

BELANJA DAERAH	
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.906.042.000,00	11.306.042.000,00	

Kegiatan	: 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Pendidikan dan Pelatihan
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.384.400.000,00	1.136.400.000,00	

Kegiatan	: 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.068.400,00	1.068.400,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.111.800,00	135.531.800,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.035.500,00	8.035.500,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	4.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Umum			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.642.800,00	161.031.100,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.892.000,00	155.081.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.750.000,00	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.966.800,00	133.466.800,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.898.900,00	175.448.200,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.410.000,00	29.410.000,00	
Program	: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
Indikator Hasil	: Cakupan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan KDH (Tindak Lanjut)			
Kegiatan	: 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil Pengawasan Internal			
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.520.000,00	122.320.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.200.000,00	105.200.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.315.500,00	73.315.500,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.684.500,00	26.684.500,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.510.000,00	72.510.000,00	
Kegiatan	: 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pegawasan dengan Tujuan Tertentu			
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.200.000,00	33.000.000,00	
Program	: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
Indikator Hasil	: Prosentase Monev,Koordinasi,Pendampingan,Asistensi dan Verifikasi Pengawasan (MCP)			
Kegiatan	: 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi			
Indikator Keluaran	: Pendampingan,Asistensi,Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.120.000,00	66.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.380.000,00	380.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.950.000,00	80.950.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN			
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN			
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Bangli			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Bangli			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.827.500,00	387.500,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.533.322.000,00	6.373.322.000,00	

Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan Jumlah/Jenis instalasi listrik Bangunan ktr yang tersedia Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.832.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.318.700,00	347.378.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.302.400,00	11.804.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	4.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.685.000,00	61.735.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.516.146.000,00	1.541.866.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.584.900,00	67.584.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.360.000,00	11.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	200.000.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Prosentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamat			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	3.880.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.527.500,00	25.107.500,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.695.000,00	362.592.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.550.000,00	406.881.210,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.050.000,00	371.616.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.835.200,00	450.105.075,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	9.030.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan umum			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.482.000,00	32.062.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.705.000,00	4.285.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kintamani			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kintamani			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	720.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.010.000,00	16.010.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.300.677.000,00	2.950.677.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.280.800,00	238.780.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.300.000,00	80.920.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.273.250,00	170.773.250,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.142.800,00	7.142.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.365.200,00	118.865.200,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen dan laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.860.000,00	1.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.114.000,00	62.614.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			

Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.224.400,00	39.724.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Prosentase program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.816.800,00	76.816.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Susut			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Susut			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.939.162.000,00	3.079.162.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	946.200,00	1.186.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.659.600,00	213.709.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.350.400,00	7.352.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.121.000,00	22.390.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat /Bahan untuk kegiatan Kantor(Benda Pos) Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.310.000,00	3.310.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.650.000,00	67.648.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.480.000,00	16.980.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perijinan kendaraan dinas Operasional Lapangan Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya JumlahPemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.124.250,00	56.114.250,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.390.000,00	4.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: prosentase pelayan publik yang dilakukan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.710.000,00	3.700.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.230.000,00	47.220.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.610.000,00	48.600.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra Suku,Umat berAgama ,Ras dan Golongan lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan lokal Regional dan Nasional			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.768.050,00	10.758.050,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.100.000,00	24.600.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Tembuku			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Tembuku			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.784.385.000,00	3.534.385.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.820.000,00	2.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.459.000,00	3.459.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.197.800,00	3.197.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.114.700,00	128.114.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.450.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	250.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.516.000,00	17.966.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.700.000,00	101.320.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.603.200,00	70.603.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Prosentase penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik			
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	4.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	4.760.000,00	

Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.640.000,00	38.640.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	4.760.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	4.760.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator Hasil	: persentase laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan	: 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.702.060.000,00	3.712.060.000,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.085.000,00	29.745.000,00	

Kegiatan	: 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.386.200,00	1.386.200,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.863.200,00	12.863.200,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.498.000,00	54.800.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.530.000,00	3.893.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.270.000,00	5.270.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.250.000,00	31.250.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.657.600,00	79.819.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.060.000,00	10.060.000,00	
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Masyarakat dalam Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa			
Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	955.415.450,00	958.915.450,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.647.500,00	21.647.500,00	
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
Indikator Hasil	: Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik			
Kegiatan	: 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			

Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	803.894.932,00	803.894.932,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.050.000,00	101.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.995.000,00	13.265.000,00	
Program	: 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat			
Kegiatan	: 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
Sub Kegiatan	: 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**		**DASAR HUKUM**
		SEBELUM	**SESUDAH**	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.938.000,00	12.300.000,00	

Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Indikator Hasil	: Persentase Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya
Kegiatan	: 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.605.000,00	25.605.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	

Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Indikator Hasil	: Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan
Kegiatan	: 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.068.550,00	84.068.550,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.825.000,00	131.325.000,00	

PEMBIAYAAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	27.500.000.000,00	14.199.120.370,81	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.500.000.000,00	14.199.120.370,81	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.500.000.000,00	12.962.764.660,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12.500.000.000,00	11.962.764.660,00	

Kab. Bangli, 2 September 2025

Bupati

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Lampiran IV : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 2 September 2025

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN

KABUPATEN BANGLI

TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)											
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen											
1	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	34.000.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	40.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen											
2	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1723 Orang/bulan	233.152.749.000,00	225.191.852.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.152.749.000,00	225.191.852.060,00	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Retribusi Daerah - LRA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksannya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen											
3	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	48.480.000,00	30.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.480.000,00	30.960.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen											
4	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.730.800,00	6.730.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730.800,00	6.730.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
5	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.142.800,00	3.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142.800,00	3.842.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
6	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	257.072.800,00	238.747.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.072.800,00	238.747.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
7	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	33.334.750,00	36.034.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.334.750,00	36.034.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
8	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.000,00	3.510.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
9	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
10	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	99.500.000,00	102.900.000,00	32.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000.000,00	120.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
11	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
12	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	113.786.000,00	165.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.786.000,00	165.186.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
13	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	804.200.000,00	940.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.200.000,00	940.480.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
14	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	252.528.250,00	256.438.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.528.250,00	256.438.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
15	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	46.840.000,00	52.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.840.000,00	52.890.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
16	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Porsentase Kualitas Pengelolaan Pendidikan	88 Persen											
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-											
17	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	0,00	0,00	419.000.000,00	650.469.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000.000,00	650.469.428,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
18	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
19	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah													
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	226.388.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.388.357,00	- Dana Alokasi Umum (DAU)
20	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	65 Unit	0,00	0,00	8.904.500.000,00	3.439.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904.500.000,00	3.439.750.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
21	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	0,00	351.000.000,00	183.424.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000.000,00	183.424.243,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
22	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	4.700.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.861,00	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
23	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah													
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	0,00	0,00	0,00	43.598.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.598.333,00	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
24	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 Peserta Didik	127.917.500,00	5.067.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.917.500,00	5.067.500,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
25	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	422 Orang	7.525.000.000,00	8.883.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525.000.000,00	8.883.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
26	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	197 Satuan Pendidikan	19.400.100,00	19.400.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400.100,00	19.400.100,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
27	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	163 Satuan Pendidikan	21.242.380.370,00	19.867.382.936,00	2.256.644.230,00	3.381.527.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.499.024.600,00	23.248.910.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
28	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar													
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 Ruang	0,00	0,00	200.000.000,00	808.904.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	808.904.604,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
29	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	0,00	0,00	3.625.000.000,00	1.512.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625.000.000,00	1.512.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
30	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
31	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan													
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	0,00	30.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.082.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
32	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik													
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
33	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	421.800.000,00	421.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.800.000,00	421.800.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
34	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	0,00	0,00	1.854.000.000,00	613.060.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.000.000,00	613.060.920,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
35	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	0,00	3.385.500,00	2.347.500.000,00	1.702.541.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347.500.000,00	1.705.927.191,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
36	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
37	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	75 Ruang	0,00	0,00	1.271.000.000,00	5.847.766.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.000.000,00	5.847.766.466,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
38	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	160 Peserta Didik	88.696.000,00	88.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.696.000,00	88.696.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	88 Persen											
39	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium													
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
40	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	0,00	0,00	1.306.000.000,00	1.296.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.000.000,00	1.296.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
41	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	192.112.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.112.935,00	- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
42	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah													
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
44	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	0,00	0,00	253.000.000,00	237.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000.000,00	237.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
45	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket	0,00	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
46	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	202 Peserta Didik	161.304.000,00	161.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.304.000,00	161.304.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
47	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	253 Orang	4.182.500.000,00	4.879.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182.500.000,00	4.879.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
48	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	26 Satuan Pendidikan	13.325.554.885,00	13.134.830.842,00	1.309.630.515,00	1.776.459.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.635.185.400,00	14.911.290.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
49	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
50	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
51	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen	19.999.800,00	19.999.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999.800,00	19.999.800,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
52	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	0,00	26.935.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.935.500,00	- Dana Bagi Hasil (DBH)
53	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	202 Satuan Pendidikan	18.138.400,00	18.138.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.138.400,00	18.138.400,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
54	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	0,00	0,00	1.100.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	200.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
55	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
56	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik													
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
57	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	399.800.000,00	399.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.800.000,00	399.800.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
58	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	88 Persen											
59	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
60	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD													
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	0,00	0,00	299.974.000,00	299.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.974.000,00	299.974.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
61	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD													
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3587 Peserta Didik	2.567.400.000,00	2.411.057.400,00	0,00	159.742.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567.400.000,00	2.570.800.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD DAK Non Fisik-BOP PAUD Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD Dana Alokasi Umum (DAU)
62	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	155 Orang	2.905.000.000,00	3.398.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905.000.000,00	3.398.500.000,00	Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
63	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
64	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD													
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	13 Satuan Pendidikan	216.800.000,00	53.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.800.000,00	53.600.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
65	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	87.530.000,00	98.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.530.000,00	98.490.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
66	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
67	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0,00	0,00	0,00	137.958.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.958.650,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	88 Persen											
68	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 orang Peserta Didik	83.550.000,00	86.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.550.000,00	86.950.000,00	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan Dana Alokasi Umum (DAU)
69	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	3 Satuan Pendidikan	22.153.700,00	15.585.700,00	22.380.000,00	22.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.533.700,00	37.933.700,00	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya Porsentase Pengembangan Kurikulum	97 Persen											
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Muatan Lokas Pendidikan Dasar	97 Persen											
70	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	10 Orang	30.591.000,00	21.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.591.000,00	21.691.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Prosentase Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100 Persen											
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksannya Pendidikan dan Tenaga Pendidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang adil dan Merata	100 Persen											
71	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	30.877.500,00	29.367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.877.500,00	29.367.500,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
72	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7 Laporan	90.177.000,00	177.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.177.000,00	177.587.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-											
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Lembaga PAUD dan Nonformal												
73	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Berbasis Keagamaan Pada Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Dalam Bentuk Pesraman	58 Persen											
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Telaksanya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	58 Persen											
74	1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Peserta Didik	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Partisipasi Kepemudaan	100 Persen											
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terwujudnya pengembangan kepeloporan pemuda untuk mendorong kreatifitas, inovasi, terobosan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah dan nasional	100 Persen											
75	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota													
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	186.292.800,00	212.322.800,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.892.800,00	212.322.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
76	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota													
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya prosentase perolehan medali pada event tingkat provinsi, nasional dan Internasional	100 Persen											
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya Pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan , kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.	100 Persen											
77	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota													
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Memasyarakatkan Olahraga, menjaring bibit atlet potensial, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan prestasi olahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan kesehatan nasional.	100 Persen											
78	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga													
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	20 Orang	981.514.000,00	2.290.820.250,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.014.000,00	2.308.320.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terwujudnya Olahraga Prestasi melalui Pembinaan dan Pengembangan Olahraga secara terencana,sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.	100 Persen											
79	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota													
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	30 Orang	1.500.000.000,00	3.612.250.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	3.612.250.300,00	Hibah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Hibah
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatkan Kesehatan, Kebugaran, Rekreasi dan Kesenangan Masyarakat melalui Olahraga	100 Persen											
80	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan													
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	0,00	289.883.040,00	0,00	1.680.556.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.439.552,00	- Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya Pembinaan Kepramukaan	100 Persen											
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Mewujudkan Generasi yang tangguh, Berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air yang ditujukan pada setiap kegiatan	100 Persen											
81	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah													
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Hibah Hibah
		Dinas Kesehatan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen											
82	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
83	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	42.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.560.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
84	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6524 Orang/bulan	48.555.179.000,00	48.555.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.555.179.000,00	48.555.179.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Lain-lain PAD Yang Sah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Lain-lain PAD Yang Sah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
85	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	143.220.000,00	124.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.220.000,00	124.080.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksannya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan											
86	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	112.060.000,00	79.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.060.000,00	79.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan											
87	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
88	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	77.060.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.060.000,00	41.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 dokumen											
89	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.425.500,00	7.425.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425.500,00	7.425.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
90	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
91	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.693.200,00	7.693.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693.200,00	7.693.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
92	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	201.587.100,00	162.611.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.587.100,00	162.611.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
93	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.734.500,00	21.973.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.734.500,00	21.973.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
94	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.520.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520.000,00	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28 Unit											
95	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	0,00	0,00	45.937.500,00	45.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.937.500,00	45.937.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
96	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	0,00	0,00	62.600.200,00	140.338.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600.200,00	140.338.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan											
97	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
98	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	307.449.500,00	286.449.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.449.500,00	286.449.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
99	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.400.000,00	36.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400.000,00	36.480.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49 unit											
100	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	284.958.000,00	268.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.958.000,00	268.007.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
101	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
102	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	27.600.000,00	28.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600.000,00	28.070.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
103	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	95 Persen											
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	95 Persen											
104	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas													
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
105	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas													
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
106	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	33.100.000,00	25.601.250,00	444.303.900,00	420.525.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.403.900,00	446.126.380,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
107	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	0,00	22.700.000,00	198.000.000,00	598.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000.000,00	620.858.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
108	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
109	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
110	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
111	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
112	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	131 Unit	63.301.200,00	63.301.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.301.200,00	63.301.200,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
113	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	7 Paket	4.923.145.317,00	5.155.184.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.145.317,00	5.155.184.837,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
114	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga													
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
115	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	129.000.000,00	142.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000.000,00	142.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen											
116	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3656 Orang	365.775.000,00	136.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.775.000,00	136.725.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
117	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3490 Orang	84.325.000,00	84.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.325.000,00	84.325.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
118	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3324 Orang	249.997.000,00	249.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.997.000,00	249.997.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
119	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16046 Orang	25.625.000,00	25.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.625.000,00	25.625.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
120	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33398 Orang	99.025.000,00	19.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.025.000,00	19.025.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
121	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68418 Orang	92.250.000,00	46.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250.000,00	46.150.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
122	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40822 Orang	177.213.000,00	136.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.213.000,00	136.893.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
123	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9684 Orang	42.475.000,00	42.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.475.000,00	42.475.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
124	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2097 Orang	27.475.000,00	27.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.475.000,00	27.475.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
125	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	602 Orang	12.475.000,00	12.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.475.000,00	12.475.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
126	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	972 Orang	201.525.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.525.000,00	2.475.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
127	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2971 Orang	50.475.000,00	50.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.475.000,00	50.475.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
128	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
129	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	350.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	550.000.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
130	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	2.500.000.000,00	50.476.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	50.476.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
131	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400.000,00	83.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
132	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	90.920.000,00	90.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.920.000,00	90.920.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
133	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	309.730.000,00	309.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.730.000,00	309.730.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
134	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
135	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52 Dokumen	336.560.000,00	336.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.560.000,00	336.560.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
136	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
137	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	25 Orang	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
138	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
139	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	779.613.500,00	779.613.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.613.500,00	779.613.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
140	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	33.751.341.980,00	44.531.295.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.751.341.980,00	44.531.295.225,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
141	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	3.808.000,00	3.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808.000,00	3.808.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
142	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
143	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
144	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya -
145	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	149.275.000,00	166.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.275.000,00	166.275.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
146	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
147	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
148	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
149	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)													
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
150	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	61 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
151	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
152	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
153	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok													
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan	27.475.000,00	27.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.475.000,00	27.475.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
154	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
155	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
156	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	119.390.000,00	119.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.390.000,00	119.390.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	95 Persen											
157	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	79.774.083,00	79.774.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.774.083,00	79.774.083,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbitnya izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen											
158	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	25 Unit	1.022.100.000,00	1.190.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.100.000,00	1.190.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	89 Persen											
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya perizinan praktek tenaga kesehatan	89 Persen											
159	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	14.800.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	7.200.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pajak Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan	89 Persen											
160	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
161	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
162	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	98.271.000,00	98.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.271.000,00	98.271.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	89 Persen											
163	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	704.010.000,00	711.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.010.000,00	711.010.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	95 Persen											
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terbitnya izin Apotek, Toko Obat, Alat Kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional	95 %											
164	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	91.626.000,00	91.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.626.000,00	91.626.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terbitya sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	95 Persen											
165	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	183.771.500,00	183.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.771.500,00	183.771.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terbitnya sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	95 Persen											
166	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pemeriksaan post market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	95 Persen											
167	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan													
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	46 Unit	183.392.500,00	183.392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.392.500,00	183.392.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	95 Persen											
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen											
168	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen											
169	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen											
170	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	213.925.000,00	213.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.925.000,00	213.925.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
		Puskesmas Bangli													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
171	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.295.800.000,00	1.346.654.972,79	80.000.000,00	139.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.800.000,00	1.486.505.972,79	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	95 Persen											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	95 Persen											
172	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	16.020.000,00	16.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020.000,00	16.020.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
173	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1836 Orang	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600.000,00	29.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
174	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24 Orang	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
175	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	139.678.500,00	139.678.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.678.500,00	139.678.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
176	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
177	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
178	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4 Orang	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
179	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
180	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	107.860.000,00	107.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.860.000,00	107.860.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
181	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
182	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
183	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7 Orang	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
184	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	10 Dokumen	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
185	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	50 Dokumen	68.040.000,00	68.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.040.000,00	68.040.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
186	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terrsedianya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	95 Persen											
187	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440.000,00	13.440.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	95 Persen											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen											
188	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Bangli Utara													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
189	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.054.100.000,00	1.103.480.786,31	163.600.000,00	202.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.700.000,00	1.306.080.786,31	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	95 Persen											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	95 Persen											
190	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1122 Orang	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
191	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1300 Orang	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
192	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75 Orang	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
193	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
194	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	75 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
195	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	170 Dokumen	224.183.000,00	224.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.183.000,00	224.183.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
196	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
197	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900.000,00	13.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
198	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	50 Dokumen	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400.000,00	25.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
199	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22 Orang	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
200	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	130 Dokumen	54.100.000,00	54.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100.000,00	54.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
201	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	260 Dokumen	132.980.000,00	132.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.980.000,00	132.980.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
202	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
203	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
204	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	5 Dokumen	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
205	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
206	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200.000,00	31.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	95 Persen											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	95 Persen											
207	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 bulan Dokumen	12.520.000,00	12.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520.000,00	12.520.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Susut I													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.533.700.000,00	1.541.403.497,00	79.000.000,00	209.004.575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.700.000,00	1.750.408.072,79	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	95 Persen											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	95 Persen											
209	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
210	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	362 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
211	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1775 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
212	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1783 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
213	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2814 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
214	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3820 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
215	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6455 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
216	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	486 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
217	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	98 Orang	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
218	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	231 Orang	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	9.250.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
219	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	378 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
220	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	197.678.500,00	197.678.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.678.500,00	197.678.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
221	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10 Dokumen	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
222	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
223	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
224	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
225	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
226	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	73 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
227	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	44.050.000,00	44.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.050.000,00	44.050.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
228	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	231 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
229	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	126.764.000,00	126.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.764.000,00	126.764.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
230	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
231	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
232	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
233	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok													
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
234	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
235	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
236	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
237	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	52.150.000,00	52.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.150.000,00	52.150.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
238	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	95 Persen											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	95 Persen											
239	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	6.836.000,00	6.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836.000,00	6.836.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Susut II													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
240	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.280.500.000,00	1.430.133.544,46	123.200.000,00	244.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.700.000,00	1.674.333.544,46	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan Dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	95 Persen											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen											
241	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.750.000,00	31.750.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
242	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
243	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5 Orang	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
244	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
245	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	207.378.500,00	207.378.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.378.500,00	207.378.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
246	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
247	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
248	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250.000,00	18.250.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
249	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
250	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.950.000,00	37.950.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
251	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	30 Dokumen	113.870.000,00	113.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.870.000,00	113.870.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
252	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
253	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
254	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
255	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800.000,00	50.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	95 Persen											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen											
256	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	17.930.000,00	17.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.930.000,00	17.930.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Tembuku I													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
257	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.305.700.000,00	1.321.332.825,43	168.700.000,00	498.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.400.000,00	1.820.032.825,43	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	95 Persen											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen											
258	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	247 Orang	26.580.000,00	26.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.580.000,00	26.580.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
259	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
260	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
261	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1650 Orang	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
262	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
263	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
264	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	52 Orang	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
265	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17 Orang	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
266	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
267	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	130 Dokumen	172.778.000,00	172.778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.778.000,00	172.778.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
268	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	114 Dokumen	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
269	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	54 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
270	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	532 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
271	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	123 Dokumen	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
272	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	160 Orang	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
273	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	234 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
274	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	453 Dokumen	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
275	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	476 Dokumen	114.100.000,00	114.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.100.000,00	114.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
276	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
277	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
278	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
279	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
280	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	118 Dokumen	21.370.000,00	21.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.370.000,00	21.370.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
281	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	28 Dokumen	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
282	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	48 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
283	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	618 Dokumen	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800.000,00	61.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
284	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	95 Persen											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	95 Persen											
285	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	77 Dokumen	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Tembuku II													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
286	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.484.500.000,00	1.499.604.317,41	70.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.500.000,00	1.619.604.317,41	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan Dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	95 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen											
287	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	240 Orang	18.160.000,00	18.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.160.000,00	18.160.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
288	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
289	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
290	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
291	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1857 Orang	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
292	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
293	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
294	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
295	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
296	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	282 Orang	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
297	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	39 Orang	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
298	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
299	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
300	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2210 Dokumen	195.278.500,00	195.278.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.278.500,00	195.278.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
301	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
302	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	90 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
303	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
304	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	180 Dokumen	22.785.000,00	22.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.785.000,00	22.785.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
305	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	54 Orang	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
306	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	516 Dokumen	51.515.000,00	51.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.515.000,00	51.515.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
307	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	96 Dokumen	123.430.000,00	123.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.430.000,00	123.430.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
308	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
309	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
310	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
311	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	4 Orang	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
312	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	6 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
313	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	5 Dokumen	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
314	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
315	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	428 Dokumen	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
316	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	95 Persen											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kot	95 Persen											
317	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9 Dokumen	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470.000,00	6.470.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Kintamani I													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	95 persen											
318	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.436.928.500,00	1.499.735.294,58	161.771.500,00	365.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.700.000,00	1.865.506.794,58	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
319	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga													
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	160 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	95 PERSEN											
320	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256 Orang	39.050.000,00	39.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.050.000,00	39.050.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
321	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
322	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
323	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
324	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3525 Orang	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
325	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
326	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	44 Orang	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
327	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8 Orang	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
328	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
329	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	208.200.000,00	208.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.200.000,00	208.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
330	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
331	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
332	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
333	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
334	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
335	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	52 Orang	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
336	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
337	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	40.700.000,00	40.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700.000,00	40.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
338	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	7 Dokumen	137.300.000,00	137.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.300.000,00	137.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
339	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	3 Dokumen	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
340	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
341	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	6 Dokumen	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
342	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	6 Dokumen	59.800.000,00	59.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800.000,00	59.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	95 persen											
343	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	95 Persen											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 persen											
344	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Kintamani II													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
345	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	922.262.002,00	1.214.207.434,72	125.637.998,00	291.792.632,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.900.000,00	1.506.000.067,14	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan Dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	95 Persen											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen											
346	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	348 Orang	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200.000,00	39.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
347	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3116 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
348	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	328 Orang	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
349	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8895 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
350	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	311 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
351	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
352	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28 Orang	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
353	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	187.878.500,00	187.878.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.878.500,00	187.878.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
354	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
355	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	25 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
356	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	50 Dokumen	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
357	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	35 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
358	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	18 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
359	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	76 Dokumen	72.700.000,00	72.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700.000,00	72.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
360	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	37 Dokumen	136.100.000,00	136.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.100.000,00	136.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
361	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
362	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
363	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	35 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
364	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
365	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
366	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700.000,00	47.700.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
367	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Kintamani III													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
368	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	911.443.000,00	1.030.201.552,09	175.957.000,00	250.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.400.000,00	1.280.858.552,09	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan Dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	95 Persen											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen											
369	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	240 Orang	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
370	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1506 Orang	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600.000,00	31.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
371	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	31 Orang	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
372	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
373	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	185.528.500,00	185.528.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.528.500,00	185.528.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
374	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
375	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
376	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
377	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	33 Orang	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
378	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	61.750.000,00	61.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.750.000,00	61.750.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
379	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	124.600.000,00	124.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.600.000,00	124.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
380	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3 Orang	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
381	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
382	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Kali Dokumen	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
383	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
384	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	55.600.000,00	55.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600.000,00	55.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	95 Persen											
385	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Kintamani IV													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
386	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	856.392.000,00	905.621.871,50	42.208.000,00	98.222.079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	898.600.000,00	1.003.843.950,87	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan Dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	95 Persen											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen											
387	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	215 Orang	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300.000,00	51.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
388	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	213 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
389	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
390	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
391	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1061 Orang	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
392	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
393	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
394	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
395	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
396	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	37 Orang	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
397	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200.000,00	24.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
398	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
399	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
400	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	157.078.500,00	157.078.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.078.500,00	157.078.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
401	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Dokumen	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
402	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
403	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
404	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7.849.500,00	7.849.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849.500,00	7.849.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
405	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	31 Orang	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
406	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	54.550.500,00	54.550.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.550.500,00	54.550.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
407	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	115.440.000,00	115.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.440.000,00	115.440.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
408	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
409	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
410	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	11 Orang	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
411	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
412	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
413	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
414	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300.000,00	29.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
415	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-											
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
416	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
417	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen											
418	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760.000,00	8.760.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Kintamani V													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
419	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.672.446.000,00	1.683.697.829,13	92.054.000,00	92.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.500.000,00	1.775.751.829,13	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan Dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	95 Persen											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan untuk UKM dan UKP	959 %											
420	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37400 Orang	46.210.000,00	46.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.210.000,00	46.210.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
421	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1215 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
422	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4115 Orang	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
423	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2500 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
424	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	180 Orang	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
425	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
426	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	240.800.000,00	240.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800.000,00	240.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
427	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
428	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
429	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
430	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	42.150.000,00	42.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.150.000,00	42.150.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
431	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	137.300.000,00	137.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.300.000,00	137.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
432	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
433	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1358 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
434	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
435	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540.000,00	6.540.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
436	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
437	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.100.000,00	71.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
438	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
		Puskesmas Kintamani VI													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
439	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.202.780.000,00	1.318.008.616,34	107.920.000,00	114.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.700.000,00	1.432.528.616,34	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan Dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	95 Persen											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen											
440	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	184 Orang	14.805.000,00	14.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805.000,00	14.805.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
441	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
442	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
443	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2053 Orang	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
444	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
445	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
446	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
447	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
448	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
449	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36 Dokumen	177.619.500,00	177.619.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.619.500,00	177.619.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
450	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
451	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
452	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
453	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
454	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	18 Orang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
455	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
456	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	99.564.000,00	99.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.564.000,00	99.564.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
457	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
458	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	40 Dokumen	109.471.500,00	109.471.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.471.500,00	109.471.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
459	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
460	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
461	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	10.152.000,00	10.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152.000,00	10.152.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
462	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	48 Dokumen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
463	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	6 Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	95 Persen											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	95 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
464	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20 Dokumen	11.389.500,00	11.389.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389.500,00	11.389.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Rumah Sakit Umum Daerah													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
		[object Object]	-	-											
		[object Object]	-	-											
465	1.02.01.2.02.0001	[object Object]													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	455 Orang/bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 %											
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	455 orang											
466	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	455 Orang/bulan	47.413.060.000,00	47.293.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.413.060.000,00	47.293.060.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya Pelayanan BLUD	100 %											
467	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	78.658.362.366,00	81.021.625.642,13	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.858.362.366,00	86.221.625.642,13	- Pendapatan dari BLUD - Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %											
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1 unit											
468	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya													
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	4.331.637.634,00	3.439.655.018,00	5.578.057.000,00	5.578.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909.694.634,00	9.017.712.018,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan Pendapatan dari BLUD DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan Pendapatan dari BLUD
469	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	0,00	0,00	4.273.392.000,00	4.273.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273.392.000,00	4.273.392.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
470	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	100 %											
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kompetensi Teknis SDM Kesehatan sesuai standar	100 %											
471	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	10 Orang	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 %											
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 kali											
472	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113 Orang/bulan	12.249.371.000,00	11.799.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.249.371.000,00	11.799.371.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 dokumen											
473	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.187.000,00	7.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187.000,00	7.187.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
474	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
475	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	350.250.200,00	357.250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.250.200,00	357.250.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
476	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.815.000,00	40.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.815.000,00	40.815.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
477	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00	3.720.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
478	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
479	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar													
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
480	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Paket											
481	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	17.680.000,00	17.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680.000,00	17.680.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
482	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	53.150.000,00	53.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150.000,00	53.150.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
483	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	20.041.600,00	20.041.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.041.600,00	20.041.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146 Paket											
484	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	74 Unit	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800.000,00	46.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
485	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	472.653.150,00	392.343.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.653.150,00	392.343.150,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
486	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar													
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	14 Unit	610.443.000,00	554.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.443.000,00	554.435.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah Retribusi Jasa Usaha Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah Retribusi Jasa Usaha
487	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	31.640.000,00	31.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.640.000,00	31.640.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
488	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	86.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.742.000,00	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	16,83 %											
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	0,625 Km undefined undefined											
489	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,6 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
490	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,625 KM	22.420.000,00	0,00	4.474.460.000,00	777.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496.880.000,00	777.777.000,00	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
491	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi													
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	2 Bendung	30.000.000,00	0,00	3.755.474.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.474.800,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
492	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.9 KM	351.207.900,00	353.398.000,00	496.864.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.072.200,00	353.398.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Pajak Daerah
493	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa													
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase penduduk berakses air minum	90,8 %											
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 LITER/DETIK											
494	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	486.847.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.847.200,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya -
495	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik	5.090.816.981,00	5.683.619.406,00	82.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173.516.981,00	5.683.619.406,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Air Permukaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Air Permukaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase rumah tinggal bersanitasi layak	90,80 %											
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan sistem Air Limbah Domestik Daerah Kabupaten /Kota	80 Unit											
496	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman													
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	500 M³/Hari	2.310.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.000.000,00	330.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
497	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	4 Dokumen	0,00	0,00	100.000.000,00	248.701.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	248.701.150,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase Jaringan Drainase dalam kondisi baik	24.47 %											
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota												
498	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan													
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Ber - IMB persatuan Bangunan	2,02 %											
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2 Paket											
499	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	230.000.000,00	1.154.409.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	2.154.409.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
500	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung													
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
501	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG													
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	70 Dokumen	438.100.000,00	444.900.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.100.000,00	994.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Retribusi Jasa Usaha Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Retribusi Jasa Usaha
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dokumen Penyusunan Perencanaan Penataan Kota	19,53 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2 paket											
502	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya													
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	0 Kawasan	0,00	23.040.000,00	0,00	1.947.837.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.877.140,00	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
503	1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya													
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
504	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Panjang Jalan Kondisi Baik	23,38 %											
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	15 Paket											
505	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan													
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	45.515 KM	139.840.000,00	186.000.000,00	9.547.800.000,00	117.839.712.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.687.640.000,00	118.025.712.200,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah
506	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	0 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
507	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	0 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
508	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	0 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
509	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan													
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	999 KM	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
510	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan													
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	80.414 KM	4.714.199.800,00	4.982.721.260,00	203.200.200,00	295.020.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917.400.000,00	5.277.741.660,00	Opsen PKB Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Opsen PKB Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	67 %											
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Tenaga yang Terampil	100 %											
511	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis													
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	90 Orang	29.265.000,00	49.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.265.000,00	49.265.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Tenaga yang Terampil	100 %											
512	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	0 Paket Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase ruang publik umum yang nyaman dan aman	15,39 %											
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	"Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota"	1 Dokumnen											
513	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang													
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.510.000,00	16.920.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.510.000,00	116.920.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
514	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
515	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
516	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota												
517	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang													
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen											
518	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang													
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	100 Layanan	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	70.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen											
519	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang													
			Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	0 Kasus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
520	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK													
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	64.500.000,00	71.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500.000,00	71.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah Layak Huni	22,89 %											
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-											
521	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani													
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	6,00 Unit											
522	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	0 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
523	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana													
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	9 Unit Rumah	350.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	180.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-											
524	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio Rumah Layak Huni	24,45 %											
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha												
525	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh													
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	66,00 Unit											
526	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni													
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	55 Unit Rumah	5.801.620.000,00	814.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801.620.000,00	814.840.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah Pajak Rokok
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	23,58 %											
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan, Perumahan, dan kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah kabupaten/Kota	16 Unit											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
527	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10 %											
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tertatanya Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi											
528	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian													
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	18 Lokasi	0,00	5.655.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655.000.000,00	- Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
		Satuan Polisi Pamong Praja													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pelaksanaan pelayanan adminsitrasi Perkantoran	100 %											
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
529	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	66.764.550,00	66.764.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.764.550,00	66.764.550,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
530	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.459.700,00	2.459.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.700,00	2.459.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
531	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/bulan	10.473.990.000,00	10.173.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.473.990.000,00	10.173.990.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Kepagawaian Perangkat Daerah	100 %											
532	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
533	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
534	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.018.400,00	2.018.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.400,00	2.018.400,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
535	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
536	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	66.684.200,00	66.684.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.684.200,00	66.684.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
537	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
538	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %											
539	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
540	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
541	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
542	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220.000,00	11.220.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
543	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
544	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	84.240.700,00	185.975.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240.700,00	185.975.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
545	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	9.330.000,00	9.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330.000,00	9.330.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100 %											
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100 %											
546	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	11.454.000,00	5.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.454.000,00	5.934.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
547	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum													
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
548	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia													
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	190 Orang	6.240.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00	3.840.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
549	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
550	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan													
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	1.286.846.300,00	1.297.376.300,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.913.300,00	1.297.443.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
551	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa													
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 %											
552	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 dokumen	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	247.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
553	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 unit	277.200,00	277.200,00	1.905.900,00	1.905.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.100,00	2.183.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
554	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	214.200,00	214.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.200,00	214.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
555	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	17.999.950,00	9.069.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.999.950,00	9.069.950,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
556	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	218.633.200,00	203.676.200,00	1.857.000,00	1.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.490.200,00	205.533.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
557	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	100 %											
558	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS													
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	17.199.750,00	15.279.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199.750,00	15.279.750,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 %											
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen											
559	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	6.515.666.000,00	6.560.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515.666.000,00	6.560.666.000,00	- Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah - - Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah -
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen											
560	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.389.900,00	2.389.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.900,00	2.389.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
561	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	1.364.400,00	1.364.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.400,00	1.364.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
562	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	76 Paket	41.404.100,00	41.420.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.404.100,00	41.420.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
563	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.066.800,00	5.066.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066.800,00	5.066.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah
564	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
565	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
566	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
567	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	37.050.000,00	37.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.050.000,00	37.050.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
568	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	45 Laporan	67.980.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.980.000,00	58.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Miliki Daerah yang dipelihara	100 Persen											
569	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	254.209.400,00	276.467.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.209.400,00	276.467.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
570	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900.000,00	21.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	85 Persen											
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga/Desa yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	25 Orang											
571	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	25 Orang	17.670.200,00	17.670.200,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.670.200,00	41.670.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiap Siagaan	4 Paket											
572	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4 laporan	625.763.800,00	700.763.800,00	100.936.000,00	100.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.699.800,00	801.699.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah
573	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	25 Kawasan	6.060.000,00	56.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060.000,00	56.060.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Masyarakat yang tertangani akibat Pasca Bencana	100 Persen											
574	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	112.518.700,00	186.048.700,00	5.857.113.000,00	5.857.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969.631.700,00	6.043.161.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	100 %											
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan											
575	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24 Laporan	257.320.000,00	304.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.320.000,00	304.920.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
576	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	0,00	0,00	139.118.000,00	139.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.118.000,00	139.118.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 persen											
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen											
577	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	100 persen											
578	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	4.585.614.000,00	4.405.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585.614.000,00	4.405.614.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -
579	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - -
580	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - -
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100 persen											
581	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	57 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
582	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
583	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
584	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100 persen											
585	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	4.164.300,00	4.164.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164.300,00	4.164.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
586	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			0	0 0	3.575.200,00	3.575.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575.200,00	3.575.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
587	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
588	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	104 Paket	340.007.300,00	326.577.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.007.300,00	326.577.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah
589	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	14.460.200,00	14.460.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460.200,00	14.460.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
590	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420.000,00	6.420.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
591	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
592	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	3.982.400,00	3.982.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982.400,00	3.982.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
593	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100 persen											
594	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
595	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
596	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	- Dana Alokasi Umum (DAU)
597	1.06.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
598	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 persen											
599	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1495 Laporan	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980.000,00	7.980.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
600	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
601	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300.000,00	36.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	100 persen											
602	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	237.767.650,00	198.973.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.767.650,00	198.973.650,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
603	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
604	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.710.000,00	18.710.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
605	1.06.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
606	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
607	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
608	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	43 persen											
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	43 persen											
609	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	102 Orang	33.650.000,00	37.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.650.000,00	37.150.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah
610	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	28.661.000,00	32.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.661.000,00	32.161.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah
611	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Lembaga	32.039.100,00	35.539.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.039.100,00	35.539.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah
	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke desa/kelurahan asal	5 Orang											
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.	5 Orang											
612	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal													
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	29 persen											
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	29 persen											
613	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	345 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
614	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	97 Orang	57.000.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	39.500.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah
615	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat													
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	87.652.800,00	98.052.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.652.800,00	98.052.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah
616	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar Lanjut usia terlantar,Gelandanngan Pengemis diluar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	29 persen											
617	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	0,00	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) -
618	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	67 Orang	0,00	2.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) -
619	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial													
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Fisik dan mental serta lanjut Usia Tidak Potensial yang menerima jaminan sosial	62 persen											
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Fisik dan mental serta lanjut Usia Tidak Potensial yang menerima jaminan sosial	62 persen											
620	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	12475 Keluarga	54.275.000,00	57.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.275.000,00	57.775.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
621	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga													
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Penannganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	100 persen											
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Presentase Penannganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	100 persen											
622	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	49.603.600,00	53.103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.603.600,00	53.103.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah
623	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	persentase penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	100 persen											
624	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana													
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
625	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana													
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	81 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-											
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-											
626	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota													
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	24,03 persen											
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	24,3 persen											
627	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG													
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	102.120.000,00	112.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.120.000,00	112.520.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
628	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota													
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
629	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota													
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Prosentase Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi	100 persen											
630	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi													
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) -
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen											
631	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
632	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	23.168.000,00	23.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.168.000,00	23.168.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 persen											
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 persen											
633	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
634	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	MENINGKATNYA PORSENTASE PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN KOTA	100 persen											
635	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
636	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	61.375.000,00	61.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.375.000,00	61.375.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
637	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-											
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
638	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
639	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tersedianya Data Informasi Gender dan Anak	100 %											
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah data gender dan anak yang tersedia	1 Dokumen											
640	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	100 %											
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen lembaga penyedia layanan perlindungan anak	1 Dokumen											
641	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	76.675.000,00	81.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.675.000,00	81.419.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah
642	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.270.500,00	19.270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.270.500,00	19.270.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-											
643	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 %											
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan terhadap kekerasan Anak	1 Dokumen											
644	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA													
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah layanan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus	20 Orang											
645	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK													
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	28 Layanan	78.524.000,00	76.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.524.000,00	76.604.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
646	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/													
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
647	2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota													
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
		Dinas Lingkungan Hidup													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 %											
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
648	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.496.250,00	4.496.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496.250,00	4.496.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
649	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3.927.650,00	3.927.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927.650,00	3.927.650,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %											
650	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	26.850.391.800,00	25.250.391.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850.391.800,00	25.250.391.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
651	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
652	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.988.800,00	3.988.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988.800,00	3.988.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
653	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	15.037.600,00	15.037.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.037.600,00	15.037.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
654	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	76 Paket	250.066.600,00	263.976.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.066.600,00	263.976.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
655	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	22.126.000,00	22.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.126.000,00	22.126.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
656	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
657	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	9.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940.000,00	0,00	Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
658	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
659	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
660	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
661	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71.567.500,00	71.567.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.567.500,00	71.567.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
662	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
663	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	176.125.300,00	191.159.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.125.300,00	191.159.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
664	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	11.930.000,00	11.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.930.000,00	11.930.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
665	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan lingkungan hidup	100 %											
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
666	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota													
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang tersusun	undefined											
667	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang													
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,5 %											
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terukurnya Tingkat Pencemaran di Kabupaten Bangli	4 Kecamatan											
668	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	93.890.400,00	88.908.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.890.400,00	88.908.150,00	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
669	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	10 Dokumen	6.771.200,00	3.358.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771.200,00	3.358.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
670	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah													
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10 Kegiatan											
671	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota													
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	12 Kegiatan	194.873.300,00	196.200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.873.300,00	196.200.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	18 %											
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Meningkatnya kelestarian lingkungan	18 %											
672	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Ha	1.245.528.000,00	1.350.766.036,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.528.000,00	1.360.766.036,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Air Tanah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Air Tanah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Perijinan dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Bahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	88,35 %											
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Perijinan dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Bahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	88,35 %											
673	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3													
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	26 Laporan	5.416.750,00	1.321.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416.750,00	1.321.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki ijin lingkungan dan PPLH	70 USAHA											
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha/Kegiatan Yang Sudah Memiliki Ijin Lingkungan dan PPLH	70 Usaha											
674	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH													
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	53.920.000,00	47.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.920.000,00	47.095.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal	100 %											
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 penghargaan											
675	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	11.981.250,00	6.111.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.981.250,00	6.111.750,00	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	80 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Tertanganinya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH	80 %											
676	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan	2.415.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	1.050.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	70 %											
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Peningkatkan Kelestarian Lingkungan	70 %											
677	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan													
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	68 Kelompok	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
678	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	37 Unit	98.412.400,00	103.621.700,00	4.000.000.000,00	4.005.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098.412.400,00	4.108.621.700,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
679	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional													
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	9 Ton	5.180.943.113,00	5.406.201.000,00	0,00	248.294.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180.943.113,00	5.654.495.777,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan	2 Laporan											
680	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
681	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00	2.810.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan											
682	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	4.909.582.000,00	5.129.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909.582.000,00	5.129.582.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA
683	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen											
684	2.12.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan											
685	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.869.200,00	5.869.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869.200,00	5.869.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
686	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.704.400,00	6.704.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704.400,00	6.704.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
687	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	124.202.800,00	124.202.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.202.800,00	124.202.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
688	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.406.500,00	4.406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.500,00	4.406.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
689	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
690	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
691	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen											
692	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
693	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
694	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
695	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen											
696	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
697	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.200.000,00	60.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	60.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
698	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	225.660.000,00	232.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.660.000,00	232.560.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 Persen											
699	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	84.062.400,00	84.062.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.062.400,00	84.062.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
700	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
701	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	18.180.000,00	18.180.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.180.000,00	28.180.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
702	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
703	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	93 Persen											
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang didaftar	0 Dokumen											
704	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Prosentase Meningkatnya Penduduk yang didaftar	2 Dokumen											
705	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan													
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	9 Dokumen	365.624.000,00	428.352.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.624.000,00	428.352.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Prosentase meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	15 Dokumen											
706	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
707	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	75.648.400,00	40.620.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.648.400,00	40.620.200,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	0 Laporan											
708	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk													
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	87 Persen											
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Prosentase Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Paket											
709	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil													
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
710	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan													
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	96.722.000,00	96.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.722.000,00	96.722.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Prosentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12 Laporan											
711	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
712	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil													
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	104.500.000,00	125.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500.000,00	125.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
713	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil													
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Kualitas Laporan Informasi Administrasi Kependudukan	90 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	70 Dokumen											
714	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	70 Dokumen	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850.000,00	10.850.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
715	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan											
716	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
717	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	116.640.000,00	130.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.640.000,00	130.540.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan											
718	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	9.994.700,00	1.064.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994.700,00	1.064.700,00	Lain-lain PAD Yang Sah Lain-lain PAD Yang Sah
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prosentase Meningkatnya kualitas Penyusunan Profil Kependudukan	81 Persen											
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Prosentase Meningkatnya Profil Kependudukan yang disusun	70 Dokumen											
719	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain													
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	70 Dokumen	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 %											
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
720	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	4.769.129.000,00	4.569.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769.129.000,00	4.569.129.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA
721	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
722	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.382.800,00	3.382.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.800,00	3.382.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
723	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	29.077.600,00	29.077.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.077.600,00	29.077.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
724	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	195.650.900,00	195.650.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.650.900,00	195.650.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
725	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.911.150,00	11.023.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.911.150,00	11.023.650,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
726	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340.000,00	8.340.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
727	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	250 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
728	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
729	2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
730	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1064 Laporan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
731	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
732	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
733	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96 Unit	252.777.300,00	232.302.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.777.300,00	232.302.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
734	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900.000,00	21.900.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
735	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase desa yang melakukan penataan desa	17,80 %											
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Tertatanya desa yang baik	100 %											
736	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa													
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	2.266.500,00	2.266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266.500,00	2.266.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
737	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	13 Unit	6.015.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015.000,00	315.000,00	Retribusi Daerah - LRA Retribusi Daerah - LRA
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Prosentase desa dalam meningkatkan kerjasama desa	100 %											
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa	100 %											
738	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase administrasi pemerintahan desa yang baik	48,62 %											
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tertatanya administrasi pemerintahan desa yang baik	72 Desa/Kelurahan											
739	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	68 Dokumen	148.250.000,00	358.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.250.000,00	358.550.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
740	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	14 Dokumen	1.317.650.000,00	1.314.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.650.000,00	1.314.250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Retribusi Daerah - LRA
741	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa													
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	286 Orang	152.425.000,00	138.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.425.000,00	138.425.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
742	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	68 Laporan	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110.000,00	7.110.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
743	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	13 Dokumen	116.405.500,00	123.985.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.405.500,00	123.985.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Retribusi Daerah - LRA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
744	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	56 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
745	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa													
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	14 Dokumen	6.585.000,00	6.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585.000,00	6.585.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
746	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	14 Dokumen	31.835.000,00	14.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.835.000,00	14.235.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA
747	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD													
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	68 Orang	35.802.000,00	35.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.802.000,00	35.802.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
748	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	14 Laporan	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840.000,00	6.840.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
749	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	8.944.500,00	8.944.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944.500,00	8.944.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase lembaga kemasyarakatan dalam menunjang pemberdayaan masyarakat	42,35 %											
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya lembaga Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	72 Desa/Kelurahan											
750	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	16 Dokumen	114.944.350,00	92.944.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.944.350,00	92.944.350,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
751	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
752	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	15 Laporan	30.986.000,00	24.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.986.000,00	24.306.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA
753	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	72 Laporan	23.931.000,00	21.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.931.000,00	21.351.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA
754	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	15 Dokumen	1.283.000.000,00	762.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.000.000,00	762.460.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah - LRA Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah - LRA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani (unmeet need)	4,3 %											
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tercapainya Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100 %											
755	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
756	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
757	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
758	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana													
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 %											
759	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
760	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga													
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
761	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga													
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
762	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga													
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
763	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga													
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	504 Laporan	117.600.000,00	117.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600.000,00	117.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
764	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB													
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	4 Dokumen	529.320.000,00	579.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.320.000,00	579.220.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA DAK Non Fisik-BOKB-KB Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA
765	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain													
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
766	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) bagi pasangan usia subur	86,14 %											
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tercapianya Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	100 %											
767	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
768	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana													
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
769	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
770	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)													
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2 Laporan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
771	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang													
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	109.102.000,00	109.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.102.000,00	109.102.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
772	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal													
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
773	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja													
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	8 Organisasi	73.000.000,00	134.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00	134.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB Pajak Daerah
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tercapainya Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	86.14 %											
774	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB													
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
775	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)													
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	436 Orang	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000.000,00	396.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
776	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB													
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	0 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)													
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4 Laporan	7.463.400,00	29.213.400,00	944.500.600,00	944.500.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.964.000,00	973.714.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	86,14 %											
778	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	28 Laporan	38.548.000,00	38.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.548.000,00	38.548.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
779	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4 Orang	198.050.000,00	198.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.050.000,00	198.050.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
780	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB													
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
782	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	48 Laporan	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900.000,00	25.900.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
783	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak													
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
784	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria													
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
785	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB													
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
786	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan													
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Tercapainya Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	86,14 %											
787	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
788	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	17 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
789	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	17 Kampung	179.200.000,00	191.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.200.000,00	191.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pelaksanaa Pembinaan terhadap seluruh Poktan	100 %											
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tercapinya Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keleluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %											
790	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)													
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
791	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)													
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2 Laporan / Dokumen	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
792	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))													
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
793	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	2 Unit	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKB-KB
794	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
795	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
796	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
797	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	4 Orang	1.332.720.000,00	1.332.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.720.000,00	1.332.720.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan DAK Non Fisik-BOKB-KB Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
798	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)													
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	0 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tercapainya Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100 %											
799	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
800	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja													
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
		Dinas Perhubungan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	14.92 %											
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/Bulan											
801	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	4.637.236.000,00	4.557.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637.236.000,00	4.557.236.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	87 Paket											
802	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian penunjang perangkat daerah kabupaten	18.10 %											
803	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.372.600,00	1.372.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.600,00	1.372.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
804	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	4.789.400,00	4.789.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789.400,00	4.789.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
805	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	76 Paket	214.996.200,00	225.196.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.996.200,00	225.196.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
806	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	145.575.000,00	155.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.575.000,00	155.775.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
807	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
808	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990.000,00	0,00	Lain-lain PAD Yang Sah Lain-lain PAD Yang Sah
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit											
809	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	3 Paket											
810	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
811	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.300.000,00	50.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300.000,00	50.300.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
812	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	109.260.000,00	119.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.260.000,00	119.760.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penunjang perangkat daerah kabupaten 3 Jenis	3 Jenis											
813	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	232.196.850,00	217.601.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.196.850,00	217.601.850,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
814	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
815	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLA J)	19.20 %											
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan yang tersedia	5 unit											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
816	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 Unit	1.651.674.400,00	1.675.674.400,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.674.400,00	1.732.674.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen											
817	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	114.470.200,00	118.790.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.470.200,00	118.790.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	8425 unit											
818	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4137 Unit	215.124.050,00	235.175.400,00	47.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.124.050,00	329.175.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan											
819	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	610.854.850,00	751.854.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.854.850,00	751.854.850,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	1 Dokumen											
820	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12 Laporan	33.161.600,00	36.561.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.161.600,00	36.561.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 unit											
821	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	59.091.050,00	66.091.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.091.050,00	66.091.050,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah
822	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pengelolaan Pelayaran	32,04 %											
	2.15.03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
823	2.15.03.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	48.051.450,00	48.051.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.051.450,00	48.051.450,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.15.03.2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan											
824	2.15.03.2.05.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %											
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen											
825	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	14.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
826	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen											
827	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.141.047.450,00	4.301.047.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141.047.450,00	4.301.047.450,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Dokumen											
828	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
829	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.318.800,00	1.318.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.800,00	1.318.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
830	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	44.611.500,00	44.611.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.611.500,00	44.611.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
831	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.000,00	4.920.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
832	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
833	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	82.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.940.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen											
834	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
835	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	67.524.000,00	67.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.524.000,00	67.524.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
836	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	59.730.000,00	59.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.730.000,00	59.730.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Dokumen											
837	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	92.975.100,00	92.975.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.975.100,00	92.975.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
838	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
839	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100 %											
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen											
840	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat													
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	877.630.000,00	1.277.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.630.000,00	1.277.430.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
841	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik													
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	6 Permohonan	26.200.000,00	43.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200.000,00	43.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
842	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	728.770.000,00	1.012.440.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.770.000,00	1.047.440.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
843	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik													
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan SPBE yang dibangun	74 %											
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen											
844	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE													
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Pajak Rokok -
845	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah													
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	389.510.000,00	399.810.000,00	0,00	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.510.000,00	466.810.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
846	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Aplikasi	580.160.000,00	580.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.160.000,00	580.160.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
847	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota													
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	29 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
848	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas													
			Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Program	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
	2.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %											
	2.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
849	2.20.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Dokumen Data	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya Data Tentang Kabupaten Bangli	1 Profil											
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen											
850	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia													
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Prosentase Keamanan SPBE	100 %											
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen											
851	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	7.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
853	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
854	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	29 Perangkat Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	29 Perangkat Daerah	14.520.000,00	20.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520.000,00	20.520.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	80 Persen											
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peningkatan kompetensi calon tenaga kerja	Orang											
856	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
857	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
858	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi													
			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah terbinanya lembaga latihan kerja swasta	18 Lembaga											
859	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta													
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	18 Lembaga	16.383.950,00	16.383.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.383.950,00	16.383.950,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	82,35 Persen											
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah peningkatan pengelolaan informasi pasar kerja	100 Orang											
860	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online													
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
861	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	57.327.700,00	60.827.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.327.700,00	60.827.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja migran yang dilatih	Orang											
862	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan													
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	28,53 Persen											
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang didata dab diberi sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaa	6 Perusahaan											
863	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan													
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 Laporan	21.220.000,00	95.459.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.220.000,00	95.459.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	10 Perusahaan											
864	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
865	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	0 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
866	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
867	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 Persen											
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah												
868	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
869	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya administrasi keuangan	80 persen											
870	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	5.053.892.000,00	4.983.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053.892.000,00	4.983.892.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA
871	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
872	2.17.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
873	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
874	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersediannya administrasi kepegawaian perangkat daerah												
875	2.17.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
876	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
877	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya administrasi umum perangkat daerah	80 persen											
878	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.318.600,00	5.318.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318.600,00	5.318.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
879	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	26.381.300,00	26.381.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.381.300,00	26.381.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
880	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
881	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	193.592.900,00	207.492.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.592.900,00	207.492.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah
882	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	21.558.650,00	21.558.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.558.650,00	21.558.650,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
883	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
884	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
885	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
886	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen											
887	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
888	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
889	2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
890	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
891	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	9.382.000,00	9.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382.000,00	9.382.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	78,73 Persen											
892	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
893	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	144.276.000,00	144.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.276.000,00	144.276.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
894	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	155.530.000,00	162.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.530.000,00	162.530.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah urusan pemerintah daerah	77,69 Persen											
895	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	56.316.450,00	77.473.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.316.450,00	77.473.950,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
896	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	18.165.000,00	18.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.165.000,00	18.165.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
897	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	- Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Prosentase koperasi yang difasilitasi IUSP dan Ijin operasional	Persen											
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjamnya	Unit Usaha											
898	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan ijin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	unit usaha											
899	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase koperasi aktif	83,61 Persen											
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	20 Unit Usaha											
900	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi													
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	12 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
901	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 Unit Usaha	75.505.000,00	85.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.505.000,00	85.905.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase koperasi yang sehat dan berkualitas	Persen											
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai	Unit Usaha											
902	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase peningkatan profesionalisme pengelola koperasi	0 Persen											
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola koperasi yang dilatih	100 Orang											
903	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi													
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase struktur permodalan dan usaha koperasi	79,88 Persen											
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi	74 Unit Usaha											
904	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
905	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	40 Unit Usaha	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
906	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	34 Unit Usaha	59.345.000,00	59.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.345.000,00	59.345.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase wirausaha baru	2,48 Persen											
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha baru	100 unit usaha											
907	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro													
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	35 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
908	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro													
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
909	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro													
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
910	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro													
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	900 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
911	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro													
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
912	2.17.07.2.01.0012	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah													
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	114.288.900,00	128.188.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.288.900,00	128.188.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
913	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan													
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 Orang	90.618.000,00	90.618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.618.000,00	90.618.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase pelaku usaha kecil yang berdaya saing	6,73 Persen											
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang difasilitasi	60 unit usaha											
914	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro													
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
915	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro													
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
916	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi													
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	60 Unit Usaha	203.144.000,00	266.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.144.000,00	266.194.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Lain-lain PAD Yang Sah
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 %											
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
917	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
918	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
919	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	5.808.265.000,00	5.858.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808.265.000,00	5.858.265.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum pada DPMPTSP	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
920	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
921	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.083.400,00	2.083.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.400,00	2.083.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
922	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	69.948.500,00	84.948.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.948.500,00	84.948.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
923	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.601.250,00	5.601.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601.250,00	5.601.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
924	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
925	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
926	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	18.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.240.000,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
927	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
928	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
929	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
930	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
931	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
932	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	257.450.000,00	257.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.450.000,00	257.450.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
933	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	297.620.000,00	307.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.620.000,00	307.920.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
934	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	98.907.650,00	98.907.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.907.650,00	98.907.650,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
935	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	26.180.000,00	26.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.180.000,00	26.180.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
936	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi	1.334,03 Milyar Rupiah											
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen											
937	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal													
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen	2.629.650,00	2.629.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629.650,00	2.629.650,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
938	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	3 Dokumen	2.564.850,00	2.564.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564.850,00	2.564.850,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang disusun	3 Dokumen											
939	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
940	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3 Dokumen	40.940.000,00	24.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.940.000,00	24.080.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	1050 Investor											
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Dilaksanakan	2 Kali											
941	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	33.145.650,00	25.305.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.145.650,00	25.305.650,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
942	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	999.850,00	999.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.850,00	999.850,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,87 %											
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan	98,08 %											
943	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah													
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
944	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	520 Pelaku Usaha	59.269.650,00	75.169.650,00	254.600.000,00	254.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.869.650,00	329.769.650,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
945	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko													
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	125 Pelaku Usaha	20.714.950,00	24.114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.714.950,00	24.114.950,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
946	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko													
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	510 Kegiatan Usaha	68.943.750,00	75.743.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.943.750,00	75.743.750,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	58,33 %											
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	75 Perusahaan											
947	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	65 Kegiatan Usaha.	450.000,00	20.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	20.450.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
948	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	65 Pelaku Usaha	8.430.000,00	30.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430.000,00	30.450.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
949	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal													
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	65 Kegiatan Usaha	53.930.000,00	34.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.930.000,00	34.550.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik	81 %											
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen											
950	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	11.940.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940.000,00	540.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan desa adat serta subak dan subak abian yang dikelola dengan nilai-nilai sad kerthi	35.20 persen											
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan kebudayaan	24 Objek											
951	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan													
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	24 Objek	659.390.200,00	669.890.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.390.200,00	669.890.200,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kesenian yang terdata	1 jenis data											
952	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya													
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
953	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan													
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase bendesa adat,kelihan banjar adat,dan banjar adat yang ditingkatkan kapasitasnya	100 persen											
954	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat													
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	819 Objek	5.803.722.900,00	6.606.192.900,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821.222.900,00	6.623.692.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Denda Retribusi Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Denda Retribusi Daerah
955	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Penyelenggaraan presentasi seni dan budaya	25 sekaa											
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kesenian daerah	25 sekaa											
956	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
957	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	0 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
958	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional													
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Lembaga	2.537.743.900,00	2.489.493.900,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.743.900,00	2.489.493.900,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah simpul-simpul sejarah yang dilindungi/dikembangkan/dimanfaatkan/dibina	1 Dokumen											
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	2 WBTB											
959	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
960	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah													
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai warisan budaya Bali	3.13 persen											
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah cagar budaya yang ditetapkan	73 Cagar budaya											
961	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	73 Objek	65.780.800,00	64.260.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.780.800,00	64.260.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dolumen											
962	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
963	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2.882.000,00	2.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882.000,00	2.882.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan											
964	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	5.097.412.000,00	5.047.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097.412.000,00	5.047.412.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
965	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 persen											
966	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.398.200,00	3.398.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398.200,00	3.398.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
967	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.188.200,00	5.188.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188.200,00	5.188.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
968	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	462.443.700,00	458.343.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.443.700,00	458.343.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Denda Retribusi Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Denda Retribusi Daerah
969	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	47.721.500,00	47.721.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.721.500,00	47.721.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
970	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
971	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
972	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	49.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.970.000,00	0,00	Lain-lain PAD Yang Sah Lain-lain PAD Yang Sah
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 unit											
973	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
974	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
975	3.26.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen											
976	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	47.080.000,00	20.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.080.000,00	20.080.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
977	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	190.349.500,00	190.349.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.349.500,00	190.349.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
978	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	23.280.000,00	23.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.280.000,00	23.280.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tertibnya administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Unit											
979	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	107.389.400,00	107.389.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.389.400,00	107.389.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
980	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	12.420.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420.000,00	12.420.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
981	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan destinasi pariwisata	80.00 persen											
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Prosentase Daya Tarik wisata kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang,pemantapan,revitalisasi)	100 persen											
982	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
983	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	23.267.834.800,00	26.422.651.000,00	0,00	13.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.267.834.800,00	26.436.466.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pendapatan Denda Retribusi Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pendapatan Denda Retribusi Daerah
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Prosentase Pengadaan /pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata	100 persen											
984	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4 Unit	1.081.380.000,00	1.081.380.000,00	100.000.000,00	332.054.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.380.000,00	1.413.434.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah
985	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
986	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
987	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Pariwisata yang memiliki TDUP	25 Industri Pariwisata											
988	3.26.02.2.04.0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota													
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	IKM Kepariwisataan	81.00 persen											
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Prosentase Penyelenggaraan pemasaran dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota	81 persen											
989	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
990	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	113.610.000,00	124.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.610.000,00	124.010.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah
991	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
992	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	108.094.000,00	118.494.000,00	33.810.000,00	11.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.904.000,00	130.004.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Prosentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	15 persen											
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Prosentase Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	15 persen											
993	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif													
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
994	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan SDM Pariwisata	88,8 persen											
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Prosentase Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	71.8 persen											
995	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif													
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
996	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI													
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	300 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Prosentase pelaksanaan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	17 persen											
997	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang diadakan	21,21 %											
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandiaraian pangan yang diadakan	0 %											
998	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya													
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase tingkat diversifikasi masyarakat	17,42 %											
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase harga Pangan pokok terpantau	18,18 %											
999	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	32.812.000,00	25.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.812.000,00	25.862.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1000	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya													
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	0,00	73.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750.000,00	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
1001	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota													
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	27.747.500,00	31.247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.747.500,00	31.247.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase laporan pola konsumsi dan suplai pangan tersedia	16,67 %											
1002	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun													
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	153.697.500,00	42.567.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.697.500,00	42.567.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kasus kerawanan pangan menurun	19,02 %											
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase laporan ketahanan pangan tersedia	16,67 %											
1003	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan													
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2 Dokumen	19.245.000,00	22.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.245.000,00	22.745.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kerawanan pangan kabupaten terpantau	21,37 %											
1004	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	450.520.500,00	476.770.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.520.500,00	476.770.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
1005	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota													
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	95,50 %											
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Informasi pemantauan mutu dan keamanan pangan tersedia	1 Laporan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1006	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	22.385.000,00	25.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.385.000,00	25.885.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase konsumsi ikan masyarakat meningkat	10 %											
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Prasaran usaha perikanan tangkap tersedia	21,21 %											
1007	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap													
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Konsumsi Ikan Masyarakat Meningkat	31,03 %											
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produktivitas perikanan budidaya	3,86 %											
1008	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1009	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	30 Dokumen	54.342.550,00	82.666.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.342.550,00	82.666.050,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
1010	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16 Unit	295.994.650,00	302.894.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.994.650,00	302.894.650,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Retribusi Daerah - LRA
1011	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat													
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1012	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	236.623.000,00	250.423.000,00	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.123.000,00	410.923.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Konsumsi Ikan Masyarakat Meningkat	31,03 %											
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Produktivitas perikanan budidaya	3,86 %											
1013	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko													
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terfasilitasnya promosi produk unggulan daerah	2 Unit Usaha											
1014	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko													
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 Unit Usaha	40.265.300,00	40.265.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.265.300,00	40.265.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengethuan dan kesehatan masyarakat meningkat	16.85 %											
1015	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	271.399.500,00	278.199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.399.500,00	278.199.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 %											
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
1016	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7.404.500,00	7.404.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404.500,00	7.404.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan tunjangan ASN tersedia	258 Orang/bulan											
1017	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	258 Orang/bulan	25.776.771.000,00	26.006.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.776.771.000,00	26.006.771.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi perkantoran memadai	100 %											
1018	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.959.600,00	6.959.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959.600,00	6.959.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1019	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.422.000,00	15.887.000,00	103.440.000,00	100.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.862.000,00	116.862.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1020	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	288.097.800,00	302.097.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.097.800,00	302.097.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1021	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.581.900,00	15.581.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.581.900,00	15.581.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1022	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340.000,00	5.340.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1023	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1024	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	15.660.000,00	15.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.660.000,00	15.660.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1025	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	191.498.000,00	201.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.498.000,00	201.998.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1026	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	209.767.050,00	223.567.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.767.050,00	223.567.050,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1027	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	22.030.000,00	22.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.030.000,00	22.030.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1028	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	321.000.000,00	371.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000.000,00	371.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas tanaman perkebunan unggulan perhektar	21,27 %											
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	25,25 %											
1029	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi													
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	8 Laporan	379.566.500,00	388.766.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.566.500,00	388.766.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Retribusi Daerah - LRA
1030	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian													
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	71.692.600,00	78.492.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.692.600,00	78.492.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sumber Daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan	19,79 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1031	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman													
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1032	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman													
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	0 Varietas Unggul Baru (VUB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1033	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan													
			Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 laporan	361.157.600,00	360.357.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.157.600,00	360.357.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase bibit ternak yang diadakan	23,23 %											
1034	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain													
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	0 Ekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	7,65 %											
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase perencanaan pembangunan prasarana pertanian	33 %											
1035	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya													
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase pembangunan prasarana pertanian	15,31 %											
1036	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian													
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1037	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	205.569.200,00	205.569.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.569.200,00	205.569.200,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
1038	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit													
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1039	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1040	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya													
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit	207.248.400,00	804.248.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.248.400,00	804.248.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kasus penyakit ternak menurun	3,56 %											
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Coverage Vaksinasi Rabies tercapai	19,42 %											
1041	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular													
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2 Laporan	1.038.039.900,00	1.043.439.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.039.900,00	1.043.439.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner terkelola	19,42 %											
1042	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner													
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kelompok yang dibina dalam pengendalian OPT	20,51 %											
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok yang di bina	20,51 %											
1043	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	581 Ha	31.282.050,00	34.782.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.282.050,00	34.782.050,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyenggaraan penyuluh pertanian	19,49 %											
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase penyenggaraan penyuluhan pertanian	19,49 %											
1044	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa													
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	112.677.600,00	129.677.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.677.600,00	129.677.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1045	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa													
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	39.921.000,00	39.921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.921.000,00	39.921.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1046	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1047	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1048	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian													
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	89 Orang	0,00	507.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pangan
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	undefined undefined											
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	0 0											
1049	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	1 Dokumen											
1050	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C													
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P B2)	20 Dokumen										
1051	3.30.02.2.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	20 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1052	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	20 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Distribusi Perdagangan	100 Persen											
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah penyediaan sarana distribusi perdagangan	1 unit											
1053	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen											
1054	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1055	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	3.392.023.000,00	3.803.246.400,00	231.965.200,00	633.181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623.988.200,00	4.436.428.200,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Retribusi Daerah - LRA Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Retribusi Daerah - LRA
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 Persen											
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan											
1056	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1057	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	11.956.000,00	6.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956.000,00	6.256.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Retribusi Daerah - LRA Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Retribusi Daerah - LRA
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.93 Persen											
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pedagang yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional	10 Pelaku Usaha											
1058	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	49.62 Persen											
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	7500 Unit											
1059	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang													
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	6500 Unit	54.438.600,00	46.738.600,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.438.600,00	130.738.600,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Retribusi Daerah - LRA Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Retribusi Daerah - LRA
1060	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal													
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	6500 Orang	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	Retribusi Daerah - LRA -
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri	3.75 persen											
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM											
1061	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen											
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 dokumen 36 dokumen											
1062	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan											
1063	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	5.033.283.000,00	4.783.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033.283.000,00	4.783.283.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA
1064	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	59.080.000,00	24.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.080.000,00	24.310.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Retribusi Daerah - LRA Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Retribusi Daerah - LRA
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan komponen instalasi listrik penerangan kantor	20 Paket											
1065	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	Retribusi Daerah - LRA Retribusi Daerah - LRA
1066	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	3.354.000,00	3.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354.000,00	3.354.000,00	Retribusi Daerah - LRA Retribusi Daerah - LRA
1067	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	220.113.000,00	240.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.113.000,00	240.513.000,00	Retribusi Daerah - LRA Retribusi Daerah - LRA
1068	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	6.819.550,00	6.819.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819.550,00	6.819.550,00	Retribusi Daerah - LRA Retribusi Daerah - LRA
1069	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1200 Dokumen	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	Retribusi Daerah - LRA Retribusi Daerah - LRA
1070	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit											
1071	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1072	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 12 Laporan 1000 Laporan											
1073	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Retribusi Daerah - LRA Retribusi Daerah - LRA
1074	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.370.000,00	75.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.370.000,00	75.370.000,00	Retribusi Daerah - LRA Retribusi Daerah - LRA
1075	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	161.900.000,00	140.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.900.000,00	140.300.000,00	Retribusi Daerah - LRA Retribusi Daerah - LRA
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit 18 Unit 20 Unit 17 Unit											
1076	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	82.407.850,00	82.407.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.407.850,00	82.407.850,00	Retribusi Daerah - LRA Retribusi Daerah - LRA
1077	3.31.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1078	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	19.970.000,00	19.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.970.000,00	19.970.000,00	Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Umum
1079	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1080	3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	36,14 persen											
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36,14 %											
1081	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10 Dokumen	3.794.120.000,00	3.854.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794.120.000,00	3.854.520.000,00	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Retribusi Daerah - LRA DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Retribusi Daerah - LRA
1082	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1083	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	388.620.000,00	409.820.000,00	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.620.000,00	634.820.000,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Retribusi Daerah - LRA Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Retribusi Daerah - LRA
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	12,74 persen											
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 Dokumen											
1084	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
		Sekretariat Daerah													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 Persen											
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen											
1085	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	184 Orang/bulan	24.127.464.000,00	23.327.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.127.464.000,00	23.327.464.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen											
1086	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	9.679.930.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.679.930.000,00	7.000.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
1087	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1088	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	832.070.000,00	832.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.070.000,00	832.070.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen											
1089	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	825.480.000,00	880.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.480.000,00	880.080.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase jumlah transmigran yang ditempatkan	100 Persen											
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Calon Transmigrasi Yang Difasilitasi	100 Persen											
1090	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi													
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	50 Kepala Keluarga	23.928.750,00	23.928.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.928.750,00	23.928.750,00	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase penyelesaian administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 Persen											
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	3 Dokumen											
1091	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	587.385.000,00	898.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.385.000,00	898.205.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
1092	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1093	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	106.506.000,00	109.946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.506.000,00	109.946.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5 Dokumen											
1094	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	25.436.918.800,00	24.888.718.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.436.918.800,00	24.888.718.800,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
1095	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial													
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	20.641.500,00	13.816.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.641.500,00	13.816.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1096	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	20 Dokumen	60.167.250,00	7.439.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.167.250,00	7.439.250,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	50 Dokumen											
1097	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah													
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	116.337.550,00	128.237.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.337.550,00	128.237.550,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
1098	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum													
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	312.996.450,00	541.996.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.996.450,00	541.996.450,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1099	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum													
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100 Dokumen	213.970.900,00	239.070.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.970.900,00	274.070.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah Lain-lain PAD Yang Sah
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1 Tahun											
1100	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	39.205.000,00	35.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.205.000,00	35.365.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Asisten Perekonomian dan Pembangunan													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan pelayanan fasilitasi administrasi perekonomian dan pembangunan	100 Persen											
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	17 Dokumen											
1101	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320.000,00	6.320.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1102	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	9 Laporan	238.655.000,00	245.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.655.000,00	245.655.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1103	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	9.390.200,00	6.990.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.390.200,00	6.990.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1104	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	3 Dokumen	20.756.000,00	20.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.756.000,00	20.756.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	16 Dokumen											
1105	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	37.512.000,00	44.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.512.000,00	44.512.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1106	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	74.864.350,00	74.864.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.864.350,00	74.864.350,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1107	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	64.230.000,00	61.430.000,00	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.030.000,00	135.230.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang											
1108	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan Dokumen	97.967.100,00	46.167.100,00	83.610.000,00	83.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.577.100,00	129.777.100,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1109	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik													
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	8.347.500,00	8.347.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.347.500,00	53.347.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1110	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	129.820.000,00	133.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.820.000,00	133.320.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Tersusunnya Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	2 Dokumen											
1111	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	5.855.000,00	5.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855.000,00	5.855.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Asisten Administrasi Umum													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Peningkatan Kwalitas Pembinaan Perpustakaan	100 Persen											
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikelola	30 Perpustakaan											
1112	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan													
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	5.447.250,00	5.447.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447.250,00	5.447.250,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1113	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	20 Layanan	5.277.150,00	5.277.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277.150,00	5.277.150,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1114	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44 Orang	13.090.800,00	13.090.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090.800,00	13.090.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1115	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan													
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	3425 Eksemplar	495.850,00	495.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.850,00	495.850,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi dan lomba	44 Sekolah											
1116	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	7 Orang	95.432.400,00	112.932.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.432.400,00	112.932.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PERSENTASE PENINGKATAN PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	100 Persen											
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	20 Naskah Kuno											
1117	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	10 Eksemplar	6.253.800,00	6.253.800,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.263.800,00	7.263.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentse Instansi Pemerintah yang pengelolaan kearsipannya mengacu pada peraturan perundang-undangan	100 Persen											
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Perangkat Daerah yang Arsip Dinamis diawasi dan dikelola	29 OPD											
1118	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis													
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	860 Berkas	9.479.000,00	9.479.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.479.000,00	9.479.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1119	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Laporan	5.150.000,00	5.150.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.650.000,00	5.150.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis Yang Dikelola Kabupaten/Kota	100 Persen											
1120	2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI													
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1121	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis													
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	3 Arsip	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Informasi Simpul Jaringan Nasional Yang Dilestarikan dan Unit Kearsipan Yang Dibina dan Dilberdayakan	29 OPD											
1122	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN													
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	41 Pengguna	2.025.000,00	2.025.000,00	20.463.000,00	20.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.488.000,00	22.488.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1123	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	26 Laporan	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675.000,00	2.675.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan Dokumen/arsip daerah yang dilestarikan	100 Persen											
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	jumlah Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang	2 Jenis											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1124	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun													
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	10 Arsip											
1125	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana													
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1126	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana													
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	10 Arsip	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	10 Arsip											
1127	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	10 Arsip											
1128	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip													
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	7 Arsip	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	jumlah Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang	2 Jenis											
1129	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)													
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	2 Arsip	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen											
1130	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	220.080.000,00	219.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.080.000,00	219.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen											
1131	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1132	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	625.000,00	45.625.000,00	807.283.100,00	389.298.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.908.100,00	434.923.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil
1133	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	75.787.800,00	75.787.800,00	81.565.900,00	80.558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.353.700,00	156.346.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1134	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.356.071.200,00	1.502.513.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.071.200,00	1.502.513.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1135	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	67.882.500,00	67.882.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.882.500,00	67.882.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1136	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.000.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.150.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
1137	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	2.306.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.000.000,00	- Dana Alokasi Umum (DAU)
1138	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1139	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	100.000.000,00	380.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	580.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1140	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	692.975.000,00	865.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.975.000,00	865.671.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil
1141	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	931.000.000,00	1.028.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.000.000,00	1.028.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
1142	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	436.529.000,00	563.323.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.529.000,00	563.323.850,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1143	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	92 Unit	874.392.250,00	814.611.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.392.250,00	884.611.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil
1144	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	99.600.000,00	99.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600.000,00	99.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1145	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	0,00	40.000.000,00	200.000.000,00	655.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	695.990.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen											
1146	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket	130.000.000,00	153.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	153.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1147	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga	100 Persen											
1148	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	980.000.000,00	980.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000.000,00	980.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1149	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000.000,00	720.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Tersusunnya Dokumen Penataan Organisasi	100 Persen											
1150	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan													
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	108.543.800,00	111.943.800,00	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.243.800,00	135.643.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA
1151	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	69.645.000,00	69.645.000,00	24.859.000,00	24.859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.504.000,00	94.504.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1152	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	83.305.350,00	69.205.350,00	31.937.500,00	31.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.242.850,00	101.142.850,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 Persen											
1153	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	2.004.953.250,00	2.438.753.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.953.250,00	2.438.753.250,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1154	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	380.233.600,00	469.043.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.233.600,00	469.043.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1155	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan													
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	48.244.050,00	37.204.050,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.244.050,00	62.204.050,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
		Sekretariat DPRD													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.02	SEKRETARIAT DPRD													
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya indek Repormasi Birokrasi	undefined undefined											
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 Orang / Bulan											
1156	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 Orang/bulan	3.943.240.000,00	3.938.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943.240.000,00	3.938.240.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah dokumen Bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Paket logistik Kantor yang disediakan undefined	1 Dokumen 1 Laporan 4 Paket											
1157	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.000,00	6.375.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1158	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	376.801.600,00	376.676.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.801.600,00	376.676.600,00	Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1159	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	78.360.000,00	78.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.360.000,00	78.360.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1160	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	496.100.000,00	513.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.100.000,00	513.600.000,00	Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1161	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	138.750.000,00	182.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.750.000,00	182.373.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan Mesin dan Sarana Prasarana Kantor yang diadakan	1 Paket											
1162	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	0,00	0,00	145.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.356.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
1163	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	460.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.021.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Umum yang disediakan	12 Laporan											
1164	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	60.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	30.000.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1165	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1166	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	1.791.600.000,00	1.878.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.600.000,00	1.878.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Angkutan dan peralatan Mesin yan terpelihara	36 Unit											
1167	4.02.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor													
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	25 Unit	205.054.600,00	187.131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.054.600,00	187.131.400,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1168	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	124.530.000,00	124.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.530.000,00	124.530.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1169	4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1170	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah orang yang menerima Pakaian dan Atributnya	30 orang											
1171	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD													
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	420 Orang/Bulan	22.477.014.000,00	23.571.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.477.014.000,00	23.571.370.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1172	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000.000,00	510.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1173	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan											
1174	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	53.805.800,00	53.805.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.805.800,00	53.805.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1175	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2 Laporan	12.605.040.000,00	11.119.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.605.040.000,00	11.119.040.000,00	Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Prosentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	65 %											
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen											
1176	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3 Dokumen	135.300.000,00	135.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.300.000,00	135.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6 Dokumen											
1177	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	2.433.100.000,00	2.433.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.100.000,00	2.433.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1178	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250.000,00	41.250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1179	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD													
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	1.214.300.000,00	1.367.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.300.000,00	1.367.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses	3 Dokumen											
1180	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses													
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	2.090.440.000,00	2.125.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.440.000,00	2.125.440.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.01	PERENCANAAN													
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 %											
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %											
1181	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.850.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.575.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 PERSEN											
1182	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.600.867.700,00	4.720.867.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.867.700,00	4.720.867.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1183	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	18.150.000,00	21.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	21.650.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-											
1184	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1185	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1186	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah	100 %											
1187	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.162.600,00	1.162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.600,00	1.162.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1188	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.254.400,00	1.254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.400,00	1.254.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1189	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	71.096.600,00	71.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.096.600,00	71.559.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1190	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.107.350,00	12.107.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107.350,00	12.107.350,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1191	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1192	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1193	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1194	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Unit	0,00	0,00	0,00	67.629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.629.000,00	Pajak Daerah -
1195	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	6.600.000,00	106.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	106.173.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Bagi Hasil (DBH)
1196	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1197	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1198	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1199	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	162.500.000,00	166.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500.000,00	166.760.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1200	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	100.977.100,00	108.204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.977.100,00	108.204.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1201	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan Pembangunan daerah	2 Dokumen											
1202	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah													
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	355.459.000,00	425.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.459.000,00	425.459.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
1203	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik													
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740.000,00	4.740.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1204	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota													
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	6.990.000,00	6.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990.000,00	6.990.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1205	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	179.300.000,00	186.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.300.000,00	186.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100 %											
1206	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1207	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah													
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	29 Orang	17.450.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450.000,00	20.850.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
1208	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	2.404.000,00	2.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.000,00	2.404.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen hasil pengendalian,evaluasi dan pelaporan yang tersusun	100 %											
1209	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	18.460.000,00	18.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.460.000,00	18.460.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1210	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	38.330.000,00	41.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.330.000,00	41.830.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %											
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %											
1211	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1212	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1213	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1214	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1215	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	100.085.000,00	103.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.085.000,00	103.485.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
1216	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1217	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	25.085.000,00	28.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.085.000,00	28.485.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1218	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100 %											
1219	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	20.855.000,00	24.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.855.000,00	24.255.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1220	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1221	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1222	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1223	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1224	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1225	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1226	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayanan	100 %											
1227	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	20.630.000,00	24.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.630.000,00	24.030.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1228	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1229	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1230	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1231	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1232	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	25.220.000,00	28.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.220.000,00	28.620.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
1233	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1234	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
		Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	93 Persen											
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan	12 Bulan											
1235	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	17.409.356.143,00	11.830.342.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.409.356.143,00	11.830.342.168,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	100 Persen											
1236	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	3.882.000,00	3.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882.000,00	3.882.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1237	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	4.139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139.200,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1238	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.036.828.300,00	1.016.634.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.828.300,00	1.016.634.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1239	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	61.119.500,00	63.931.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.119.500,00	63.931.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1240	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1241	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 Persen											
1242	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	113.369.100,00	128.369.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.369.100,00	128.369.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil
1243	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	164.421.000,00	317.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.421.000,00	317.626.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1244	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 Persen											
1245	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.700.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00	15.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1246	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.200.000,00	100.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200.000,00	100.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1247	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	22.080.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080.000,00	480.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1248	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1249	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	306.884.750,00	302.939.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.884.750,00	302.939.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1250	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163 Unit	83.250.000,00	66.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.250.000,00	66.350.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1251	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	93 Persen											
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pesentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen											
1252	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS													
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	3 Dokumen	23.950.000,00	23.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.950.000,00	23.950.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1253	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	3 Dokumen	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1254	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD													
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	2.852.100,00	2.852.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.100,00	2.852.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1255	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	167.968.000,00	146.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.968.000,00	146.108.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
1256	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	71.674.850,00	71.674.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.674.850,00	71.674.850,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1257	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran													
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	7.674.650,00	19.674.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674.650,00	19.674.650,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1258	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	180 Orang	638.400.000,00	588.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.400.000,00	588.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 Persen											
1259	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait													
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	133.780.000,00	168.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.780.000,00	168.717.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen											
1260	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran													
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	50 Laporan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1261	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1262	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	250 Dokumen	206.892.500,00	223.607.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.892.500,00	223.607.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen											
1263	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.769.555.200,00	139.919.558.200,00	154.769.555.200,00	139.919.558.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa Lain-lain PAD Yang Sah Retribusi Daerah - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa Lain-lain PAD Yang Sah Retribusi Daerah - LRA
1264	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.335.462,00	2.164.338.329,66	0,00	0,00	2.227.335.462,00	2.164.338.329,66	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1265	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845.170.400,00	12.845.170.400,00	12.845.170.400,00	12.845.170.400,00	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 Persen											
1266	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	62.800.000,00	62.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800.000,00	62.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	98 Persen											
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen											
1267	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga													
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	100.900.000,00	215.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.900.000,00	215.150.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1268	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	30 Dokumen	4.491.000,00	4.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491.000,00	4.491.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1269	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1270	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan	44.730.000,00	4.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.730.000,00	4.430.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1271	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	30 Laporan	131.250.000,00	95.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.250.000,00	95.250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
1272	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	12 Laporan	103.050.000,00	52.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.050.000,00	52.650.000,00	Pajak Daerah Pajak Daerah
1273	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	118.301.000,00	103.900.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.301.000,00	103.900.650,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Penerimaan Pembiayaan
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan	83 Persen											
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen											
1274	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1275	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1276	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1277	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	22 Unit	343.671.000,00	319.821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.671.000,00	319.821.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1278	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3000 Laporan	960.054.500,00	925.994.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.054.500,00	925.994.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Penerimaan Pembiayaan
1279	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1280	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)													
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	0 Obyek Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1281	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1282	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1283	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1284	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	324 Dokumen	1.557.865.000,00	1.724.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.865.000,00	1.724.625.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah Penerimaan Pembiayaan
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.03	KEPEGAWAIAN													
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen											
1285	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.332.500,00	1.332.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.500,00	1.332.500,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan											
1286	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	5.007.153.000,00	5.417.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007.153.000,00	5.417.153.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1287	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan											
1288	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen											
1289	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	15.640.000,00	15.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.640.000,00	15.640.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen											
1290	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.109.800,00	1.109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.800,00	1.109.800,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1291	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	895.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.200,00	0,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1292	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	77.282.500,00	77.282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.282.500,00	77.282.500,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1293	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1294	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2160 Dokumen	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340.000,00	5.340.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1295	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1296	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Unit											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1297	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1298	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1299	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1300	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26 Laporan											
1301	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1302	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100.000,00	26.100.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1303	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	142.900.000,00	179.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.900.000,00	179.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	15 Unit											
1304	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	53.597.500,00	97.277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.597.500,00	97.277.500,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1305	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530.000,00	3.530.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1306	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.03.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Organisasi yang tertata	2 Dokumen											
1307	5.03.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Pelayanan	30 Persen											
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	6 Dokumen											
1308	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	47.562.500,00	54.462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.562.500,00	54.462.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
1309	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	16.227.500,00	16.227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.227.500,00	16.227.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1310	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	18.283.000,00	21.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.283.000,00	21.783.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
1311	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	17.837.500,00	21.337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.837.500,00	21.337.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
1312	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	40 Dokumen	200.000,00	200.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1313	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	30 Laporan	3.945.000,00	3.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945.000,00	3.945.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Persentase Layanan Aparatur	3 Dokumen											
1314	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	26.392.500,00	26.392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.392.500,00	26.392.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1315	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN													
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	37.960.000,00	44.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.960.000,00	44.760.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1316	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	12 Dokumen	20.050.000,00	28.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050.000,00	28.050.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN	3 Dokumen											
1317	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	39.187.500,00	39.187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.187.500,00	39.187.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1318	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN													
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	30 Orang	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1319	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional													
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang	106.414.000,00	120.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.414.000,00	120.214.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen											
1320	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai													
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 Orang	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.000,00	2.574.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1321	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN													
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1250 Orang	21.067.500,00	21.067.500,00	125.248.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.315.500,00	121.067.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN mendapatkan Pendidikan Diklat	80 Persen											
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis	1 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1322	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2 Laporan											
1323	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	565.955.500,00	736.930.500,00	29.177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.133.000,00	736.930.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		Badan Riset dan Inovasi Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi Pemerintah Daerah	100 %											
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen											
1324	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	JUmlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	17 Dokumen											
1325	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5 Orang/bulan	790.132.000,00	1.140.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.132.000,00	1.140.132.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1326	5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	JUmlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	25 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1327	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.878.900,00	1.878.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.900,00	1.878.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1328	5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.107.600,00	2.107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.600,00	2.107.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1329	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	36.224.800,00	36.224.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.224.800,00	36.224.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1330	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.566.000,00	2.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.000,00	2.566.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1331	5.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1332	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	Lain-lain PAD Yang Sah Lain-lain PAD Yang Sah
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit											
1333	5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1334	5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	42.542.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.542.000,00	31.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1335	5.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36 Laporan											
1336	5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.430.000,00	4.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430.000,00	4.430.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1337	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1338	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.560.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.560.000,00	54.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit											
1339	5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	46.555.700,00	46.555.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.555.700,00	46.555.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1340	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	3.570.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1341	5.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Penelitian dan pengembangan Daerah undefined	100 % undefined undefined											
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	8 Dokumen											
1342	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan													
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1343	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan													
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1344	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	4 Laporan	341.337.100,00	341.897.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.337.100,00	341.897.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan di Bidang sosial dan kependudukan	4 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1345	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembagan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan	12 Dokumen											
1346	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1347	5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Kelompok Inovasi dan teknologi yang telah di uji cobakan	2 Dokumen											
1348	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	158.358.800,00	114.478.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.358.800,00	114.478.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah
1349	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	53.629.400,00	45.011.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.629.400,00	45.011.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Inspektorat													
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH													
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintahan Daerah	100 %											
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68 Orang											
1350	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	8.906.042.000,00	11.306.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906.042.000,00	11.306.042.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan	52 Orang											
1351	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	66 Orang	2.384.400.000,00	1.136.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.400.000,00	1.136.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1352	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	1.068.400,00	1.068.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.400,00	1.068.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1353	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	260.111.800,00	135.531.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.111.800,00	135.531.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah
1354	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48211 Paket	8.035.500,00	8.035.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035.500,00	8.035.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1355	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1356	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1500 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Umum	25 Unit											
1357	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	104 Unit	0,00	0,00	9.642.800,00	161.031.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642.800,00	161.031.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH)
1358	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	0,00	0,00	131.892.000,00	155.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.892.000,00	155.081.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Paket											
1359	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1360	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.750.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750.000,00	13.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1361	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	122.966.800,00	133.466.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.966.800,00	133.466.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Paket											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1362	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	174.898.900,00	175.448.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.898.900,00	175.448.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1363	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	29.410.000,00	29.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.410.000,00	29.410.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan KDH (Tindak Lanjut)	100 %											
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil Pengawasan Internal	1 Dokumen											
1364	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	47.520.000,00	122.320.000,00	120.200.000,00	145.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.720.000,00	267.520.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1365	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja													
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan	73.315.500,00	73.315.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.315.500,00	73.315.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1366	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan													
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	40 Laporan	26.684.500,00	26.684.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.684.500,00	26.684.500,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1367	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal													
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	10 Kesepakatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1368	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	72.510.000,00	72.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.510.000,00	72.510.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pegawasan dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan											
1369	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah													
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	32.200.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200.000,00	33.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase Monev,Koordinasi,Pendampingan,Asistensi dan Verifikasi Pengawasan (MCP)	100 %											
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan,Asistensi,Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1370	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	29 perangkat daerah	66.120.000,00	66.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.120.000,00	66.120.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1371	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15 perangkat daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1372	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	575.380.000,00	380.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.380.000,00	380.460.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1373	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15 perangkat daerah	80.950.000,00	80.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.950.000,00	80.950.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		Kecamatan Bangli													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan											
1374	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	6.827.500,00	387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827.500,00	387.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan											
1375	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	6.533.322.000,00	6.373.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533.322.000,00	6.373.322.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan Jumlah/Jenis instalasi listrik Bangunan ktr yang tersedia Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Dokumen 26 paket 250 Laporan 6 paket 11 paket 25 paket											
1376	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1377	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	2.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832.000,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1378	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	353.318.700,00	347.378.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.318.700,00	347.378.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1379	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11.302.400,00	11.804.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.302.400,00	11.804.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1380	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1381	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit											
1382	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 12 Laporan 2 Laporan											
1383	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1384	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.685.000,00	61.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.685.000,00	61.735.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1385	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.516.146.000,00	1.541.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.146.000,00	1.541.866.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2 Unit 13 Unit 50 Unit											
1386	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	67.584.900,00	67.584.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.584.900,00	67.584.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1387	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	11.360.000,00	11.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.360.000,00	11.360.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1388	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	- Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamat	12 Dokumen											
1389	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan											
1390	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	6.300.000,00	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	3.880.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19 Laporan											
1391	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19 Laporan	27.527.500,00	25.107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.527.500,00	25.107.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Laporan 4 Lembaga Kemasyarakat 15 Pokmas/ Ormas 17 Unit											
1392	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	316.695.000,00	362.592.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.695.000,00	362.592.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pajak Daerah
1393	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	329.550.000,00	406.881.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.550.000,00	406.881.210,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pajak Daerah
1394	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	333.050.000,00	371.616.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.050.000,00	371.616.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pajak Daerah
1395	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	393.835.200,00	450.105.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.835.200,00	450.105.075,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pajak Daerah
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan											
1396	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5.900.000,00	9.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	9.030.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan umum	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	750 Orang											
1397	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	750 Orang	34.482.000,00	32.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.482.000,00	32.062.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen											
1398	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	6.705.000,00	4.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705.000,00	4.285.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Kintamani													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen											
1399	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1400	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	16.010.000,00	16.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010.000,00	16.010.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan											
1401	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	3.300.677.000,00	2.950.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.677.000,00	2.950.677.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan											
1402	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1403	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	235.280.800,00	238.780.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.280.800,00	238.780.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah
1404	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	350 Dokumen	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-											
1405	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1406	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan											
1407	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1408	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1409	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	87.300.000,00	80.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300.000,00	80.920.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit											
1410	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	167.273.250,00	170.773.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.273.250,00	170.773.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1411	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1412	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-											
1413	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1414	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	12 Laporan											
1415	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Dokumen	7.142.800,00	7.142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142.800,00	7.142.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1416	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	101.365.200,00	118.865.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.365.200,00	118.865.200,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen dan laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 Laporan											
1417	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 Laporan undefined undefined											
1418	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	48 Lembaga Kemasyarakatan	9.860.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860.000,00	1.140.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
1419	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	59.114.000,00	62.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.114.000,00	62.614.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-											
1420	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	48 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1421	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	48 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1422	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1423	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan											
1424	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	36.224.400,00	39.724.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.224.400,00	39.724.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
1425	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-											
1426	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-											
1427	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	400 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1428	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	240 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1429	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Laporan											
1430	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	48 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1431	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48 Dokumen	69.816.800,00	76.816.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.816.800,00	76.816.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
1432	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	48 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1433	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	48 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1434	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	48 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1435	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	48 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
1436	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	48 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
		Kecamatan Susut													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen											
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan											
1437	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.939.162.000,00	3.079.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.162.000,00	3.079.162.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan 10 Paket 10 Paket 10 Paket											
1438	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	946.200,00	1.186.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.200,00	1.186.200,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1439	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	213.659.600,00	213.709.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.659.600,00	213.709.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah
1440	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	7.350.400,00	7.352.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350.400,00	7.352.400,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1441	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1442	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	8 unit											
1443	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	7.920.000,00	7.920.000,00	39.121.000,00	22.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.041.000,00	30.310.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat /Bahan untuk kegiatan Kantor(Benda Pos) Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Dokumen 12 Laporan 2 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1444	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310.000,00	3.310.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1445	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	67.650.000,00	67.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.650.000,00	67.648.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1446	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	36.480.000,00	16.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.480.000,00	16.980.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perijinan kendaraan dinas Operasional Lapangan Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya JumlahPemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	6 Unit 5 Unit 1 Unit											
1447	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	57.124.250,00	56.114.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.124.250,00	56.114.250,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1448	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	5.390.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390.000,00	4.380.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1449	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	prosentase pelayan publik yang dilakukan	86 persen											
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	1 Laporan											
1450	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	4.710.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00	3.700.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	96 persen											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga 1 Laporan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1451	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	27 Lembaga Kemasyarakatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1452	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	41.230.000,00	47.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.230.000,00	47.220.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	100 persen											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban	1 Laporan 1 Laporan											
1453	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	42.610.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.610.000,00	48.600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	96 persen											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra Suku,Umat berAgama ,Ras dan Golongan lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan lokal Regional dan Nasional	9 Desa											
1454	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	90 Orang	11.768.050,00	10.758.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.768.050,00	10.758.050,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	86 persen											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 Dokumen undefined											
1455	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	21.100.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100.000,00	24.600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kecamatan Tembuku													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan											
1456	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	3.784.385.000,00	3.534.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.385.000,00	3.534.385.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Stel											
1457	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan											
1458	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1459	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.459.000,00	3.459.000,00	3.197.800,00	3.197.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656.800,00	6.656.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1460	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	128.114.700,00	128.114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.114.700,00	128.114.700,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1461	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1462	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1463	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	350 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 unit											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1464	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	12.450.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450.000,00	10.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1465	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan											
1466	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	225 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1467	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.516.000,00	17.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.516.000,00	17.966.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1468	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	107.700.000,00	101.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700.000,00	101.320.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 unit											
1469	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	70.603.200,00	70.603.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.603.200,00	70.603.200,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1470	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH)
1471	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100 persen											
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1472	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
1473	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6 Laporan											
1474	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	38.640.000,00	38.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.640.000,00	38.640.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Laporan											
1475	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6 Laporan											
1476	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6 Dokumen	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen											
1477	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.702.060.000,00	3.712.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702.060.000,00	3.712.060.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1478	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	21.085.000,00	29.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.085.000,00	29.745.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen											
1479	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.386.200,00	1.386.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.200,00	1.386.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1480	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	12.863.200,00	12.863.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.863.200,00	12.863.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1481	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket	60.498.000,00	54.800.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.498.000,00	54.800.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1482	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	8.530.000,00	3.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530.000,00	3.893.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1483	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
1484	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.270.000,00	5.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270.000,00	5.270.000,00	Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1485	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.250.000,00	31.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14 Unit											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1486	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	77.657.600,00	79.819.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.657.600,00	79.819.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1487	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	10.060.000,00	10.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060.000,00	10.060.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat dalam Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100 Persen											
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen											
1488	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60 Orang	955.415.450,00	958.915.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.415.450,00	958.915.450,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah
1489	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60 Orang	21.647.500,00	21.647.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.647.500,00	21.647.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	72 Persen											
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1490	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	803.894.932,00	803.894.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.894.932,00	803.894.932,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1491	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25 Orang	91.050.000,00	101.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.050.000,00	101.550.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
1492	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60 Orang	15.995.000,00	13.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.995.000,00	13.265.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	75 Persen											
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	60 Orang											
1493	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 Orang	13.938.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.938.000,00	12.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	80 Persen											
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Orang											
1494	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	125.605.000,00	125.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.605.000,00	125.605.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	85 Persen											
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen											
1495	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35 Orang	84.068.550,00	84.068.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.068.550,00	84.068.550,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1496	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	120.825.000,00	131.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.825.000,00	131.325.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah

Kab. Bangli, 2 September 2025
Bupati

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Lampiran V : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 2 September 2025

KABUPATEN BANGLI
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1				PELAYANAN UMUM										
1	01	1	01	Pendidikan	234.879.874.400,00	227.090.371.660,00	142.500.000,00	127.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.022.374.400,00	227.217.871.660,00
1	01	1	02	Kesehatan	190.900.420.668,00	193.854.036.983,89	6.698.586.198,00	8.013.648.487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	197.599.006.866,00	201.867.685.471,47
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.903.750.950,00	13.411.174.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.903.750.950,00	13.411.174.950,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	17.680.972.150,00	17.540.001.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680.972.150,00	17.540.001.150,00
1	01	1	06	Sosial	5.283.581.050,00	5.051.357.050,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283.581.050,00	5.072.357.050,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	27.434.872.500,00	25.853.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.434.872.500,00	25.853.877.000,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.193.776.400,00	6.528.246.400,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203.776.400,00	6.538.246.400,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.650.658.600,00	8.049.676.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650.658.600,00	8.049.676.100,00
1	01	2	15	Perhubungan	5.473.136.050,00	5.359.451.050,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515.636.050,00	5.401.951.050,00
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	4.529.246.850,00	4.618.306.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529.246.850,00	4.618.306.850,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.692.030.900,00	5.654.088.400,00	209.382.000,00	239.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901.412.900,00	5.893.470.400,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	6.611.835.800,00	6.671.905.800,00	92.200.000,00	92.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704.035.800,00	6.764.105.800,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	01	2	20	Statistik	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
1	01	2	24	Kearsipan	25.714.000,00	25.714.000,00	62.963.000,00	20.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.677.000,00	46.177.000,00
1	01	3	26	Pariwisata	6.057.614.500,00	5.926.544.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057.614.500,00	5.926.544.500,00
1	01	3	27	Pertanian	26.562.531.850,00	26.823.296.850,00	424.440.000,00	471.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.986.971.850,00	27.295.271.850,00
1	01	3	31	Perindustrian	5.705.417.400,00	5.419.447.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705.417.400,00	5.419.447.400,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	73.517.099.900,00	71.542.478.100,00	1.395.103.000,00	4.008.101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.912.202.900,00	75.550.579.400,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	49.051.061.000,00	49.392.291.800,00	0,00	605.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.051.061.000,00	49.997.668.800,00
1	01	5	01	Perencanaan	5.975.943.750,00	6.061.818.150,00	6.600.000,00	173.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982.543.750,00	6.235.620.150,00
1	01	5	02	Keuangan	23.749.894.493,00	18.175.506.318,00	277.790.100,00	445.995.100,00	2.227.335.462,00	2.164.338.329,66	167.614.725.600,00	152.764.728.600,00	193.869.745.655,00	173.550.568.347,66
1	01	5	03	Kepegawaian	6.012.506.500,00	6.247.291.300,00	150.248.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.162.754.500,00	6.347.291.300,00
1	01	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	565.955.500,00	736.930.500,00	29.177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.133.000,00	736.930.500,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	1.515.115.300,00	1.812.217.300,00	42.542.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.657.300,00	1.843.817.300,00
1	01	6	01	Inspektorat	12.933.683.400,00	13.843.582.700,00	261.734.800,00	461.312.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195.418.200,00	14.304.894.800,00
1	01	7	01	Kecamatan	21.788.755.850,00	21.409.031.135,00	304.768.800,00	515.587.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.093.524.650,00	21.924.618.935,00
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	6.172.099.432,00	6.196.719.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.099.432,00	6.196.719.432,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN										

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2.578.552.800,00	2.801.485.800,00	6.124.996.900,00	6.124.996.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.703.549.700,00	8.926.482.700,00
2	03	1	06	Sosial	49.603.600,00	53.103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.603.600,00	53.103.600,00
3				EKONOMI										
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.555.032.700,00	7.193.733.260,00	18.477.799.300,00	122.410.346.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.032.832.000,00	129.604.080.000,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	94.931.650,00	172.670.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.931.650,00	172.670.850,00
3	04	2	09	Pangan	706.407.500,00	698.827.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.407.500,00	698.827.500,00
3	04	2	15	Perhubungan	2.732.427.600,00	2.932.198.950,00	104.000.000,00	151.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836.427.600,00	3.083.198.950,00
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	2.603.560.000,00	3.326.830.000,00	0,00	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603.560.000,00	3.428.830.000,00
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	542.900.900,00	730.250.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.900.900,00	730.250.900,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	303.958.350,00	316.598.350,00	254.600.000,00	254.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.558.350,00	571.198.350,00
3	04	2	21	Persandian	62.720.000,00	74.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.720.000,00	74.720.000,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	898.625.000,00	954.448.500,00	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.125.000,00	1.114.948.500,00
3	04	3	27	Pertanian	2.447.154.850,00	3.592.554.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.154.850,00	3.592.554.850,00
3	04	3	30	Perdagangan	3.458.417.600,00	3.873.741.000,00	315.965.200,00	717.181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774.382.800,00	4.590.922.800,00
3	04	3	31	Perindustrian	4.182.740.000,00	4.264.340.000,00	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182.740.000,00	4.489.340.000,00
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP										

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.460.210.000,00	488.420.000,00	200.000.000,00	348.701.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.210.000,00	837.121.150,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	7.107.151.413,00	7.417.634.586,00	4.000.000.000,00	4.263.294.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.107.151.413,00	11.680.929.363,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM										
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.090.816.981,00	5.683.619.406,00	82.700.000,00	486.847.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173.516.981,00	6.170.466.606,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.151.620.000,00	6.649.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151.620.000,00	6.649.840.000,00
6				KESEHATAN										
6	07	1	02	Kesehatan	58.713.539.714,00	66.646.907.613,00	13.493.752.900,00	13.870.132.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.207.292.614,00	80.517.039.743,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.371.103.400,00	3.464.953.400,00	944.500.600,00	944.500.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315.604.000,00	4.409.454.000,00
7				PARIWISATA										
7	08	3	26	Pariwisata	24.570.918.800,00	27.746.535.000,00	133.810.000,00	357.379.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.704.728.800,00	28.103.914.800,00
8				PENDIDIKAN										
8	10	1	01	Pendidikan	53.916.570.255,00	54.751.651.178,00	25.747.628.745,00	22.964.227.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.664.199.000,00	77.715.878.488,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	2.817.806.800,00	6.555.276.390,00	30.100.000,00	1.698.056.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.906.800,00	8.253.332.902,00
8	10	2	22	Kebudayaan	9.066.637.800,00	9.829.837.800,00	54.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.121.137.800,00	9.847.337.800,00
8	10	2	23	Perpustakaan	125.997.250,00	143.497.250,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.007.250,00	144.507.250,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL										
9	11	1	06	Sosial	293.277.900,00	349.812.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.277.900,00	349.812.900,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	411.132.500,00	454.356.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.132.500,00	454.356.500,00
9	11	3	32	Transmigrasi	23.928.750,00	23.928.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.928.750,00	23.928.750,00
				TOTAL	**968.210.393.306,00**	**974.492.237.211,89**	**80.276.399.043,00**	**190.477.718.706,58**	**2.227.335.462,00**	**2.164.338.329,66**	**167.614.725.600,00**	**152.764.728.600,00**	**1.218.328.853.411,00**	**1.319.899.022.848,13**

Kab. Bangli, 2 September 2025

Bupati

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Lampiran VI : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 2 September 2025

KABUPATEN BANGLI
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
A SPM Bidang Pendidikan				
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.567.400.000,00	2.570.800.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.905.000.000,00	3.398.500.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	83.550.000,00	86.950.000,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	22.400.000,00	22.400.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.854.000.000,00	613.060.920,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	421.800.000,00	421.800.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	88.696.000,00	88.696.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.271.000.000,00	5.847.766.466,00
		Total	9.213.846.000,00	13.049.973.386,00
2.	Literasi dan Numerasi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	90.177.000,00	177.587.000,00
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.877.500,00	29.367.500,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00	0,00
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00	30.082.000,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	3.625.000.000,00	1.512.500.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.525.000.000,00	8.883.000.000,00
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0,00	0,00
		Total	11.271.054.500,00	10.632.536.500,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
3.	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19.400.100,00	19.400.100,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00	0,00
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0,00	26.935.500,00
		Total	19.400.100,00	46.335.600,00
4.	Kekhususan PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	216.800.000,00	53.600.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	0,00	150.000.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0,00	137.958.650,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	87.530.000,00	98.490.000,00
		Total	304.330.000,00	440.048.650,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan	20.808.630.600,00	24.168.894.136,00
B SPM Bidang Kesehatan				
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	735.850.000,00	506.800.000,00
		Total	735.850.000,00	506.800.000,00
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	84.325.000,00	84.325.000,00
		Total	84.325.000,00	84.325.000,00
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	249.997.000,00	249.997.000,00
		Total	249.997.000,00	249.997.000,00
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	42.825.000,00	42.825.000,00
		Total	42.825.000,00	42.825.000,00
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	332.325.000,00	252.325.000,00
		Total	332.325.000,00	252.325.000,00
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	92.250.000,00	46.150.000,00
		Total	92.250.000,00	46.150.000,00
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	177.213.000,00	136.893.000,00
		Total	177.213.000,00	136.893.000,00
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	42.475.000,00	42.475.000,00
		Total	42.475.000,00	42.475.000,00
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	27.475.000,00	27.475.000,00
		Total	27.475.000,00	27.475.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	142.875.000,00	142.875.000,00
		Total	142.875.000,00	142.875.000,00
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	305.675.000,00	106.625.000,00
		Total	305.675.000,00	106.625.000,00
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	50.475.000,00	50.475.000,00
		Total	50.475.000,00	50.475.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan	2.283.760.000,00	1.689.240.000,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5.173.516.981,00	5.683.619.406,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,00	486.847.200,00
		Total	5.173.516.981,00	6.170.466.606,00
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	2.310.000.000,00	330.000.000,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000,00	248.701.150,00
		Total	2.410.000.000,00	578.701.150,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7.583.516.981,00	6.749.167.756,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	350.000.000,00	180.000.000,00
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0,00	0,00
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0,00	0,00
		Total	350.000.000,00	180.000.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	350.000.000,00	180.000.000,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
1.	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.286.913.300,00	1.297.443.300,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	6.240.000,00	3.840.000,00
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	2.183.100,00	2.183.100,00
		Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	247.500,00	247.500,00
		Total	1.295.583.900,00	1.303.713.900,00
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	41.670.200,00	41.670.200,00
		Total	41.670.200,00	41.670.200,00
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	6.060.000,00	56.060.000,00
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	726.699.800,00	801.699.800,00
		Total	732.759.800,00	857.759.800,00
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	257.320.000,00	304.920.000,00
		Total	257.320.000,00	304.920.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.327.333.900,00	2.508.063.900,00
F SPM Bidang Sosial				
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0,00	0,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	87.652.800,00	98.052.800,00
		Penyediaan Alat Bantu	57.000.000,00	39.500.000,00
		Penyediaan Permakanan	0,00	0,00
		Total	144.652.800,00	137.552.800,00
2.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	0,00	0,00
		Penyediaan Makanan	49.603.600,00	53.103.600,00
		Total	49.603.600,00	53.103.600,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial	194.256.400,00	190.656.400,00

Kab. Bangli, 2 September 2025
Bupati

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Lampiran VII : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 2 September 2025

KABUPATEN BANGLI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0,00	379.630.000,00	480.230.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.283.581.050,00	5.072.357.050,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	0,00	53.920.000,00	47.095.000,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	0,00	137.484.700,00	142.454.700,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	1.553.401.700,00	1.769.816.985,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0,00	49.603.600,00	53.103.600,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	89.494.400,00	102.114.400,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.705.417.400,00	5.419.447.400,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	0,00	755.450.000,00	560.530.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0,00	204.906.900,00	218.806.900,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	235.022.374.400,00	227.217.871.660,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	0,00	441.272.400,00	468.972.400,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	0,00	1.390.920.000,00	1.390.920.000,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	0,00	57.327.700,00	60.827.700,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	4.529.246.850,00	4.618.306.850,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	0,00	2.499.014.000,00	7.891.010.102,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	27.434.872.500,00	25.853.877.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	03		KEPEGAWAIAN			
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	522.349.000,00	514.601.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	6.744.061.700,00	6.942.591.700,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	553.325.300,00	501.387.300,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0,00	46.134.500,00	29.274.500,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00	2.410.000.000,00	578.701.150,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0,00	75.505.000,00	85.905.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	02		SEKRETARIAT DPRD			
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	43.136.671.000,00	43.895.278.800,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0,00	9.130.427.000,00	1.131.175.000,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	5.801.620.000,00	814.840.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0,00	16.383.950,00	16.383.950,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	197.599.006.866,00	201.867.685.471,47
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0,00	7.263.800,00	7.263.800,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	0,00	747.460.200,00	796.483.700,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0,00	138.438.600,00	148.238.600,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0,00	9.312.355.513,00	9.796.117.477,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	125.605.000,00	125.605.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00	412.817.600,00	1.009.817.600,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	6.704.035.800,00	6.764.105.800,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0,00	502.722.000,00	475.871.650,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0,00	95.945.500,00	100.689.500,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	0,00	5.020.000,00	5.020.000,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0,00	977.062.950,00	980.562.950,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0,00	910.939.932,00	918.709.932,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	595.133.000,00	736.930.500,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	3.939.660.000,00	3.944.148.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	03		KEPEGAWAIAN			
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.640.405.500,00	5.832.690.300,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0,00	31.282.050,00	34.782.050,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0,00	78.524.000,00	76.604.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0,00	311.664.800,00	318.464.800,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	26.986.971.850,00	27.295.271.850,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	26.931.918.450,00	26.900.584.550,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	2.415.000,00	1.050.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0,00	668.100.000,00	3.149.309.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	6.057.614.500,00	5.926.544.500,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	125.288.000,00	165.688.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	46.250.050,00	42.820.050,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	47.084.157.300,00	47.793.367.700,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	0,00	11.940.000,00	540.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	194.495.000,00	211.495.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0,00	706.920.000,00	756.820.000,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0,00	214.257.000,00	173.427.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0,00	30.591.000,00	21.691.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	0,00	1.831.847.000,00	2.014.727.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0,00	896.127.150,00	856.627.150,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0,00	203.144.000,00	266.194.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0,00	350.000.000,00	180.000.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	0,00	8.281.500,00	2.581.500,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	1.004.332.000,00	1.342.430.000,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	204.893.550,00	215.393.550,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	0,00	21.220.000,00	95.459.200,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	02		SEKRETARIAT DPRD			
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	0,00	5.914.390.000,00	6.102.390.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	624.683.000,00	708.383.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	0,00	2.574.743.900,00	2.489.493.900,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	20.172.958.700,00	19.756.297.700,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	0,00	396.438.000,00	444.038.000,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	0,00	94.350.100,00	104.850.100,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	0,00	2.217.764.000,00	2.261.714.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0,00	121.054.500,00	206.954.500,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	0,00	3.623.988.200,00	4.436.428.200,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	0,00	6.480.613.100,00	7.293.583.100,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0,00	48.051.450,00	48.051.450,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	17.680.972.150,00	17.540.001.150,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	0,00	2.788.376.150,00	3.035.147.500,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0,00	1.245.528.000,00	1.360.766.036,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	0,00	144.652.800,00	187.187.800,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	820.281.000,00	969.681.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	375.534.900,00	368.467.350,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	0,00	1.632.600.000,00	2.368.570.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.163.365.750,00	5.315.742.150,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0,00	255.514.000,00	254.014.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0,00	119.743.450,00	137.243.450,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	0,00	59.345.000,00	159.345.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0,00	250.210.000,00	258.420.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0,00	11.981.250,00	6.111.750,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	0,00	62.720.000,00	74.720.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	102.381.800,00	110.461.800,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	0,00	83.657.000,00	41.157.000,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	13.938.000,00	12.300.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0,00	458.790.000,00	458.790.000,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0,00	54.275.000,00	57.775.000,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0,00	79.492.353.500,00	77.467.032.988,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	1.563.050.000,00	1.539.853.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	0,00	201.222.000,00	222.122.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	19.331.029.993,00	13.850.555.168,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.515.636.050,00	5.401.951.050,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	297.529.850,00	297.530.500,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.901.412.900,00	5.893.470.400,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0,00	23.928.750,00	23.928.750,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	13.903.750.950,00	13.411.174.950,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	12.060.338.200,00	13.264.134.800,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0,00	4.182.740.000,00	4.489.340.000,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	812.416.700,00	827.616.700,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0,00	62.810.000,00	85.450.000,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	0,00	970.960.000,00	1.060.260.000,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0,00	469.765.500,00	499.515.500,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0,00	61.375.000,00	61.375.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0,00	1.038.039.900,00	1.043.439.900,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0,00	34.145.500,00	26.305.500,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	2.861.590.500,00	2.970.440.500,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	70.630.691.764,00	78.791.038.243,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	5.173.516.981,00	6.170.466.606,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	0,00	198.892.800,00	212.322.800,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	0,00	5.416.750,00	1.321.750,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	0,00	65.780.800,00	64.260.800,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	0,00	24.449.214.800,00	27.849.900.800,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	0,00	152.598.600,00	676.898.600,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0,00	15.205.040.000,00	123.303.453.860,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	0,00	11.956.000,00	6.256.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.406.297.300,00	5.687.197.300,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	29.265.000,00	49.265.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0,00	129.038.000,00	143.108.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0,00	22.385.000,00	25.885.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0,00	171.174.403.162,00	156.253.701.029,66
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0,00	403.528.350,00	429.628.350,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.357.668.750,00	5.131.306.250,00
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	1.452.861.350,00	901.061.350,00

Kab. Bangli, 2 September 2025

Bupati

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Lampiran VIII : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 2 September 2025

KABUPATEN BANGLI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000						Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	318.962.083.050,00	314.862.083.050,00	313.187.083.050,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	313.400.217.088,00	306.733.750.148,00	304.933.750.148,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	313.400.217.088,00	306.733.750.148,00	304.933.750.148,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	79.559.582.988,00	77.467.032.988,00	77.467.032.988,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	49.855.956.003,00	47.755.846.003,00	47.755.846.003,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	650.469.428,00	650.469.428,00	650.469.428,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	226.388.357,00	226.388.357,00	226.388.357,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.439.750.000,00	3.439.750.000,00	3.439.750.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	183.424.243,00	183.424.243,00	183.424.243,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4.700.861,00	4.700.861,00	4.700.861,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	43.598.333,00	43.598.333,00	43.598.333,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.067.500,00	5.067.500,00	5.067.500,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8.883.000.000,00	8.883.000.000,00	8.883.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19.400.100,00	19.400.100,00	19.400.100,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	23.236.520.000,00	23.248.910.000,00	23.248.910.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	808.904.604,00	808.904.604,00	808.904.604,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	3.625.000.000,00	1.512.500.000,00	1.512.500.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30.082.000,00	30.082.000,00	30.082.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	421.800.000,00	421.800.000,00	421.800.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	613.060.920,00	613.060.920,00	613.060.920,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.705.927.191,00	1.705.927.191,00	1.705.927.191,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.847.766.466,00	5.847.766.466,00	5.847.766.466,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	88.696.000,00	88.696.000,00	88.696.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22.576.980.635,00	22.576.980.635,00	22.576.980.635,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.296.000.000,00	1.296.000.000,00	1.296.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	192.112.935,00	192.112.935,00	192.112.935,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	237.000.000,00	237.000.000,00	237.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	228.000.000,00	228.000.000,00	228.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	161.304.000,00	161.304.000,00	161.304.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.879.000.000,00	4.879.000.000,00	4.879.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	14.911.290.000,00	14.911.290.000,00	14.911.290.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	19.999.800,00	19.999.800,00	19.999.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	26.935.500,00	26.935.500,00	26.935.500,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	18.138.400,00	18.138.400,00	18.138.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	399.800.000,00	399.800.000,00	399.800.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.001.762.650,00	7.009.322.650,00	7.009.322.650,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	299.974.000,00	299.974.000,00	299.974.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.570.800.000,00	2.570.800.000,00	2.570.800.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.398.500.000,00	3.398.500.000,00	3.398.500.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	53.600.000,00	53.600.000,00	53.600.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	90.930.000,00	98.490.000,00	98.490.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	137.958.650,00	137.958.650,00	137.958.650,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	124.883.700,00	124.883.700,00	124.883.700,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	86.950.000,00	86.950.000,00	86.950.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	37.933.700,00	37.933.700,00	37.933.700,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	21.691.000,00	21.691.000,00	21.691.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	21.691.000,00	21.691.000,00	21.691.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	21.691.000,00	21.691.000,00	21.691.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	203.324.500,00	206.954.500,00	206.954.500,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	203.324.500,00	206.954.500,00	206.954.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	29.367.500,00	29.367.500,00	29.367.500,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	173.957.000,00	177.587.000,00	177.587.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	20.200.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.200.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	06	2.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	20.200.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	233.595.418.600,00	229.017.871.660,00	227.217.871.660,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	231.619.749.000,00	226.991.852.060,00	225.191.852.060,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	231.619.749.000,00	226.991.852.060,00	225.191.852.060,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.960.000,00	30.960.000,00	30.960.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	30.960.000,00	30.960.000,00	30.960.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	282.195.350,00	288.865.350,00	288.865.350,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.730.800,00	6.730.800,00	6.730.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.842.000,00	3.842.000,00	3.842.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	234.777.800,00	238.747.800,00	238.747.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.334.750,00	36.034.750,00	36.034.750,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.400.000,00	120.400.000,00	120.400.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.400.000,00	120.400.000,00	120.400.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.105.386.000,00	1.125.666.000,00	1.125.666.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.186.000,00	165.186.000,00	165.186.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	944.200.000,00	940.480.000,00	940.480.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.928.250,00	419.328.250,00	419.328.250,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.528.250,00	256.438.250,00	256.438.250,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.400.000,00	52.890.000,00	52.890.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.561.865.962,00	8.128.332.902,00	8.253.332.902,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.561.865.962,00	8.128.332.902,00	8.253.332.902,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	205.692.800,00	212.322.800,00	212.322.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	205.692.800,00	212.322.800,00	212.322.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	205.692.800,00	212.322.800,00	212.322.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5.206.173.162,00	7.766.010.102,00	7.891.010.102,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.278.320.250,00	2.278.320.250,00	2.308.320.250,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	2.278.320.250,00	2.278.320.250,00	2.308.320.250,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.500.000.000,00	3.612.250.300,00	3.612.250.300,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	1.500.000.000,00	3.612.250.300,00	3.612.250.300,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.427.852.912,00	1.875.439.552,00	1.970.439.552,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	1.427.852.912,00	1.875.439.552,00	1.970.439.552,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kesehatan	107.042.341.725,00	107.042.341.725,00	107.315.518.225,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	107.042.341.725,00	107.042.341.725,00	107.315.518.225,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	107.042.341.725,00	107.042.341.725,00	107.315.518.225,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	55.718.401.225,00	55.718.401.225,00	55.991.577.725,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.443.070.417,00	6.443.070.417,00	6.465.770.417,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	477.403.900,00	477.403.900,00	446.126.380,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	598.158.000,00	598.158.000,00	620.858.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	63.301.200,00	63.301.200,00	63.301.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.123.907.317,00	5.123.907.317,00	5.155.184.837,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	142.800.000,00	142.800.000,00	142.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.005.056.725,00	48.005.056.725,00	48.255.533.225,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	136.725.000,00	136.725.000,00	136.725.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	84.325.000,00	84.325.000,00	84.325.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	249.997.000,00	249.997.000,00	249.997.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	25.625.000,00	25.625.000,00	25.625.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.025.000,00	19.025.000,00	19.025.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	46.150.000,00	46.150.000,00	46.150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	136.893.000,00	136.893.000,00	136.893.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	42.475.000,00	42.475.000,00	42.475.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	27.475.000,00	27.475.000,00	27.475.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.475.000,00	12.475.000,00	12.475.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	50.475.000,00	50.475.000,00	50.475.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	350.000.000,00	350.000.000,00	550.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	0,00	50.476.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	83.400.000,00	83.400.000,00	83.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	90.920.000,00	90.920.000,00	90.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	309.730.000,00	309.730.000,00	309.730.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	336.560.000,00	336.560.000,00	336.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	779.613.500,00	779.613.500,00	779.613.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	44.531.295.225,00	44.531.295.225,00	44.531.295.225,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3.808.000,00	3.808.000,00	3.808.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	166.275.000,00	166.275.000,00	166.275.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	27.475.000,00	27.475.000,00	27.475.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	119.390.000,00	119.390.000,00	119.390.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	79.774.083,00	79.774.083,00	79.774.083,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	79.774.083,00	79.774.083,00	79.774.083,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.190.500.000,00	1.190.500.000,00	1.190.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.190.500.000,00	1.190.500.000,00	1.190.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	819.681.000,00	819.681.000,00	819.681.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	101.471.000,00	101.471.000,00	101.471.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	98.271.000,00	98.271.000,00	98.271.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	711.010.000,00	711.010.000,00	711.010.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	711.010.000,00	711.010.000,00	711.010.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	458.790.000,00	458.790.000,00	458.790.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	91.626.000,00	91.626.000,00	91.626.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	91.626.000,00	91.626.000,00	91.626.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	183.771.500,00	183.771.500,00	183.771.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	183.771.500,00	183.771.500,00	183.771.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	183.392.500,00	183.392.500,00	183.392.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	183.392.500,00	183.392.500,00	183.392.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	213.925.000,00	213.925.000,00	213.925.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	213.925.000,00	213.925.000,00	213.925.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	213.925.000,00	213.925.000,00	213.925.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.831.544.500,00	49.831.544.500,00	49.831.544.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.679.259.000,00	48.679.259.000,00	48.679.259.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48.555.179.000,00	48.555.179.000,00	48.555.179.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	124.080.000,00	124.080.000,00	124.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	79.900.000,00	79.900.000,00	79.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	79.900.000,00	79.900.000,00	79.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.703.300,00	205.703.300,00	205.703.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.425.500,00	7.425.500,00	7.425.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.693.200,00	7.693.200,00	7.693.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	162.611.100,00	162.611.100,00	162.611.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.973.500,00	21.973.500,00	21.973.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	186.275.700,00	186.275.700,00	186.275.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	45.937.500,00	45.937.500,00	45.937.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.338.200,00	140.338.200,00	140.338.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.929.500,00	342.929.500,00	342.929.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	286.449.500,00	286.449.500,00	286.449.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.480.000,00	36.480.000,00	36.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.077.000,00	296.077.000,00	296.077.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	268.007.000,00	268.007.000,00	268.007.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.070.000,00	28.070.000,00	28.070.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0001						Puskesmas Bangli	1.884.328.500,00	1.884.328.500,00	1.995.034.472,79
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	505.528.500,00	505.528.500,00	505.528.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	492.088.500,00	492.088.500,00	492.088.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.020.000,00	16.020.000,00	16.020.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	139.678.500,00	139.678.500,00	139.678.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	107.860.000,00	107.860.000,00	107.860.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.390.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	68.040.000,00	68.040.000,00	68.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	13.440.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	13.440.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.375.800.000,00	1.375.800.000,00	1.486.505.972,79
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.375.800.000,00	1.375.800.000,00	1.486.505.972,79
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.375.800.000,00	1.375.800.000,00	1.486.505.972,79
1.02.0.00.0.00.01.0002						Puskesmas Bangli Utara	1.814.433.000,00	1.814.433.000,00	1.902.813.786,31
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	584.213.650,00	584.213.650,00	584.213.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	584.213.650,00	584.213.650,00	584.213.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	17.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	17.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	224.183.000,00	224.183.000,00	224.183.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.900.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.400.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	54.100.000,00	54.100.000,00	54.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	132.980.650,00	132.980.650,00	132.980.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.519.350,00	12.519.350,00	12.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.519.350,00	12.519.350,00	12.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.519.350,00	12.519.350,00	12.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.217.700.000,00	1.217.700.000,00	1.306.080.786,31
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.217.700.000,00	1.217.700.000,00	1.306.080.786,31
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.217.700.000,00	1.217.700.000,00	1.306.080.786,31
1.02.0.00.0.00.01.0003						Puskesmas Susut I	2.177.028.500,00	2.177.028.500,00	2.314.736.572,79
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	557.492.500,00	557.492.500,00	557.492.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	557.492.500,00	557.492.500,00	557.492.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	31.300.000,00	31.300.000,00	31.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	197.678.500,00	197.678.500,00	197.678.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.250.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	44.050.000,00	44.050.000,00	44.050.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	126.764.000,00	126.764.000,00	126.764.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	52.150.000,00	52.150.000,00	52.150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.836.000,00	6.836.000,00	6.836.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.836.000,00	6.836.000,00	6.836.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.836.000,00	6.836.000,00	6.836.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.612.700.000,00	1.612.700.000,00	1.750.408.072,79
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.612.700.000,00	1.612.700.000,00	1.750.408.072,79
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.612.700.000,00	1.612.700.000,00	1.750.408.072,79
1.02.0.00.0.00.01.0004						Puskesmas Susut II	1.956.828.500,00	1.956.828.500,00	2.227.462.044,46
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	535.198.500,00	535.198.500,00	535.198.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	535.198.500,00	535.198.500,00	535.198.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	31.750.000,00	31.750.000,00	31.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	207.378.500,00	207.378.500,00	207.378.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.250.000,00	18.250.000,00	18.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	37.950.000,00	37.950.000,00	37.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	113.870.000,00	113.870.000,00	113.870.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.100.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	50.800.000,00	50.800.000,00	50.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	17.930.000,00	17.930.000,00	17.930.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.930.000,00	17.930.000,00	17.930.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	17.930.000,00	17.930.000,00	17.930.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.403.700.000,00	1.403.700.000,00	1.674.333.544,46
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.403.700.000,00	1.403.700.000,00	1.674.333.544,46
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.403.700.000,00	1.403.700.000,00	1.674.333.544,46
1.02.0.00.0.00.01.0005						Puskesmas Tembuku I	1.998.428.000,00	1.998.428.000,00	2.344.060.825,43
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	512.828.000,00	512.828.000,00	512.828.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	512.828.000,00	512.828.000,00	512.828.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.580.000,00	26.580.000,00	26.580.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	172.778.000,00	172.778.000,00	172.778.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	114.100.000,00	114.100.000,00	114.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	21.370.000,00	21.370.000,00	21.370.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	61.800.000,00	61.800.000,00	61.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.474.400.000,00	1.474.400.000,00	1.820.032.825,43
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.474.400.000,00	1.474.400.000,00	1.820.032.825,43
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.474.400.000,00	1.474.400.000,00	1.820.032.825,43
1.02.0.00.0.00.01.0006						Puskesmas Tembuku II	2.098.828.500,00	2.098.828.500,00	2.163.932.817,41
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	537.858.500,00	537.858.500,00	537.858.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	537.858.500,00	537.858.500,00	537.858.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.160.000,00	18.160.000,00	18.160.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	28.200.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	195.278.500,00	195.278.500,00	195.278.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22.785.000,00	22.785.000,00	22.785.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	51.515.000,00	51.515.000,00	51.515.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	123.430.000,00	123.430.000,00	123.430.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	740.000,00	740.000,00	740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.470.000,00	6.470.000,00	6.470.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.470.000,00	6.470.000,00	6.470.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.470.000,00	6.470.000,00	6.470.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.554.500.000,00	1.554.500.000,00	1.619.604.317,41
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.554.500.000,00	1.554.500.000,00	1.619.604.317,41
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.554.500.000,00	1.554.500.000,00	1.619.604.317,41
1.02.0.00.0.00.01.0007						Puskesmas Kintamani I	2.189.150.000,00	2.189.150.000,00	2.455.956.794,58
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	587.150.000,00	587.150.000,00	587.150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	587.150.000,00	587.150.000,00	587.150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	39.050.000,00	39.050.000,00	39.050.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	208.200.000,00	208.200.000,00	208.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.700.000,00	40.700.000,00	40.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	137.300.000,00	137.300.000,00	137.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	59.800.000,00	59.800.000,00	59.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.598.700.000,00	1.598.700.000,00	1.865.506.794,58
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.598.700.000,00	1.598.700.000,00	1.865.506.794,58
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.598.700.000,00	1.598.700.000,00	1.865.506.794,58
1.02.0.00.0.00.01.0008						Puskesmas Kintamani II	1.621.728.500,00	1.621.728.500,00	2.079.828.567,14
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	573.828.500,00	573.828.500,00	573.828.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	573.828.500,00	573.828.500,00	573.828.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	39.200.000,00	39.200.000,00	39.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	187.878.500,00	187.878.500,00	187.878.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72.700.000,00	72.700.000,00	72.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	136.100.000,00	136.100.000,00	136.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	40.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	47.700.000,00	47.700.000,00	47.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.047.900.000,00	1.047.900.000,00	1.506.000.067,14
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.047.900.000,00	1.047.900.000,00	1.506.000.067,14
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.047.900.000,00	1.047.900.000,00	1.506.000.067,14
1.02.0.00.0.00.01.0009						Puskesmas Kintamani III	1.620.928.500,00	1.620.928.500,00	1.814.387.052,09
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	531.328.500,00	531.328.500,00	531.328.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	531.328.500,00	531.328.500,00	531.328.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	31.600.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	185.528.500,00	185.528.500,00	185.528.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	61.750.000,00	61.750.000,00	61.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	124.600.000,00	124.600.000,00	124.600.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	55.600.000,00	55.600.000,00	55.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.087.400.000,00	1.087.400.000,00	1.280.858.552,09
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.087.400.000,00	1.087.400.000,00	1.280.858.552,09
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.087.400.000,00	1.087.400.000,00	1.280.858.552,09
1.02.0.00.0.00.01.0010						Puskesmas Kintamani IV	1.413.928.500,00	1.413.928.500,00	1.519.172.450,87
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	506.568.500,00	506.568.500,00	506.568.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	506.568.500,00	506.568.500,00	506.568.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	51.300.000,00	51.300.000,00	51.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	157.078.500,00	157.078.500,00	157.078.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.849.500,00	7.849.500,00	7.849.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	54.550.500,00	54.550.500,00	54.550.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	115.440.000,00	115.440.000,00	115.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	29.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.760.000,00	8.760.000,00	8.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.760.000,00	8.760.000,00	8.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.760.000,00	8.760.000,00	8.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	898.600.000,00	898.600.000,00	1.003.843.950,87
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	898.600.000,00	898.600.000,00	1.003.843.950,87
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	898.600.000,00	898.600.000,00	1.003.843.950,87
1.02.0.00.0.00.01.0011						Puskesmas Kintamani V	2.346.950.000,00	2.346.950.000,00	2.358.201.829,13
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	582.450.000,00	582.450.000,00	582.450.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	582.450.000,00	582.450.000,00	582.450.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	46.210.000,00	46.210.000,00	46.210.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	240.800.000,00	240.800.000,00	240.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	42.150.000,00	42.150.000,00	42.150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	137.300.000,00	137.300.000,00	137.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.540.000,00	6.540.000,00	6.540.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	71.100.000,00	71.100.000,00	71.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.764.500.000,00	1.764.500.000,00	1.775.751.829,13
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.764.500.000,00	1.764.500.000,00	1.775.751.829,13
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.764.500.000,00	1.764.500.000,00	1.775.751.829,13
1.02.0.00.0.00.01.0012						Puskesmas Kintamani VI	1.816.001.500,00	1.816.001.500,00	1.937.830.116,34
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	493.912.000,00	493.912.000,00	493.912.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	493.912.000,00	493.912.000,00	493.912.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14.805.000,00	14.805.000,00	14.805.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.600.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	177.619.500,00	177.619.500,00	177.619.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	99.564.000,00	99.564.000,00	99.564.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	109.471.500,00	109.471.500,00	109.471.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	10.152.000,00	10.152.000,00	10.152.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.389.500,00	11.389.500,00	11.389.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.389.500,00	11.389.500,00	11.389.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.389.500,00	11.389.500,00	11.389.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.310.700.000,00	1.310.700.000,00	1.432.528.616,34

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.310.700.000,00	1.310.700.000,00	1.432.528.616,34
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.310.700.000,00	1.310.700.000,00	1.432.528.616,34
1.02.0.00.0.00.02.0000						Rumah Sakit Umum Daerah	148.404.509.000,00	149.955.789.660,13	63.734.164.018,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	17.183.086.634,00	16.291.104.018,00	16.291.104.018,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17.183.086.634,00	16.291.104.018,00	16.291.104.018,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	9.909.694.634,00	9.017.712.018,00	9.017.712.018,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.273.392.000,00	4.273.392.000,00	4.273.392.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	131.071.422.366,00	133.514.685.642,13	47.293.060.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.213.060.000,00	47.293.060.000,00	47.293.060.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.213.060.000,00	47.293.060.000,00	47.293.060.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	83.858.362.366,00	86.221.625.642,13	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	83.858.362.366,00	86.221.625.642,13	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000						Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	94.821.432.706,00	90.740.790.706,00	156.672.682.706,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	92.591.592.706,00	88.510.950.706,00	150.022.842.706,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	796.817.000,00	1.131.175.000,00	1.131.175.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	796.817.000,00	1.131.175.000,00	1.131.175.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	647.777.000,00	777.777.000,00	777.777.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	30.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	119.040.000,00	353.398.000,00	353.398.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.185.466.606,00	6.170.466.606,00	6.170.466.606,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.185.466.606,00	6.170.466.606,00	6.170.466.606,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	486.847.200,00	486.847.200,00	486.847.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5.698.619.406,00	5.683.619.406,00	5.683.619.406,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	578.701.150,00	578.701.150,00	578.701.150,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	578.701.150,00	578.701.150,00	578.701.150,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	248.701.150,00	248.701.150,00	248.701.150,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.649.309.000,00	2.899.309.000,00	3.149.309.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.649.309.000,00	2.899.309.000,00	3.149.309.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.704.409.000,00	1.904.409.000,00	2.154.409.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	944.900.000,00	994.900.000,00	994.900.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.642.837.140,00	1.968.837.140,00	1.970.877.140,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.642.837.140,00	1.968.837.140,00	1.970.877.140,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.642.837.140,00	1.968.837.140,00	1.970.877.140,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	09	2.01	0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	66.966.293.860,00	61.990.293.860,00	123.303.453.860,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	66.966.293.860,00	61.990.293.860,00	123.303.453.860,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	61.688.552.200,00	56.712.552.200,00	118.025.712.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.277.741.660,00	5.277.741.660,00	5.277.741.660,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	29.265.000,00	29.265.000,00	49.265.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	29.265.000,00	29.265.000,00	49.265.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	29.265.000,00	29.265.000,00	49.265.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	258.420.000,00	258.420.000,00	258.420.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	116.920.000,00	116.920.000,00	116.920.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	116.920.000,00	116.920.000,00	116.920.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	70.200.000,00	70.200.000,00	70.200.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	70.200.000,00	70.200.000,00	70.200.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	71.300.000,00	71.300.000,00	71.300.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	71.300.000,00	71.300.000,00	71.300.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.484.482.950,00	13.484.482.950,00	13.411.174.950,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.799.371.000,00	11.799.371.000,00	11.799.371.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.799.371.000,00	11.799.371.000,00	11.799.371.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	408.972.200,00	408.972.200,00	408.972.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.187.000,00	7.187.000,00	7.187.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	357.250.200,00	357.250.200,00	357.250.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.815.000,00	40.815.000,00	40.815.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.871.600,00	90.871.600,00	90.871.600,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.680.000,00	17.680.000,00	17.680.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.150.000,00	53.150.000,00	53.150.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.041.600,00	20.041.600,00	20.041.600,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.185.268.150,00	1.185.268.150,00	1.111.960.150,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	392.343.150,00	392.343.150,00	392.343.150,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	627.743.000,00	627.743.000,00	554.435.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.640.000,00	31.640.000,00	31.640.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.742.000,00	86.742.000,00	86.742.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.229.840.000,00	2.229.840.000,00	6.649.840.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	394.840.000,00	394.840.000,00	814.840.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	394.840.000,00	394.840.000,00	814.840.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	394.840.000,00	394.840.000,00	814.840.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.655.000.000,00	1.655.000.000,00	5.655.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.655.000.000,00	1.655.000.000,00	5.655.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.655.000.000,00	1.655.000.000,00	5.655.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000						Satuan Polisi Pamong Praja	12.066.829.150,00	12.066.829.150,00	12.066.829.150,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.066.829.150,00	12.066.829.150,00	12.066.829.150,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.539.853.000,00	1.539.853.000,00	1.539.853.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.307.217.300,00	1.307.217.300,00	1.307.217.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5.934.000,00	5.934.000,00	5.934.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.297.443.300,00	1.297.443.300,00	1.297.443.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	217.355.950,00	217.355.950,00	217.355.950,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	247.500,00	247.500,00	247.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	2.183.100,00	2.183.100,00	2.183.100,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	214.200,00	214.200,00	214.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.069.950,00	9.069.950,00	9.069.950,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	205.533.200,00	205.533.200,00	205.533.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	108.000,00	108.000,00	108.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	15.279.750,00	15.279.750,00	15.279.750,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	15.279.750,00	15.279.750,00	15.279.750,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.526.976.150,00	10.526.976.150,00	10.526.976.150,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.224.250,00	69.224.250,00	69.224.250,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.764.550,00	66.764.550,00	66.764.550,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.459.700,00	2.459.700,00	2.459.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.173.990.000,00	10.173.990.000,00	10.173.990.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.173.990.000,00	10.173.990.000,00	10.173.990.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	73.086.600,00	73.086.600,00	73.086.600,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.024.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.018.400,00	2.018.400,00	2.018.400,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.684.200,00	66.684.200,00	66.684.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.370.000,00	15.370.000,00	15.370.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.220.000,00	11.220.000,00	11.220.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.305.300,00	195.305.300,00	195.305.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.975.300,00	185.975.300,00	185.975.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.330.000,00	9.330.000,00	9.330.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	14.207.154.700,00	14.377.154.700,00	14.399.654.700,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	6.942.591.700,00	6.942.591.700,00	6.942.591.700,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	41.670.200,00	41.670.200,00	41.670.200,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	41.670.200,00	41.670.200,00	41.670.200,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	857.759.800,00	857.759.800,00	857.759.800,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	801.699.800,00	801.699.800,00	801.699.800,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	56.060.000,00	56.060.000,00	56.060.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	6.043.161.700,00	6.043.161.700,00	6.043.161.700,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	6.043.161.700,00	6.043.161.700,00	6.043.161.700,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	444.038.000,00	444.038.000,00	444.038.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	444.038.000,00	444.038.000,00	444.038.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	304.920.000,00	304.920.000,00	304.920.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	139.118.000,00	139.118.000,00	139.118.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.820.525.000,00	6.990.525.000,00	7.013.025.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.390.666.000,00	6.560.666.000,00	6.560.666.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.390.666.000,00	6.560.666.000,00	6.560.666.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.325.200,00	52.325.200,00	52.341.500,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.389.900,00	2.389.900,00	2.389.900,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.364.400,00	1.364.400,00	1.364.400,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.404.100,00	41.404.100,00	41.420.400,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.066.800,00	5.066.800,00	5.066.800,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.650.000,00	101.650.000,00	101.650.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.050.000,00	37.050.000,00	37.050.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.883.800,00	275.883.800,00	298.367.500,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253.983.800,00	253.983.800,00	276.467.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.909.630.050,00	5.929.630.050,00	5.929.630.050,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.456.517.550,00	5.476.517.550,00	5.475.273.550,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	104.850.100,00	104.850.100,00	104.850.100,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	104.850.100,00	104.850.100,00	104.850.100,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	37.150.000,00	37.150.000,00	37.150.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	32.161.000,00	32.161.000,00	32.161.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35.539.100,00	35.539.100,00	35.539.100,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	187.187.800,00	187.187.800,00	187.187.800,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	137.552.800,00	137.552.800,00	137.552.800,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	39.500.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	98.052.800,00	98.052.800,00	98.052.800,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	49.635.000,00	49.635.000,00	49.635.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	2.635.000,00	2.635.000,00	2.635.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	57.775.000,00	57.775.000,00	57.775.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	57.775.000,00	57.775.000,00	57.775.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	57.775.000,00	57.775.000,00	57.775.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	53.103.600,00	53.103.600,00	53.103.600,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	53.103.600,00	53.103.600,00	53.103.600,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	53.103.600,00	53.103.600,00	53.103.600,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.053.601.050,00	5.073.601.050,00	5.072.357.050,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.385.614.000,00	4.405.614.000,00	4.405.614.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.385.614.000,00	4.405.614.000,00	4.405.614.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	359.179.400,00	359.179.400,00	359.179.400,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.164.300,00	4.164.300,00	4.164.300,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.575.200,00	3.575.200,00	3.575.200,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	326.577.300,00	326.577.300,00	326.577.300,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.460.200,00	14.460.200,00	14.460.200,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.420.000,00	6.420.000,00	6.420.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.982.400,00	3.982.400,00	3.982.400,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.880.000,00	68.880.000,00	68.880.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.980.000,00	7.980.000,00	7.980.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.300.000,00	36.300.000,00	36.300.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.927.650,00	218.927.650,00	217.683.650,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.217.650,00	200.217.650,00	198.973.650,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.710.000,00	18.710.000,00	18.710.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	453.112.500,00	453.112.500,00	454.356.500,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	453.112.500,00	453.112.500,00	454.356.500,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	165.688.000,00	165.688.000,00	165.688.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	112.520.000,00	112.520.000,00	112.520.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	112.520.000,00	112.520.000,00	112.520.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	23.168.000,00	23.168.000,00	23.168.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	23.168.000,00	23.168.000,00	23.168.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	61.375.000,00	61.375.000,00	61.375.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	61.375.000,00	61.375.000,00	61.375.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	61.375.000,00	61.375.000,00	61.375.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	99.445.500,00	99.445.500,00	100.689.500,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	99.445.500,00	99.445.500,00	100.689.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	80.175.000,00	80.175.000,00	81.419.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	19.270.500,00	19.270.500,00	19.270.500,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	76.604.000,00	76.604.000,00	76.604.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.604.000,00	76.604.000,00	76.604.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	76.604.000,00	76.604.000,00	76.604.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.03	0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000						Dinas Lingkungan Hidup	37.734.806.363,00	37.534.806.363,00	37.534.806.363,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	37.734.806.363,00	37.534.806.363,00	37.534.806.363,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	368.467.350,00	368.467.350,00	368.467.350,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	172.266.850,00	172.266.850,00	172.266.850,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	88.908.150,00	88.908.150,00	88.908.150,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	3.358.700,00	3.358.700,00	3.358.700,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	196.200.500,00	196.200.500,00	196.200.500,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	196.200.500,00	196.200.500,00	196.200.500,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.328.228.000,00	1.328.228.000,00	1.360.766.036,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.328.228.000,00	1.328.228.000,00	1.360.766.036,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.328.228.000,00	1.328.228.000,00	1.360.766.036,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1.321.750,00	1.321.750,00	1.321.750,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	1.321.750,00	1.321.750,00	1.321.750,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	1.321.750,00	1.321.750,00	1.321.750,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	47.095.000,00	47.095.000,00	47.095.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	47.095.000,00	47.095.000,00	47.095.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	47.095.000,00	47.095.000,00	47.095.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	6.111.750,00	6.111.750,00	6.111.750,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.111.750,00	6.111.750,00	6.111.750,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	6.111.750,00	6.111.750,00	6.111.750,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.840.455.513,00	9.840.455.513,00	9.796.117.477,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	9.840.455.513,00	9.840.455.513,00	9.796.117.477,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.098.412.400,00	4.098.412.400,00	4.108.621.700,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	5.709.043.113,00	5.709.043.113,00	5.654.495.777,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.042.077.000,00	25.842.077.000,00	25.853.877.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.423.900,00	8.423.900,00	8.423.900,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.496.250,00	4.496.250,00	4.496.250,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.927.650,00	3.927.650,00	3.927.650,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.451.266.800,00	25.251.266.800,00	25.251.266.800,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.450.391.800,00	25.250.391.800,00	25.250.391.800,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	875.000,00	875.000,00	875.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	303.229.000,00	303.229.000,00	307.229.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.988.800,00	3.988.800,00	3.988.800,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.037.600,00	15.037.600,00	15.037.600,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	259.976.600,00	259.976.600,00	263.976.600,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.126.000,00	22.126.000,00	22.126.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.867.500,00	83.867.500,00	83.867.500,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.567.500,00	71.567.500,00	71.567.500,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.289.800,00	195.289.800,00	203.089.800,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.359.800,00	183.359.800,00	191.159.800,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.930.000,00	11.930.000,00	11.930.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.264.246.400,00	6.538.246.400,00	6.538.246.400,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.264.246.400,00	6.538.246.400,00	6.538.246.400,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	468.972.400,00	468.972.400,00	468.972.400,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	393.324.000,00	393.324.000,00	428.352.200,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	393.324.000,00	393.324.000,00	428.352.200,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	75.648.400,00	75.648.400,00	40.620.200,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	75.648.400,00	75.648.400,00	40.620.200,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.04	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	222.122.000,00	222.122.000,00	222.122.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	96.722.000,00	96.722.000,00	96.722.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	96.722.000,00	96.722.000,00	96.722.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	125.400.000,00	125.400.000,00	125.400.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	125.400.000,00	125.400.000,00	125.400.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	142.454.700,00	142.454.700,00	142.454.700,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	10.850.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	10.850.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	130.540.000,00	130.540.000,00	130.540.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	130.540.000,00	130.540.000,00	130.540.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.064.700,00	1.064.700,00	1.064.700,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.064.700,00	1.064.700,00	1.064.700,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.413.197.300,00	5.687.197.300,00	5.687.197.300,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.810.000,00	2.810.000,00	2.810.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.810.000,00	2.810.000,00	2.810.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.909.582.000,00	5.129.582.000,00	5.129.582.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.909.582.000,00	5.129.582.000,00	5.129.582.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.802.900,00	145.802.900,00	145.802.900,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.869.200,00	5.869.200,00	5.869.200,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.704.400,00	6.704.400,00	6.704.400,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.202.800,00	124.202.800,00	124.202.800,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.406.500,00	4.406.500,00	4.406.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.760.000,00	296.760.000,00	296.760.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.200.000,00	60.200.000,00	60.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.560.000,00	232.560.000,00	232.560.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.242.400,00	112.242.400,00	112.242.400,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.062.400,00	84.062.400,00	84.062.400,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.180.000,00	28.180.000,00	28.180.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.387.380.100,00	12.387.380.100,00	12.459.130.100,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.011.676.100,00	8.011.676.100,00	8.049.676.100,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	2.581.500,00	2.581.500,00	2.581.500,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	2.581.500,00	2.581.500,00	2.581.500,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2.266.500,00	2.266.500,00	2.266.500,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	315.000,00	315.000,00	315.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.988.727.000,00	1.988.727.000,00	2.014.727.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.988.727.000,00	1.988.727.000,00	2.014.727.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	358.550.000,00	358.550.000,00	358.550.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.301.250.000,00	1.301.250.000,00	1.314.250.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	138.425.000,00	138.425.000,00	138.425.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	110.985.500,00	110.985.500,00	123.985.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	6.585.000,00	6.585.000,00	6.585.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	14.235.000,00	14.235.000,00	14.235.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	35.802.000,00	35.802.000,00	35.802.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	6.840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	8.944.500,00	8.944.500,00	8.944.500,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	889.061.350,00	889.061.350,00	901.061.350,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	889.061.350,00	889.061.350,00	901.061.350,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	80.944.350,00	80.944.350,00	92.944.350,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	24.306.000,00	24.306.000,00	24.306.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	21.351.000,00	21.351.000,00	21.351.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	762.460.000,00	762.460.000,00	762.460.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.131.306.250,00	5.131.306.250,00	5.131.306.250,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.569.129.000,00	4.569.129.000,00	4.569.129.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.569.129.000,00	4.569.129.000,00	4.569.129.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	247.474.950,00	247.474.950,00	247.474.950,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.382.800,00	3.382.800,00	3.382.800,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.077.600,00	29.077.600,00	29.077.600,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	195.650.900,00	195.650.900,00	195.650.900,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.023.650,00	11.023.650,00	11.023.650,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.340.000,00	8.340.000,00	8.340.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.500.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.202.300,00	254.202.300,00	254.202.300,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	232.302.300,00	232.302.300,00	232.302.300,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.375.704.000,00	4.375.704.000,00	4.409.454.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	756.820.000,00	756.820.000,00	756.820.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.01	0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	756.820.000,00	756.820.000,00	756.820.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	117.600.000,00	117.600.000,00	117.600.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	579.220.000,00	579.220.000,00	579.220.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.227.964.000,00	2.227.964.000,00	2.261.714.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	438.302.000,00	438.302.000,00	438.302.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	147.000.000,00	147.000.000,00	147.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	109.102.000,00	109.102.000,00	109.102.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	134.200.000,00	134.200.000,00	134.200.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.347.964.000,00	1.347.964.000,00	1.369.714.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	396.000.000,00	396.000.000,00	396.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	951.964.000,00	951.964.000,00	973.714.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	262.498.000,00	262.498.000,00	262.498.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	38.548.000,00	38.548.000,00	38.548.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	198.050.000,00	198.050.000,00	198.050.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25.900.000,00	25.900.000,00	25.900.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	179.200.000,00	179.200.000,00	191.200.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	179.200.000,00	179.200.000,00	191.200.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.390.920.000,00	1.390.920.000,00	1.390.920.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.390.920.000,00	1.390.920.000,00	1.390.920.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1.332.720.000,00	1.332.720.000,00	1.332.720.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perhubungan	8.365.150.000,00	8.485.150.000,00	8.485.150.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	8.365.150.000,00	8.485.150.000,00	8.485.150.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.035.147.500,00	3.035.147.500,00	3.035.147.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.732.674.400,00	1.732.674.400,00	1.732.674.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.732.674.400,00	1.732.674.400,00	1.732.674.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	118.790.200,00	118.790.200,00	118.790.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	118.790.200,00	118.790.200,00	118.790.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	329.175.400,00	329.175.400,00	329.175.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	329.175.400,00	329.175.400,00	329.175.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	751.854.850,00	751.854.850,00	751.854.850,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	751.854.850,00	751.854.850,00	751.854.850,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	36.561.600,00	36.561.600,00	36.561.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	36.561.600,00	36.561.600,00	36.561.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.091.050,00	66.091.050,00	66.091.050,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	66.091.050,00	66.091.050,00	66.091.050,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	48.051.450,00	48.051.450,00	48.051.450,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	2.04		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	48.051.450,00	48.051.450,00	48.051.450,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	48.051.450,00	48.051.450,00	48.051.450,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	2.05		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	2.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.281.951.050,00	5.401.951.050,00	5.401.951.050,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.437.236.000,00	4.557.236.000,00	4.557.236.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.437.236.000,00	4.557.236.000,00	4.557.236.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	392.353.200,00	392.353.200,00	392.353.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.372.600,00	1.372.600,00	1.372.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.789.400,00	4.789.400,00	4.789.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	225.196.200,00	225.196.200,00	225.196.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	155.775.000,00	155.775.000,00	155.775.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.060.000,00	178.060.000,00	178.060.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.300.000,00	50.300.000,00	50.300.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.760.000,00	119.760.000,00	119.760.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.801.850,00	231.801.850,00	231.801.850,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	217.601.850,00	217.601.850,00	217.601.850,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000						Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	7.251.686.850,00	7.954.956.850,00	8.126.956.850,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.183.866.850,00	7.887.136.850,00	8.047.136.850,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.856.300.000,00	2.299.570.000,00	2.368.570.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.856.300.000,00	2.299.570.000,00	2.368.570.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	1.077.430.000,00	1.277.430.000,00	1.277.430.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	29.700.000,00	29.700.000,00	43.700.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	749.170.000,00	992.440.000,00	1.047.440.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	981.260.000,00	981.260.000,00	1.060.260.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	981.260.000,00	981.260.000,00	1.060.260.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	0,00	0,00	12.000.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	399.810.000,00	399.810.000,00	466.810.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	580.160.000,00	580.160.000,00	580.160.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.346.306.850,00	4.606.306.850,00	4.618.306.850,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	15.500.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.750.000,00	2.750.000,00	14.750.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	750.000,00	750.000,00	750.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.041.047.450,00	4.301.047.450,00	4.301.047.450,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.041.047.450,00	4.301.047.450,00	4.301.047.450,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.830.300,00	52.830.300,00	52.830.300,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.318.800,00	1.318.800,00	1.318.800,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.611.500,00	44.611.500,00	44.611.500,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.920.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.254.000,00	138.254.000,00	138.254.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.524.000,00	67.524.000,00	67.524.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.730.000,00	59.730.000,00	59.730.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.675.100,00	110.675.100,00	110.675.100,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.975.100,00	92.975.100,00	92.975.100,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.700.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	20	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	20	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	20	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	62.720.000,00	62.720.000,00	74.720.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	62.720.000,00	62.720.000,00	74.720.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.200.000,00	48.200.000,00	54.200.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	7.200.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	14.520.000,00	14.520.000,00	20.520.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.520.000,00	14.520.000,00	20.520.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000						Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	6.552.502.950,00	6.692.152.950,00	6.796.392.150,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	98.431.650,00	98.431.650,00	172.670.850,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	16.383.950,00	16.383.950,00	16.383.950,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03	2.01	0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	16.383.950,00	16.383.950,00	16.383.950,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	16.383.950,00	16.383.950,00	16.383.950,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	60.827.700,00	60.827.700,00	60.827.700,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	60.827.700,00	60.827.700,00	60.827.700,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	60.827.700,00	60.827.700,00	60.827.700,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	21.220.000,00	21.220.000,00	95.459.200,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.220.000,00	21.220.000,00	95.459.200,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	21.220.000,00	21.220.000,00	95.459.200,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.454.071.300,00	6.593.721.300,00	6.623.721.300,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	02	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	85.905.000,00	85.905.000,00	85.905.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	85.905.000,00	85.905.000,00	85.905.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	85.905.000,00	85.905.000,00	85.905.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	159.345.000,00	159.345.000,00	159.345.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	159.345.000,00	159.345.000,00	159.345.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	06	2.01	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	06	2.01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	59.345.000,00	59.345.000,00	59.345.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	218.806.900,00	218.806.900,00	218.806.900,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	218.806.900,00	218.806.900,00	218.806.900,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01	0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01	0012	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	128.188.900,00	128.188.900,00	128.188.900,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	90.618.000,00	90.618.000,00	90.618.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	206.544.000,00	266.194.000,00	266.194.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	206.544.000,00	266.194.000,00	266.194.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	08	2.01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	206.544.000,00	266.194.000,00	266.194.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.783.470.400,00	5.863.470.400,00	5.893.470.400,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.903.892.000,00	4.983.892.000,00	4.983.892.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.903.892.000,00	4.983.892.000,00	4.983.892.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	260.751.450,00	260.751.450,00	260.751.450,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.318.600,00	5.318.600,00	5.318.600,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.381.300,00	26.381.300,00	26.381.300,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	207.492.900,00	207.492.900,00	207.492.900,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.558.650,00	21.558.650,00	21.558.650,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	209.382.000,00	209.382.000,00	209.382.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.382.000,00	9.382.000,00	9.382.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.806.000,00	313.806.000,00	313.806.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.276.000,00	144.276.000,00	144.276.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.530.000,00	162.530.000,00	162.530.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.638.950,00	95.638.950,00	125.638.950,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.473.950,00	77.473.950,00	77.473.950,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.165.000,00	18.165.000,00	18.165.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	30.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.18.0.00.0.00.01.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.085.304.150,00	7.235.304.150,00	7.335.304.150,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.085.304.150,00	7.235.304.150,00	7.335.304.150,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	29.274.500,00	29.274.500,00	29.274.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.194.500,00	5.194.500,00	5.194.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2.629.650,00	2.629.650,00	2.629.650,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2.564.850,00	2.564.850,00	2.564.850,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	24.080.000,00	24.080.000,00	24.080.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	24.080.000,00	24.080.000,00	24.080.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	26.305.500,00	26.305.500,00	26.305.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	26.305.500,00	26.305.500,00	26.305.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	25.305.650,00	25.305.650,00	25.305.650,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	999.850,00	999.850,00	999.850,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	429.628.350,00	429.628.350,00	429.628.350,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	429.628.350,00	429.628.350,00	429.628.350,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	329.769.650,00	329.769.650,00	329.769.650,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	24.114.950,00	24.114.950,00	24.114.950,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	75.743.750,00	75.743.750,00	75.743.750,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	35.450.000,00	35.450.000,00	85.450.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	35.450.000,00	35.450.000,00	85.450.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	450.000,00	450.000,00	20.450.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	450.000,00	450.000,00	30.450.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	34.550.000,00	34.550.000,00	34.550.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	540.000,00	540.000,00	540.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	540.000,00	540.000,00	540.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	540.000,00	540.000,00	540.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.564.105.800,00	6.714.105.800,00	6.764.105.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.658.265.000,00	5.808.265.000,00	5.858.265.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.658.265.000,00	5.808.265.000,00	5.858.265.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.183.150,00	98.183.150,00	98.183.150,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	440.000,00	440.000,00	440.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.083.400,00	2.083.400,00	2.083.400,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.948.500,00	84.948.500,00	84.948.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.601.250,00	5.601.250,00	5.601.250,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.370.000,00	570.370.000,00	570.370.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	257.450.000,00	257.450.000,00	257.450.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	307.920.000,00	307.920.000,00	307.920.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.087.650,00	225.087.650,00	225.087.650,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.907.650,00	98.907.650,00	98.907.650,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.180.000,00	26.180.000,00	26.180.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	43.877.797.100,00	43.877.797.100,00	43.877.797.100,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	9.847.337.800,00	9.847.337.800,00	9.847.337.800,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	7.293.583.100,00	7.293.583.100,00	7.293.583.100,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	669.890.200,00	669.890.200,00	669.890.200,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	669.890.200,00	669.890.200,00	669.890.200,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.623.692.900,00	6.623.692.900,00	6.623.692.900,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	6.623.692.900,00	6.623.692.900,00	6.623.692.900,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.489.493.900,00	2.489.493.900,00	2.489.493.900,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.489.493.900,00	2.489.493.900,00	2.489.493.900,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2.489.493.900,00	2.489.493.900,00	2.489.493.900,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	64.260.800,00	64.260.800,00	64.260.800,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	64.260.800,00	64.260.800,00	64.260.800,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	64.260.800,00	64.260.800,00	64.260.800,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	34.030.459.300,00	34.030.459.300,00	34.030.459.300,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	34.030.459.300,00	34.030.459.300,00	34.030.459.300,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	27.849.900.800,00	27.849.900.800,00	27.849.900.800,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	26.436.466.000,00	26.436.466.000,00	26.436.466.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	26.436.466.000,00	26.436.466.000,00	26.436.466.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.413.434.800,00	1.413.434.800,00	1.413.434.800,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.413.434.800,00	1.413.434.800,00	1.413.434.800,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.04	0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	254.014.000,00	254.014.000,00	254.014.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	254.014.000,00	254.014.000,00	254.014.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	124.010.000,00	124.010.000,00	124.010.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	130.004.000,00	130.004.000,00	130.004.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.926.544.500,00	5.926.544.500,00	5.926.544.500,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.982.000,00	4.982.000,00	4.982.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.882.000,00	2.882.000,00	2.882.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.049.312.000,00	5.049.312.000,00	5.049.312.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.047.412.000,00	5.047.412.000,00	5.047.412.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	518.731.600,00	518.731.600,00	518.731.600,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.398.200,00	3.398.200,00	3.398.200,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.188.200,00	5.188.200,00	5.188.200,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	458.343.700,00	458.343.700,00	458.343.700,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.721.500,00	47.721.500,00	47.721.500,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.709.500,00	233.709.500,00	233.709.500,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.080.000,00	20.080.000,00	20.080.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.349.500,00	190.349.500,00	190.349.500,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.280.000,00	23.280.000,00	23.280.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.809.400,00	119.809.400,00	119.809.400,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.389.400,00	107.389.400,00	107.389.400,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.420.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000						Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	31.946.779.200,00	32.626.779.200,00	32.701.602.700,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	698.827.500,00	698.827.500,00	698.827.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	698.827.500,00	698.827.500,00	698.827.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	199.677.000,00	173.427.000,00	173.427.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	57.109.500,00	130.859.500,00	130.859.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	25.862.000,00	25.862.000,00	25.862.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	0,00	73.750.000,00	73.750.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	31.247.500,00	31.247.500,00	31.247.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	142.567.500,00	42.567.500,00	42.567.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	142.567.500,00	42.567.500,00	42.567.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	473.265.500,00	499.515.500,00	499.515.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	22.745.000,00	22.745.000,00	22.745.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	22.745.000,00	22.745.000,00	22.745.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	450.520.500,00	476.770.500,00	476.770.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	450.520.500,00	476.770.500,00	476.770.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	25.885.000,00	25.885.000,00	25.885.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	25.885.000,00	25.885.000,00	25.885.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25.885.000,00	25.885.000,00	25.885.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	31.247.951.700,00	31.927.951.700,00	32.002.775.200,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.090.125.000,00	1.090.125.000,00	1.114.948.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	771.660.200,00	771.660.200,00	796.483.700,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	771.660.200,00	771.660.200,00	796.483.700,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	57.842.550,00	57.842.550,00	82.666.050,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	302.894.650,00	302.894.650,00	302.894.650,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	04	2.04	0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	410.923.000,00	410.923.000,00	410.923.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	318.464.800,00	318.464.800,00	318.464.800,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	40.265.300,00	40.265.300,00	40.265.300,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	40.265.300,00	40.265.300,00	40.265.300,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	278.199.500,00	278.199.500,00	278.199.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	278.199.500,00	278.199.500,00	278.199.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	30.157.826.700,00	30.837.826.700,00	30.887.826.700,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	827.616.700,00	827.616.700,00	827.616.700,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	467.259.100,00	467.259.100,00	467.259.100,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	388.766.500,00	388.766.500,00	388.766.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	78.492.600,00	78.492.600,00	78.492.600,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	360.357.600,00	360.357.600,00	360.357.600,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.02	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	360.357.600,00	360.357.600,00	360.357.600,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	959.817.600,00	959.817.600,00	1.009.817.600,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	959.817.600,00	959.817.600,00	1.009.817.600,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	205.569.200,00	205.569.200,00	205.569.200,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	754.248.400,00	754.248.400,00	804.248.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.043.439.900,00	1.043.439.900,00	1.043.439.900,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	1.043.439.900,00	1.043.439.900,00	1.043.439.900,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	1.043.439.900,00	1.043.439.900,00	1.043.439.900,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	34.782.050,00	34.782.050,00	34.782.050,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	34.782.050,00	34.782.050,00	34.782.050,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	34.782.050,00	34.782.050,00	34.782.050,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	676.898.600,00	676.898.600,00	676.898.600,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	676.898.600,00	676.898.600,00	676.898.600,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	129.677.600,00	129.677.600,00	129.677.600,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	39.921.000,00	39.921.000,00	39.921.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	507.300.000,00	507.300.000,00	507.300.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.615.271.850,00	27.295.271.850,00	27.295.271.850,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.404.500,00	7.404.500,00	7.404.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.404.500,00	7.404.500,00	7.404.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.326.771.000,00	26.006.771.000,00	26.006.771.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.326.771.000,00	26.006.771.000,00	26.006.771.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	446.841.300,00	446.841.300,00	446.841.300,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.959.600,00	6.959.600,00	6.959.600,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.862.000,00	116.862.000,00	116.862.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	302.097.800,00	302.097.800,00	302.097.800,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.581.900,00	15.581.900,00	15.581.900,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.658.000,00	217.658.000,00	217.658.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.660.000,00	15.660.000,00	15.660.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.998.000,00	201.998.000,00	201.998.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.597.050,00	616.597.050,00	616.597.050,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	223.567.050,00	223.567.050,00	223.567.050,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.030.000,00	22.030.000,00	22.030.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	371.000.000,00	371.000.000,00	371.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000						Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.485.210.200,00	14.485.210.200,00	14.499.710.200,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4.576.422.800,00	4.576.422.800,00	4.590.922.800,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	2.05	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	2.06	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.436.428.200,00	4.436.428.200,00	4.436.428.200,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	4.436.428.200,00	4.436.428.200,00	4.436.428.200,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4.436.428.200,00	4.436.428.200,00	4.436.428.200,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	6.256.000,00	6.256.000,00	6.256.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	6.256.000,00	6.256.000,00	6.256.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6.256.000,00	6.256.000,00	6.256.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	133.738.600,00	133.738.600,00	148.238.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	133.738.600,00	133.738.600,00	148.238.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	130.738.600,00	130.738.600,00	130.738.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	3.000.000,00	3.000.000,00	17.500.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	9.908.787.400,00	9.908.787.400,00	9.908.787.400,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.489.340.000,00	4.489.340.000,00	4.489.340.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	4.489.340.000,00	4.489.340.000,00	4.489.340.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.854.520.000,00	3.854.520.000,00	3.854.520.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	634.820.000,00	634.820.000,00	634.820.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.419.447.400,00	5.419.447.400,00	5.419.447.400,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.807.593.000,00	4.807.593.000,00	4.807.593.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.783.283.000,00	4.783.283.000,00	4.783.283.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.310.000,00	24.310.000,00	24.310.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.806.550,00	273.806.550,00	273.806.550,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.354.000,00	3.354.000,00	3.354.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	240.513.000,00	240.513.000,00	240.513.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.819.550,00	6.819.550,00	6.819.550,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.670.000,00	235.670.000,00	235.670.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.370.000,00	75.370.000,00	75.370.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.300.000,00	140.300.000,00	140.300.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.377.850,00	102.377.850,00	102.377.850,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.407.850,00	82.407.850,00	82.407.850,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.970.000,00	19.970.000,00	19.970.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0000						Sekretariat Daerah	28.064.614.000,00	32.064.614.000,00	32.064.614.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	28.064.614.000,00	32.064.614.000,00	32.064.614.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	28.064.614.000,00	32.064.614.000,00	32.064.614.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.064.614.000,00	32.064.614.000,00	32.064.614.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.327.464.000,00	23.327.464.000,00	23.327.464.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.327.464.000,00	23.327.464.000,00	23.327.464.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	857.070.000,00	857.070.000,00	857.070.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	832.070.000,00	832.070.000,00	832.070.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	880.080.000,00	880.080.000,00	880.080.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	880.080.000,00	880.080.000,00	880.080.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001						Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	29.124.513.300,00	27.124.513.300,00	26.924.513.300,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	23.928.750,00	23.928.750,00	23.928.750,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	23.928.750,00	23.928.750,00	23.928.750,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	23.928.750,00	23.928.750,00	23.928.750,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.928.750,00	23.928.750,00	23.928.750,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	23.928.750,00	23.928.750,00	23.928.750,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	29.100.584.550,00	27.100.584.550,00	26.900.584.550,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	29.100.584.550,00	27.100.584.550,00	26.900.584.550,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	29.100.584.550,00	27.100.584.550,00	26.900.584.550,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	1.010.941.000,00	1.010.941.000,00	1.010.941.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	898.205.000,00	898.205.000,00	898.205.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	109.946.000,00	109.946.000,00	109.946.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	27.109.974.550,00	25.109.974.550,00	24.909.974.550,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	27.088.718.800,00	25.088.718.800,00	24.888.718.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	13.816.500,00	13.816.500,00	13.816.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	7.439.250,00	7.439.250,00	7.439.250,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	944.304.000,00	944.304.000,00	944.304.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	128.237.550,00	128.237.550,00	128.237.550,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	541.996.450,00	541.996.450,00	541.996.450,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	274.070.000,00	274.070.000,00	274.070.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	35.365.000,00	35.365.000,00	35.365.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	35.365.000,00	35.365.000,00	35.365.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0002						Asisten Perekonomian dan Pembangunan	856.627.150,00	856.627.150,00	856.627.150,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	856.627.150,00	856.627.150,00	856.627.150,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	279.721.200,00	279.721.200,00	279.721.200,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6.320.000,00	6.320.000,00	6.320.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	245.655.000,00	245.655.000,00	245.655.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	6.990.200,00	6.990.200,00	6.990.200,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	20.756.000,00	20.756.000,00	20.756.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	254.606.350,00	254.606.350,00	254.606.350,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	44.512.000,00	44.512.000,00	44.512.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	74.864.350,00	74.864.350,00	74.864.350,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	135.230.000,00	135.230.000,00	135.230.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	316.444.600,00	316.444.600,00	316.444.600,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	129.777.100,00	129.777.100,00	129.777.100,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	53.347.500,00	53.347.500,00	53.347.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	133.320.000,00	133.320.000,00	133.320.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	5.855.000,00	5.855.000,00	5.855.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	5.855.000,00	5.855.000,00	5.855.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003						Asisten Administrasi Umum	13.395.222.850,00	13.395.222.850,00	15.919.437.950,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	190.684.250,00	190.684.250,00	190.684.250,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	144.507.250,00	144.507.250,00	144.507.250,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	137.243.450,00	137.243.450,00	137.243.450,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.311.050,00	24.311.050,00	24.311.050,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	5.447.250,00	5.447.250,00	5.447.250,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	5.277.150,00	5.277.150,00	5.277.150,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.090.800,00	13.090.800,00	13.090.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	495.850,00	495.850,00	495.850,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.932.400,00	112.932.400,00	112.932.400,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	112.932.400,00	112.932.400,00	112.932.400,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	7.263.800,00	7.263.800,00	7.263.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	7.263.800,00	7.263.800,00	7.263.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	7.263.800,00	7.263.800,00	7.263.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	46.177.000,00	46.177.000,00	46.177.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	41.157.000,00	41.157.000,00	41.157.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	14.629.000,00	14.629.000,00	14.629.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	9.479.000,00	9.479.000,00	9.479.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	25.163.000,00	25.163.000,00	25.163.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	22.488.000,00	22.488.000,00	22.488.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	5.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.02	0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	13.204.538.600,00	13.204.538.600,00	15.728.753.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	13.204.538.600,00	13.204.538.600,00	15.728.753.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.204.538.600,00	13.204.538.600,00	15.728.753.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.080.000,00	220.080.000,00	219.100.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	220.080.000,00	220.080.000,00	219.100.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.298.220.800,00	2.298.220.800,00	3.331.666.300,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	346.913.400,00	346.913.400,00	434.923.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	157.353.700,00	157.353.700,00	156.346.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.356.071.200,00	1.356.071.200,00	1.502.513.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.882.500,00	67.882.500,00	67.882.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	350.000.000,00	350.000.000,00	1.150.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	2.886.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	2.306.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	380.000.000,00	380.000.000,00	580.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.641.125.000,00	1.641.125.000,00	1.893.871.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	612.925.000,00	612.925.000,00	865.671.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.028.200.000,00	1.028.200.000,00	1.028.200.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.910.521.250,00	1.910.521.250,00	2.243.524.850,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	436.529.000,00	436.529.000,00	563.323.850,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.074.392.250,00	1.074.392.250,00	884.611.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.600.000,00	99.600.000,00	99.600.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	695.990.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	153.300.000,00	153.300.000,00	153.300.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	153.300.000,00	153.300.000,00	153.300.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	980.000.000,00	980.000.000,00	980.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	720.000.000,00	720.000.000,00	720.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	331.290.650,00	331.290.650,00	331.290.650,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	135.643.800,00	135.643.800,00	135.643.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	94.504.000,00	94.504.000,00	94.504.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	101.142.850,00	101.142.850,00	101.142.850,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.870.000.900,00	2.870.000.900,00	2.970.000.900,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	2.338.753.250,00	2.338.753.250,00	2.438.753.250,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	469.043.600,00	469.043.600,00	469.043.600,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	62.204.050,00	62.204.050,00	62.204.050,00
4.02.0.00.0.00.01.0000						Sekretariat DPRD	46.082.812.800,00	49.108.312.800,00	49.997.668.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	46.082.812.800,00	49.108.312.800,00	49.997.668.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	6.076.890.000,00	6.102.390.000,00	6.102.390.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	135.300.000,00	135.300.000,00	135.300.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	135.300.000,00	135.300.000,00	135.300.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	3.816.150.000,00	3.841.650.000,00	3.841.650.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.433.100.000,00	2.433.100.000,00	2.433.100.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	41.250.000,00	41.250.000,00	41.250.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.341.800.000,00	1.367.300.000,00	1.367.300.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.125.440.000,00	2.125.440.000,00	2.125.440.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	2.125.440.000,00	2.125.440.000,00	2.125.440.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.005.922.800,00	43.005.922.800,00	43.895.278.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.743.240.000,00	4.743.240.000,00	3.938.240.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.743.240.000,00	4.743.240.000,00	3.938.240.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.113.761.600,00	1.113.761.600,00	1.157.384.600,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	376.676.600,00	376.676.600,00	376.676.600,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	78.360.000,00	78.360.000,00	78.360.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	513.600.000,00	513.600.000,00	513.600.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	138.750.000,00	138.750.000,00	182.373.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.000.000,00	49.000.000,00	605.377.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.000.000,00	49.000.000,00	145.356.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	460.021.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.178.400.000,00	2.178.400.000,00	2.178.400.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.878.400.000,00	1.878.400.000,00	1.878.400.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.661.400,00	461.661.400,00	461.661.400,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	187.131.400,00	187.131.400,00	187.131.400,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.530.000,00	124.530.000,00	124.530.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	150.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	23.287.014.000,00	23.287.014.000,00	24.381.370.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	22.477.014.000,00	22.477.014.000,00	23.571.370.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	510.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	7.172.845.800,00	11.172.845.800,00	11.172.845.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	53.805.800,00	53.805.800,00	53.805.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	7.119.040.000,00	11.119.040.000,00	11.119.040.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.897.991.150,00	6.117.991.150,00	6.235.620.150,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.897.991.150,00	6.117.991.150,00	6.235.620.150,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	5.897.991.150,00	6.117.991.150,00	6.235.620.150,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	708.383.000,00	708.383.000,00	708.383.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	623.289.000,00	623.289.000,00	623.289.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	425.459.000,00	425.459.000,00	425.459.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	6.990.000,00	6.990.000,00	6.990.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	186.100.000,00	186.100.000,00	186.100.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	24.804.000,00	24.804.000,00	24.804.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	20.850.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2.404.000,00	2.404.000,00	2.404.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	60.290.000,00	60.290.000,00	60.290.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	18.460.000,00	18.460.000,00	18.460.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	41.830.000,00	41.830.000,00	41.830.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	211.495.000,00	211.495.000,00	211.495.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	131.970.000,00	131.970.000,00	131.970.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	103.485.000,00	103.485.000,00	103.485.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	28.485.000,00	28.485.000,00	28.485.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	26.875.000,00	26.875.000,00	26.875.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.255.000,00	24.255.000,00	24.255.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	52.650.000,00	52.650.000,00	52.650.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.030.000,00	24.030.000,00	24.030.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	28.620.000,00	28.620.000,00	28.620.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.978.113.150,00	5.198.113.150,00	5.315.742.150,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.522.517.700,00	4.742.517.700,00	4.742.517.700,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.500.867.700,00	4.720.867.700,00	4.720.867.700,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.650.000,00	21.650.000,00	21.650.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.183.350,00	88.183.350,00	88.183.350,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.162.600,00	1.162.600,00	1.162.600,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.254.400,00	1.254.400,00	1.254.400,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.559.000,00	71.559.000,00	71.559.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.107.350,00	12.107.350,00	12.107.350,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.673.000,00	56.673.000,00	173.802.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	67.629.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.673.000,00	56.673.000,00	106.173.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.260.000,00	187.260.000,00	187.260.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.760.000,00	166.760.000,00	166.760.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.904.100,00	121.904.100,00	122.404.100,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.704.100,00	107.704.100,00	108.204.100,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000						Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	179.669.914.785,00	176.592.887.795,00	173.550.568.347,66
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02				KEUANGAN	179.669.914.785,00	176.592.887.795,00	173.550.568.347,66
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	156.237.146.162,00	156.270.021.162,00	156.253.701.029,66
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	852.259.600,00	852.259.600,00	864.259.600,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	23.950.000,00	23.950.000,00	23.950.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	2.852.100,00	2.852.100,00	2.852.100,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	146.108.000,00	146.108.000,00	146.108.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	71.674.850,00	71.674.850,00	71.674.850,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	7.674.650,00	7.674.650,00	19.674.650,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	588.900.000,00	588.900.000,00	588.900.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	134.040.000,00	134.040.000,00	168.717.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	134.040.000,00	134.040.000,00	168.717.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	195.982.500,00	228.857.500,00	228.857.500,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	190.732.500,00	223.607.500,00	223.607.500,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	154.992.064.062,00	154.992.064.062,00	154.929.066.929,66
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	139.919.558.200,00	139.919.558.200,00	139.919.558.200,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.227.335.462,00	2.227.335.462,00	2.164.338.329,66
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12.845.170.400,00	12.845.170.400,00	12.845.170.400,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	62.800.000,00	62.800.000,00	62.800.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	62.800.000,00	62.800.000,00	62.800.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	397.621.650,00	397.621.650,00	475.871.650,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	397.621.650,00	397.621.650,00	475.871.650,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	100.900.000,00	100.900.000,00	215.150.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	4.491.000,00	4.491.000,00	4.491.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	4.430.000,00	4.430.000,00	4.430.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	131.250.000,00	131.250.000,00	95.250.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	52.650.000,00	52.650.000,00	52.650.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	103.900.650,00	103.900.650,00	103.900.650,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.851.070.500,00	2.851.070.500,00	2.970.440.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.851.070.500,00	2.851.070.500,00	2.970.440.500,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	343.671.000,00	343.671.000,00	319.821.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	909.294.500,00	909.294.500,00	925.994.500,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.598.105.000,00	1.598.105.000,00	1.724.625.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.184.076.473,00	17.074.174.483,00	13.850.555.168,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.256.493.473,00	15.146.591.483,00	11.830.342.168,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.256.493.473,00	15.146.591.483,00	11.830.342.168,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.085.417.250,00	1.085.417.250,00	1.089.248.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.882.000,00	3.882.000,00	3.882.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.013.634.300,00	1.013.634.300,00	1.016.634.300,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.100.950,00	63.100.950,00	63.931.700,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	361.359.100,00	361.359.100,00	445.995.100,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	103.369.100,00	103.369.100,00	128.369.100,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	257.990.000,00	257.990.000,00	317.626.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.680.000,00	115.680.000,00	115.680.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.200.000,00	100.200.000,00	100.200.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	480.000,00	480.000,00	480.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.126.650,00	365.126.650,00	369.289.900,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	298.776.650,00	298.776.650,00	302.939.900,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.350.000,00	66.350.000,00	66.350.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.694.846.800,00	7.084.221.800,00	7.084.221.800,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	5.979.291.300,00	6.347.291.300,00	6.347.291.300,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	506.601.000,00	514.601.000,00	514.601.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	117.955.500,00	117.955.500,00	117.955.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	54.462.500,00	54.462.500,00	54.462.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	16.227.500,00	16.227.500,00	16.227.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	21.783.000,00	21.783.000,00	21.783.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	21.337.500,00	21.337.500,00	21.337.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	3.945.000,00	3.945.000,00	3.945.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	91.202.500,00	99.202.500,00	99.202.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	26.392.500,00	26.392.500,00	26.392.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	44.760.000,00	44.760.000,00	44.760.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	20.050.000,00	28.050.000,00	28.050.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	173.801.500,00	173.801.500,00	173.801.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	39.187.500,00	39.187.500,00	39.187.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	120.214.000,00	120.214.000,00	120.214.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	123.641.500,00	123.641.500,00	123.641.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	2.574.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	121.067.500,00	121.067.500,00	121.067.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.472.690.300,00	5.832.690.300,00	5.832.690.300,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.332.500,00	1.332.500,00	1.332.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.332.500,00	1.332.500,00	1.332.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.057.543.000,00	5.417.543.000,00	5.417.543.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.057.153.000,00	5.417.153.000,00	5.417.153.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	390.000,00	390.000,00	390.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	585.000,00	585.000,00	585.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	585.000,00	585.000,00	585.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.640.000,00	15.640.000,00	15.640.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.640.000,00	15.640.000,00	15.640.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.407.300,00	84.407.300,00	84.407.300,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.109.800,00	1.109.800,00	1.109.800,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.282.500,00	77.282.500,00	77.282.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	675.000,00	675.000,00	675.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.500.000,00	211.500.000,00	211.500.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.100.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.400.000,00	179.400.000,00	179.400.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.807.500,00	100.807.500,00	100.807.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.277.500,00	97.277.500,00	97.277.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.13		Penataan Organisasi	875.000,00	875.000,00	875.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	875.000,00	875.000,00	875.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	715.555.500,00	736.930.500,00	736.930.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	715.555.500,00	736.930.500,00	736.930.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	715.555.500,00	736.930.500,00	736.930.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	715.555.500,00	736.930.500,00	736.930.500,00
5.05.0.00.0.00.01.0000						Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.543.817.300,00	1.843.817.300,00	1.843.817.300,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.543.817.300,00	1.843.817.300,00	1.843.817.300,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	508.085.300,00	508.085.300,00	501.387.300,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	341.897.100,00	341.897.100,00	341.897.100,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	341.897.100,00	341.897.100,00	341.897.100,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	166.188.200,00	166.188.200,00	159.490.200,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	119.258.800,00	119.258.800,00	114.478.800,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	46.929.400,00	46.929.400,00	45.011.400,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.035.732.000,00	1.335.732.000,00	1.342.430.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	841.347.000,00	1.141.347.000,00	1.141.347.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	840.132.000,00	1.140.132.000,00	1.140.132.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.677.300,00	46.677.300,00	46.677.300,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.878.900,00	1.878.900,00	1.878.900,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.107.600,00	2.107.600,00	2.107.600,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.224.800,00	36.224.800,00	36.224.800,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.566.000,00	2.566.000,00	2.566.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.542.000,00	30.542.000,00	31.600.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.542.000,00	30.542.000,00	31.600.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.390.000,00	65.390.000,00	71.030.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.430.000,00	4.430.000,00	4.430.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.960.000,00	48.960.000,00	54.600.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.125.700,00	50.125.700,00	50.125.700,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.555.700,00	46.555.700,00	46.555.700,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000						Inspektorat	11.996.611.200,00	14.096.611.200,00	14.304.894.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11.996.611.200,00	14.096.611.200,00	14.304.894.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	11.996.611.200,00	14.096.611.200,00	14.304.894.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	329.630.000,00	430.230.000,00	480.230.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	297.430.000,00	397.230.000,00	447.230.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	117.720.000,00	217.520.000,00	267.520.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	73.315.500,00	73.315.500,00	73.315.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	26.684.500,00	26.684.500,00	26.684.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	72.510.000,00	72.510.000,00	72.510.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	32.200.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	32.200.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	755.450.000,00	560.530.000,00	560.530.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	755.450.000,00	560.530.000,00	560.530.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	66.120.000,00	66.120.000,00	66.120.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	575.380.000,00	380.460.000,00	380.460.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	80.950.000,00	80.950.000,00	80.950.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.911.531.200,00	13.105.851.200,00	13.264.134.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.206.042.000,00	11.306.042.000,00	11.306.042.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.206.042.000,00	11.306.042.000,00	11.306.042.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.136.400.000,00	1.136.400.000,00	1.136.400.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.136.400.000,00	1.136.400.000,00	1.136.400.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.835.700,00	149.255.700,00	149.255.700,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.068.400,00	1.068.400,00	1.068.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.111.800,00	135.531.800,00	135.531.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.035.500,00	8.035.500,00	8.035.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.477.800,00	157.828.500,00	316.112.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	9.642.800,00	51.747.500,00	161.031.100,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.835.000,00	106.081.000,00	155.081.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.466.800,00	151.466.800,00	151.466.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.466.800,00	133.466.800,00	133.466.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.308.900,00	204.858.200,00	204.858.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.898.900,00	175.448.200,00	175.448.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.410.000,00	29.410.000,00	29.410.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000						Kecamatan Bangli	9.949.748.485,00	10.089.748.485,00	10.290.248.485,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	9.949.748.485,00	10.089.748.485,00	10.290.248.485,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01				KECAMATAN	9.949.748.485,00	10.089.748.485,00	10.290.248.485,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.616.302.985,00	1.616.302.985,00	1.616.302.985,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.107.500,00	25.107.500,00	25.107.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.107.500,00	25.107.500,00	25.107.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.591.195.485,00	1.591.195.485,00	1.591.195.485,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	362.592.400,00	362.592.400,00	362.592.400,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	406.881.210,00	406.881.210,00	406.881.210,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	371.616.800,00	371.616.800,00	371.616.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	450.105.075,00	450.105.075,00	450.105.075,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.030.000,00	9.030.000,00	9.030.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.030.000,00	9.030.000,00	9.030.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.030.000,00	9.030.000,00	9.030.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.062.000,00	32.062.000,00	32.062.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.062.000,00	32.062.000,00	32.062.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	32.062.000,00	32.062.000,00	32.062.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.285.000,00	4.285.000,00	4.285.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.285.000,00	4.285.000,00	4.285.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.285.000,00	4.285.000,00	4.285.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.284.188.500,00	8.424.188.500,00	8.624.688.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	387.500,00	387.500,00	387.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	387.500,00	387.500,00	387.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.233.322.000,00	6.373.322.000,00	6.373.322.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.233.322.000,00	6.373.322.000,00	6.373.322.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	362.933.100,00	362.933.100,00	363.433.100,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	346.878.700,00	346.878.700,00	347.378.700,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.804.400,00	11.804.400,00	11.804.400,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.608.601.000,00	1.608.601.000,00	1.608.601.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.735.000,00	61.735.000,00	61.735.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.541.866.000,00	1.541.866.000,00	1.541.866.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.944.900,00	78.944.900,00	278.944.900,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.584.900,00	67.584.900,00	67.584.900,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.360.000,00	11.360.000,00	11.360.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	200.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000						Kecamatan Kintamani	3.791.914.250,00	3.791.914.250,00	3.821.914.250,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	126.008.000,00	126.008.000,00	126.008.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	126.008.000,00	126.008.000,00	126.008.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.142.800,00	7.142.800,00	7.142.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	118.865.200,00	118.865.200,00	118.865.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	63.754.000,00	63.754.000,00	63.754.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	63.754.000,00	63.754.000,00	63.754.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	62.614.000,00	62.614.000,00	62.614.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	39.724.400,00	39.724.400,00	39.724.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	39.724.400,00	39.724.400,00	39.724.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	39.724.400,00	39.724.400,00	39.724.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	76.816.800,00	76.816.800,00	76.816.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	76.816.800,00	76.816.800,00	76.816.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	76.816.800,00	76.816.800,00	76.816.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.485.611.050,00	3.485.611.050,00	3.515.611.050,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.730.000,00	16.730.000,00	16.730.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	720.000,00	720.000,00	720.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.010.000,00	16.010.000,00	16.010.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.950.677.000,00	2.950.677.000,00	2.950.677.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.950.677.000,00	2.950.677.000,00	2.950.677.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.860.800,00	239.860.800,00	239.860.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	238.780.800,00	238.780.800,00	238.780.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.920.000,00	103.920.000,00	103.920.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.920.000,00	80.920.000,00	80.920.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.423.250,00	174.423.250,00	174.423.250,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.773.250,00	170.773.250,00	170.773.250,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000						Kecamatan Susut	3.481.030.500,00	3.621.030.500,00	3.621.030.500,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.120.000,00	51.120.000,00	51.120.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	51.120.000,00	51.120.000,00	51.120.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47.220.000,00	47.220.000,00	47.220.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	48.600.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	48.600.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48.600.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.758.050,00	10.758.050,00	10.758.050,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.758.050,00	10.758.050,00	10.758.050,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10.758.050,00	10.758.050,00	10.758.050,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.342.252.450,00	3.482.252.450,00	3.482.252.450,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.939.162.000,00	3.079.162.000,00	3.079.162.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.939.162.000,00	3.079.162.000,00	3.079.162.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	223.138.200,00	224.348.200,00	224.348.200,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.736.200,00	1.186.200,00	1.186.200,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	211.949.600,00	213.709.600,00	213.709.600,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.352.400,00	7.352.400,00	7.352.400,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.520.000,00	30.310.000,00	30.310.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.520.000,00	30.310.000,00	30.310.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.938.000,00	87.938.000,00	87.938.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.310.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.648.000,00	67.648.000,00	67.648.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.980.000,00	16.980.000,00	16.980.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.494.250,00	60.494.250,00	60.494.250,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.114.250,00	56.114.250,00	56.114.250,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.380.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000						Kecamatan Tembuku	4.191.425.700,00	4.191.425.700,00	4.191.425.700,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.520.000,00	9.520.000,00	9.520.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.520.000,00	9.520.000,00	9.520.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38.640.000,00	38.640.000,00	38.640.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38.640.000,00	38.640.000,00	38.640.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.640.000,00	38.640.000,00	38.640.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.133.745.700,00	4.133.745.700,00	4.133.745.700,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.534.385.000,00	3.534.385.000,00	3.534.385.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.534.385.000,00	3.534.385.000,00	3.534.385.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.321.500,00	142.321.500,00	142.321.500,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.656.800,00	6.656.800,00	6.656.800,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.114.700,00	128.114.700,00	128.114.700,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	262.450.000,00	262.450.000,00	262.450.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.450.000,00	12.450.000,00	12.450.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.336.000,00	120.336.000,00	120.336.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.516.000,00	15.516.000,00	15.516.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.320.000,00	101.320.000,00	101.320.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.253.200,00	74.253.200,00	74.253.200,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.603.200,00	70.603.200,00	70.603.200,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.086.719.432,00	6.196.719.432,00	6.196.719.432,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6.086.719.432,00	6.196.719.432,00	6.196.719.432,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.086.719.432,00	6.196.719.432,00	6.196.719.432,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	980.562.950,00	980.562.950,00	980.562.950,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	980.562.950,00	980.562.950,00	980.562.950,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	958.915.450,00	958.915.450,00	958.915.450,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	21.647.500,00	21.647.500,00	21.647.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	918.709.932,00	918.709.932,00	918.709.932,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	918.709.932,00	918.709.932,00	918.709.932,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	803.894.932,00	803.894.932,00	803.894.932,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	101.550.000,00	101.550.000,00	101.550.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	13.265.000,00	13.265.000,00	13.265.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	125.605.000,00	125.605.000,00	125.605.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	125.605.000,00	125.605.000,00	125.605.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	125.605.000,00	125.605.000,00	125.605.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	215.393.550,00	215.393.550,00	215.393.550,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	215.393.550,00	215.393.550,00	215.393.550,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	84.068.550,00	84.068.550,00	84.068.550,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	131.325.000,00	131.325.000,00	131.325.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.834.148.000,00	3.944.148.000,00	3.944.148.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.631.805.000,00	3.741.805.000,00	3.741.805.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.602.060.000,00	3.712.060.000,00	3.712.060.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.745.000,00	29.745.000,00	29.745.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.943.200,00	75.943.200,00	75.943.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.386.200,00	1.386.200,00	1.386.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.863.200,00	12.863.200,00	12.863.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.800.800,00	54.800.800,00	54.800.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.893.000,00	3.893.000,00	3.893.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.520.000,00	36.520.000,00	36.520.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.250.000,00	31.250.000,00	31.250.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.879.800,00	89.879.800,00	89.879.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.819.800,00	79.819.800,00	79.819.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.060.000,00	10.060.000,00	10.060.000,00
						TOTAL	**1.251.131.215.396,00**	**1.251.906.622.066,13**	**1.233.677.397.206,00**

Kab. Bangli, 2 September 2025

Bupati

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Lampiran IX : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 2 September 2025

KABUPATEN BANGLI
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	95.459.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.459.200,00
2	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49.603.600,00	53.103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.603.600,00	53.103.600,00
3	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	755.450.000,00	560.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.450.000,00	560.530.000,00
4	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
5	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	81.021.625.642,13	0,00	5.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.221.625.642,13
6	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	668.100.000,00	1.599.309.000,00	0,00	1.550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.100.000,00	3.149.309.000,00
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	94.350.100,00	104.850.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.350.100,00	104.850.100,00
8	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.038.039.900,00	1.043.439.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.039.900,00	1.043.439.900,00
9	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas Bangli Utara	12.520.000,00	12.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520.000,00	12.520.000,00
10	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	5.655.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655.000.000,00
11	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bangli	0,00	4.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
12	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	234.879.874.400,00	227.090.371.660,00	142.500.000,00	127.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.022.374.400,00	227.217.871.660,00
14	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.611.835.800,00	0,00	92.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704.035.800,00	0,00
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.956.000,00	6.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956.000,00	6.256.000,00
16	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	57.327.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.327.700,00	0,00
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	993.260.000,00	0,00	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.260.000,00
18	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Susut II	535.198.500,00	535.198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.198.500,00	535.198.500,00
19	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	152.598.600,00	676.898.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.598.600,00	676.898.600,00
21	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas Tembuku I	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00
22	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kintamani III	0,00	1.030.201.552,09	0,00	250.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.858.552,09
23	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.939.660.000,00	5.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939.660.000,00	5.270.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
24	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas Kintamani VI	11.389.500,00	11.389.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389.500,00	11.389.500,00
25	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.452.861.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.861.350,00	0,00
26	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	203.144.000,00	266.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.144.000,00	266.194.000,00
28	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	706.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.920.000,00	0,00
29	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bangli	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00
31	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	901.061.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.061.350,00
32	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.463.113.100,00	7.276.083.100,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480.613.100,00	7.293.583.100,00
33	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	29.274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.274.500,00
34	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rumah Sakit Umum Daerah	126.071.422.366,00	47.293.060.000,00	5.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.271.422.366,00	47.293.060.000,00
35	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	211.513.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.513.700,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
36	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Bangli	0,00	1.346.654.972,79	0,00	139.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.505.972,79
37	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Tembuku	0,00	3.870.547.900,00	0,00	263.197.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133.745.700,00
38	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	65.780.800,00	64.260.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.780.800,00	64.260.800,00
39	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kintamani	69.816.800,00	76.816.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.816.800,00	76.816.800,00
40	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	137.484.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.484.700,00	0,00
41	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD	43.136.671.000,00	42.839.901.800,00	0,00	605.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.136.671.000,00	43.445.278.800,00
42	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.283.581.050,00	5.051.357.050,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283.581.050,00	5.072.357.050,00
43	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	5.914.390.000,00	6.102.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914.390.000,00	6.102.390.000,00
44	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah	35.489.944.000,00	32.064.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.489.944.000,00	32.064.614.000,00
45	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.357.668.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357.668.750,00	0,00
46	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Tembuku	0,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00
47	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	62.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.810.000,00	0,00
49	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	259.430.000,00	335.030.000,00	120.200.000,00	145.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.630.000,00	480.230.000,00
50	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Tembuku II	537.858.500,00	537.858.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.858.500,00	537.858.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
51	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	53.744.724.755,00	54.502.805.678,00	25.747.628.745,00	22.964.227.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.492.353.500,00	77.467.032.988,00
52	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Susut	45.130.000,00	51.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.130.000,00	51.120.000,00
53	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Susut	21.100.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100.000,00	24.600.000,00
54	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	125.288.000,00	165.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.288.000,00	165.688.000,00
55	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.396.297.300,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406.297.300,00	0,00
56	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Susut II	1.280.500.000,00	0,00	123.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.700.000,00	0,00
57	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kintamani	108.508.000,00	126.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.508.000,00	126.008.000,00
58	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bangli	6.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705.000,00	0,00
59	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	0,00	23.928.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.928.750,00
60	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kintamani VI	1.202.780.000,00	0,00	107.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.700.000,00	0,00
62	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.640.405.500,00	5.832.690.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640.405.500,00	5.832.690.300,00
63	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas Kintamani IV	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760.000,00	8.760.000,00
64	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.182.740.000,00	4.264.340.000,00	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182.740.000,00	4.489.340.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
65	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	502.722.000,00	475.871.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.722.000,00	475.871.650,00
66	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kintamani II	0,00	1.214.207.434,72	0,00	291.792.632,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.000.067,14
67	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	19.053.239.893,00	13.404.560.068,00	277.790.100,00	445.995.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331.029.993,00	13.850.555.168,00
68	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	142.454.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.454.700,00
69	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	23.040.000,00	0,00	1.947.837.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.877.140,00
70	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.861.590.500,00	2.970.440.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861.590.500,00	2.970.440.500,00
71	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	458.790.000,00	367.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.790.000,00	367.164.000,00
72	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	175.028.350,00	0,00	254.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.628.350,00
73	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kintamani II	573.828.500,00	573.828.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.828.500,00	573.828.500,00
74	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Asisten Administrasi Umum	0,00	137.243.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.243.450,00
75	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
78	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
79	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	403.627.900,00	353.398.000,00	8.726.799.100,00	777.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130.427.000,00	1.131.175.000,00
80	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	0,00	960.542.700,00	0,00	5.982.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942.591.700,00
81	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	388.199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.199.400,00	0,00
82	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	586.960.200,00	635.983.700,00	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.460.200,00	796.483.700,00
83	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	565.955.500,00	736.930.500,00	29.177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.133.000,00	736.930.500,00
84	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satuan Polisi Pamong Praja	10.725.241.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725.241.550,00	0,00
85	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	257.320.000,00	0,00	139.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.438.000,00	0,00
86	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	214.257.000,00	173.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.257.000,00	173.427.000,00
87	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bangli	34.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.482.000,00	0,00
88	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kintamani IV	506.568.500,00	506.568.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.568.500,00	506.568.500,00
89	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.537.743.900,00	2.489.493.900,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.743.900,00	2.489.493.900,00
90	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	298.177.100,00	5.141.940.150,00	0,00	67.629.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.177.100,00	5.209.569.150,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
91	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	812.416.700,00	827.616.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.416.700,00	827.616.700,00
92	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
93	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	10.526.976.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526.976.150,00
94	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Tembuku I	1.305.700.000,00	0,00	168.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.400.000,00	0,00
95	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	375.534.900,00	368.467.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.534.900,00	368.467.350,00
96	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup	5.416.750,00	1.321.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416.750,00	1.321.750,00
98	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Bangli Utara	584.213.000,00	584.213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.213.000,00	584.213.000,00
99	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan	49.872.446.800,00	6.000.000,00	108.537.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.980.984.500,00	6.000.000,00
100	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	144.652.800,00	137.552.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.652.800,00	137.552.800,00
101	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	186.292.800,00	212.322.800,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.892.800,00	212.322.800,00
102	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bangli	0,00	32.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.062.000,00
103	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	2.333.570.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368.570.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
104	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	21.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.220.000,00	0,00
105	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.310.000.000,00	330.000.000,00	100.000.000,00	248.701.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000.000,00	578.701.150,00
106	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kintamani V	1.672.446.000,00	0,00	92.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.500.000,00	0,00
107	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas Tembuku II	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470.000,00	6.470.000,00
108	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas Susut I	6.836.000,00	6.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836.000,00	6.836.000,00
109	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	204.906.900,00	218.806.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.906.900,00	218.806.900,00
110	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Asisten Administrasi Umum	10.399.867.800,00	11.541.409.900,00	1.194.345.500,00	3.607.343.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594.213.300,00	15.148.753.700,00
111	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kintamani	36.224.400,00	39.724.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.224.400,00	39.724.400,00
112	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.801.620.000,00	814.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801.620.000,00	814.840.000,00
113	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	24.349.214.800,00	27.504.031.000,00	100.000.000,00	345.869.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.449.214.800,00	27.849.900.800,00
114	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
115	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Bangli	0,00	9.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030.000,00
116	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kintamani	534.314.050,00	3.485.611.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.314.050,00	3.485.611.050,00
117	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Tembuku	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
118	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	125.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.605.000,00	0,00
119	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.390.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.920.000,00	0,00
120	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	5.692.030.900,00	5.654.088.400,00	209.382.000,00	239.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901.412.900,00	5.893.470.400,00
121	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan	0,00	49.639.268.800,00	0,00	186.275.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.825.544.500,00
122	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Bangli	0,00	1.616.302.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.302.985,00
124	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.831.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.847.000,00	0,00
125	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	59.345.000,00	159.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.345.000,00	159.345.000,00
126	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	0,00	711.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.010.000,00
127	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	6.515.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515.666.000,00	0,00
129	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas Susut II	17.930.000,00	17.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.930.000,00	17.930.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
130	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	26.305.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.305.500,00
131	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.632.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.600.000,00	0,00
132	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Asisten Administrasi Umum	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00	5.020.000,00
134	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Susut I	0,00	1.541.403.497,00	0,00	209.004.575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.408.072,79
136	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.454.039.800,00	4.982.721.260,00	9.751.000.200,00	295.020.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.205.040.000,00	5.277.741.660,00
137	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	54.438.600,00	64.238.600,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.438.600,00	148.238.600,00
138	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup	1.245.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.528.000,00	0,00
139	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perhubungan	0,00	5.189.391.050,00	0,00	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231.891.050,00
140	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	60.827.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.827.700,00
142	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat	11.918.803.400,00	12.948.022.700,00	141.534.800,00	316.112.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060.338.200,00	13.264.134.800,00
143	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kintamani III	531.328.500,00	531.328.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.328.500,00	531.328.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
144	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
145	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Bangli	505.528.500,00	505.528.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.528.500,00	505.528.500,00
146	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kintamani V	582.450.000,00	582.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.450.000,00	582.450.000,00
147	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Tembuku I	512.828.000,00	512.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.828.000,00	512.828.000,00
148	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	4.618.306.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618.306.850,00
149	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	2.581.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581.500,00
150	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Asisten Administrasi Umum	119.743.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.743.450,00	0,00
151	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	213.925.000,00	213.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.925.000,00	213.925.000,00
152	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kintamani VI	0,00	1.318.008.616,34	0,00	114.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.528.616,34
154	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	26.896.918.450,00	26.865.584.550,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.931.918.450,00	26.900.584.550,00
155	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	75.505.000,00	85.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.505.000,00	85.905.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
156	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.390.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.920.000,00
157	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.536.023.100,00	0,00	3.829.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.853.000,00
158	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Bangli	8.567.628.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567.628.500,00	0,00
159	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	16.383.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.383.950,00
161	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	194.495.000,00	211.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.495.000,00	211.495.000,00
162	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tembuku	9.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520.000,00	0,00
163	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Riset dan Inovasi Daerah	961.790.000,00	1.310.830.000,00	42.542.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.332.000,00	1.342.430.000,00
164	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	121.054.500,00	206.954.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.054.500,00	206.954.500,00
165	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Asisten Administrasi Umum	6.253.800,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.263.800,00	0,00
166	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	2.014.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.727.000,00
167	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Tembuku	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00
168	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
169	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.938.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
170	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	49.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.635.000,00
171	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.090.816.981,00	5.683.619.406,00	82.700.000,00	486.847.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173.516.981,00	6.170.466.606,00
172	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	970.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.960.000,00	0,00
173	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.858.588.650,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865.188.650,00	0,00
174	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	440.064.600,00	7.013.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.064.600,00	7.013.025.000,00
175	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Umum Daerah	4.331.637.634,00	3.439.655.018,00	12.851.449.000,00	12.851.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.183.086.634,00	16.291.104.018,00
176	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.392.023.000,00	3.803.246.400,00	231.965.200,00	633.181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623.988.200,00	4.436.428.200,00
177	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281.500,00	0,00
179	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	221.704.000,00	242.504.000,00	33.810.000,00	11.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.514.000,00	254.014.000,00
181	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kintamani VI	493.912.000,00	493.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.912.000,00	493.912.000,00
182	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Bangli	1.400.657.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.657.700,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
183	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	980.562.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.562.950,00
185	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kintamani	68.974.000,00	63.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.974.000,00	63.754.000,00
186	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup	11.981.250,00	6.111.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.981.250,00	6.111.750,00
187	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	468.972.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.972.400,00
188	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	6.192.953.590,00	0,00	1.698.056.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891.010.102,00
189	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.705.417.400,00	5.419.447.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705.417.400,00	5.419.447.400,00
191	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kintamani I	587.150.000,00	587.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.150.000,00	587.150.000,00
192	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bangli	0,00	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880.000,00
193	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	74.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.720.000,00
194	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Susut	42.610.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.610.000,00	48.600.000,00
195	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup	5.312.355.513,00	5.542.822.700,00	4.000.000.000,00	4.253.294.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312.355.513,00	9.796.117.477,00
196	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	61.375.000,00	61.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.375.000,00	61.375.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
197	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Lingkungan Hidup	27.434.872.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.434.872.500,00	0,00
198	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	16.383.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.383.950,00	0,00
199	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	54.275.000,00	57.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.275.000,00	57.775.000,00
200	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Bangli	0,00	8.424.688.500,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624.688.500,00
201	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	95.945.500,00	100.689.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.945.500,00	100.689.500,00
202	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Tembuku	0,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00
203	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	125.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.605.000,00
205	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Tembuku II	0,00	1.499.604.317,41	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.604.317,41
206	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	26.562.531.850,00	26.823.296.850,00	424.440.000,00	471.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.986.971.850,00	27.295.271.850,00
207	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.317.213.400,00	0,00	944.500.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.714.000,00
208	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Susut I	1.533.700.000,00	0,00	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.700.000,00	0,00
209	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Bangli	1.295.800.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.800.000,00	0,00
210	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kintamani V	0,00	1.683.697.829,13	0,00	92.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.751.829,13

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
211	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Asisten Administrasi Umum	20.694.000,00	20.694.000,00	62.963.000,00	20.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.657.000,00	41.157.000,00
212	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	31.282.050,00	34.782.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.282.050,00	34.782.050,00
213	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Asisten Administrasi Umum	0,00	6.253.800,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.263.800,00
214	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tembuku	38.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.640.000,00	0,00
215	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.481.514.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.014.000,00	0,00
216	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas Kintamani III	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
217	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Bangli	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00
219	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	5.858.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858.265.000,00
220	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	372.101.000,00	414.601.000,00	150.248.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.349.000,00	514.601.000,00
222	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.350.766.036,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.766.036,00
223	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Tembuku II	1.484.500.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.500.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
224	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Susut	4.710.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00	3.700.000,00
225	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	22.385.000,00	25.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.385.000,00	25.885.000,00
226	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	148.928.350,00	0,00	254.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.528.350,00	0,00
227	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Tembuku	4.124.477.900,00	0,00	265.647.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390.125.700,00	0,00
228	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46.134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.134.500,00	0,00
229	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tembuku	0,00	38.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.640.000,00
230	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.273.263.400,00	0,00	944.500.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.764.000,00	0,00
231	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	350.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	180.000.000,00
232	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Susut II	0,00	1.430.133.544,46	0,00	244.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.333.544,46
233	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	23.928.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.928.750,00	0,00
234	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	2.415.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	1.050.000,00
235	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Susut	3.341.092.450,00	3.459.862.450,00	39.121.000,00	22.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.213.450,00	3.482.252.450,00
236	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	46.296.944.080,00	49.546.015.258,00	642.303.900,00	1.018.683.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.939.247.980,00	50.564.698.388,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
237	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	813.640.800,00	0,00	92.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.840.800,00
238	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	412.817.600,00	1.009.817.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.817.600,00	1.009.817.600,00
239	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	977.062.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.062.950,00	0,00
243	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	5.677.197.300,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.197.300,00
244	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.903.750.950,00	13.411.174.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.903.750.950,00	13.411.174.950,00
246	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kintamani	3.300.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.677.000,00	0,00
247	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	762.012.700,00	0,00	5.982.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.744.061.700,00	0,00
248	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	25.642.363.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.642.363.300,00
249	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.332.342.100,00	1.324.634.100,00	0,00	0,00	2.227.335.462,00	2.164.338.329,66	167.614.725.600,00	152.764.728.600,00	171.174.403.162,00	156.253.701.029,66

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
250	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan	0,00	2.884.147.500,00	0,00	151.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035.147.500,00
251	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Bangli Utara	1.054.100.000,00	0,00	163.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.700.000,00	0,00
252	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940.000,00	0,00
253	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	222.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.122.000,00
254	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kintamani I	1.436.928.500,00	0,00	161.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.700.000,00	0,00
255	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	30.591.000,00	21.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.591.000,00	21.691.000,00
256	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	215.393.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.393.550,00
257	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	78.524.000,00	76.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.524.000,00	76.604.000,00
258	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perhubungan	5.473.136.050,00	170.060.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515.636.050,00	170.060.000,00
259	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	820.281.000,00	108.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.281.000,00	108.671.000,00
260	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tembuku	0,00	9.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520.000,00
261	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00
262	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	0,00	304.920.000,00	0,00	139.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.038.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
263	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	756.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.820.000,00
264	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	85.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.450.000,00
265	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	441.272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.272.400,00	0,00
266	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Susut I	557.492.500,00	557.492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.492.500,00	557.492.500,00
267	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	204.893.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.893.550,00	0,00
268	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	910.939.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.939.932,00	0,00
270	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	201.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.222.000,00	0,00
271	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00
272	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	4.141.047.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141.047.450,00	0,00
273	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	469.765.500,00	499.515.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.765.500,00	499.515.500,00
274	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	150.210.000,00	158.420.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.210.000,00	258.420.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
275	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	62.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.720.000,00	0,00
276	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kintamani III	911.443.000,00	0,00	175.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.400.000,00	0,00
277	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Tembuku I	0,00	1.321.332.825,43	0,00	498.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.032.825,43
278	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	3.938.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938.878.000,00
279	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kintamani II	922.262.002,00	0,00	125.637.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.900.000,00	0,00
280	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup	53.920.000,00	47.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.920.000,00	47.095.000,00
281	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00
282	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan	48.051.450,00	48.051.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.051.450,00	48.051.450,00
283	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34.145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.145.500,00	0,00
284	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Bangli Utara	0,00	1.103.480.786,31	0,00	202.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.080.786,31
285	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Riset dan Inovasi Daerah	553.325.300,00	501.387.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.325.300,00	501.387.300,00
286	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kintamani I	0,00	1.499.735.294,58	0,00	365.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.506.794,58
287	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	624.683.000,00	708.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.683.000,00	708.383.000,00
288	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	918.709.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.709.932,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
289	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	0,00	5.155.184.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155.184.837,00
290	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan	2.684.376.150,00	0,00	104.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.376.150,00	0,00
291	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja	1.559.220.100,00	0,00	3.829.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.050.000,00	0,00
292	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.057.614.500,00	5.926.544.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057.614.500,00	5.926.544.500,00
293	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas Bangli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
294	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas Kintamani I	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
295	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.265.000,00	49.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.265.000,00	49.265.000,00
296	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	311.664.800,00	318.464.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.664.800,00	318.464.800,00
297	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kintamani IV	856.392.000,00	905.621.871,50	42.208.000,00	98.222.079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	898.600.000,00	1.003.843.950,87
299	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	5.131.306.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131.306.250,00
300	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Susut	11.768.050,00	10.758.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.768.050,00	10.758.050,00
301	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	730.369.650,00	690.869.650,00	165.757.500,00	165.757.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.127.150,00	856.627.150,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
302	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
TOTAL					**968.210.393.306,00**	**973.112.916.711,89**	**80.276.399.043,00**	**72.301.833.506,58**	**2.227.335.462,00**	**2.164.338.329,66**	**167.614.725.600,00**	**152.764.728.600,00**	**1.218.328.853.411,00**	**1.200.343.817.148,13**

Kab. Bangli, 2 September 2025

Bupati

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Lampiran X : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 2 September 2025

KABUPATEN BANGLI
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e						1		1
Golongan IV/d						15		15
Golongan IV/c		20				97		117
Golongan IV/b		7	28			210		245
Golongan IV/a			83	5		272	10	370
Golongan III/e								
Golongan III/d			15	59	2	568	73	717
Golongan III/c				46	3	409	141	599
Golongan III/b				11	6	265	207	489
Golongan III/a				5	3	130	275	413
Golongan II/e								
Golongan II/d						24	375	399
Golongan II/c						13	123	136
Golongan II/b						5	95	100
Golongan II/a						3	42	45
Golongan I/e								
Golongan I/d							21	21
Golongan I/c							4	4
Golongan I/b								
Golongan I/a								
PPPK						648		648

Kab. Bangli, 2 September 2025

Bupati

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Lampiran XI : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 2 September 2025

KABUPATEN BANGLI
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Kab. Bangli, 2 September 2025

Bupati

I GUSTI NGURAH SEDANA ARTA